

S/2012/5



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPEDDA)
Jl. R.A Kartini No.1 (0286)391131 Fax. 391923 Batang 51215

LAPORAN AKHIR

KAJIAN POTENSI INVESTASI PETERNAKAN KABUPATEN BATANG



2012

Kata Pengantar

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selaras dengan sumpah anggota DPRD yang termaktub dalam pasal 320 UU MD3, bahwa setiap anggota "akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia", DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk membangun DPRD modern dan terbuka.

DPRD modern dan terbuka merupakan salah satu pintu yang membuka peluang untuk lebih mendekatkan anggota dan lembaga kepada rakyat, mendengarkan suara rakyat dan melibatkan rakyat dalam proses legislasi dan kegiatan Dewan. Sistem pendukung yang dibangun misalnya *website*, media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram*), *Bill Digest* (Rekam Jejak Lembaga Dewan), *Hansard* (Rekam Jejak Anggota Dewan), Membangun Relasi dengan Media, dan lainnya, sangat membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsi representasi. Pada akhirnya, sistem tersebut akan memberikan penguatan pada lembaga.

Membangun DPRD modern dan terbuka merupakan investasi demokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dan komitmen partai politik, karena partai politik merupakan aktor utama dalam sistem politik perwakilan. Masa depan demokrasi di Indonesia ditentukan oleh wakil-wakil partai politik yang duduk di lembaga perwakilan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan CEPP FISIP UI yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai DPRD Modern dan Terbuka. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Semarang, Februari 2016

Ketua DPRD Priovinsi Jawa Tengah

Drs. Rukma Setyabudi, MM

Kata Pengantar

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung inisiatif Pimpinan dan Anggota untuk membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka. Komitmen tersebut akan diwujudkan diantaranya melalui program-program peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pendukung, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli, serta mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan yang terkait dengan proses terwujudnya DPRD Provinsi Jawa Tengah yang Modern dan Terbuka. Hal tersebut sesuai dengan visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yakni "Mewujudkan Sekretariat yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel".

Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 yang telah menggagas dan memulai kerja membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai DPRD Modern dan Terbuka. Penyusunan buku ini merupakan perwujudan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh *Center for Election Political Party* (CEPP) FISIP Universitas Indonesia.

Semarang, Februari 2016

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Drs. Ign Indra Surya, MM

Kata Pengantar

Presiden Direktur CEPP FISIP Universitas Indonesia

Membangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang modern dan terbuka adalah sebuah keniscayaan. DPRD modern dan terbuka dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan menjalankan fungsi representasi. Dengan menjadi parlemen modern dan terbuka, DPRD diharapkan mampu memperkuat demokrasi perwakilan di tingkat daerah.

CEPP FISIP UI adalah pengagas dan penggerak kerja membangun parlemen modern dan terbuka di Indonesia. Kerja ini dimulai sejak 2013, saat CEPP FISIP UI mulai memperkuat Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja legislasi, pengawasan dan anggaran. Sistem pendukung yang dibangun antara lain: optimalisasi penggunaan *website*, media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram*) *Bill Digest* (Rekam Jejak Lembaga Dewan), *Hansard* (Rekam Jejak Anggota Dewan), *Meet the press*, *Meet the Scholars*, *Meet the Local Parliament*, *Roadshow Media*, Kopi Darat dengan *Netizen*, *Doorstop*, *Public Service Announcement*, merancang ulang Museum DPR RI, menulis naskah akademis untuk penataan kawasan Parlemen, dan lainnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh CEPP FISIP UI, kami memberanikan diri untuk membantu DPRD Provinsi di Indonesia membangun parlemen modern dan terbuka. Buku ini merupakan langkah awal kami untuk membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi DPRD Modern dan Terbuka. Diharapkan buku ini dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca untuk lebih memahami konsep dan kerja membangun DPRD Modern dan Terbuka.

Terima kasih kepada Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mewujudkan kerjasama yang baik ini.

Jakarta, Februari 2016

Presiden Direktur CEPP

Chusnul Mar'iyah Ph.D

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.....	i
Kata Pengantar Gubernur Provinsi Jawa Tengah.....	ii
Kata Pengantar Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	iii
Kata Pengantar Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Tengah.....	iv
Kata Pengantar Presiden Direktur CEPP FISIP UI.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bagian A: DPRD Modern dan Terbuka.....	1
Apa itu DPRD Modern dan Terbuka?	1
Bagaimana Perkembangan Parlemen Modern dan Terbuka?	1
Kapan dan Siapa yang Harus Membangun DPRD Modern dan Terbuka?	2
Bagian B: Belajar Dari Pengalaman DPR RI.....	3
1. DPR RI Pascareformasi 1998.....	3
2. DPR RI Menuju Parlemen Modern: Contoh Program.....	4
a. "Kantor" Berita Parlemen.....	5
b. Media Analisis.....	6
c. Workshop dan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR.....	9
d. Majalah & Buletin Parlementaria.....	10
e. TV Parlemen.....	11
f. Meet the Press, Meet the DPR, dan Meet the Scholars.....	11
g. Kunjungan Masyarakat.....	12
h. Museum dan Perpustakaan.....	12
i. Doorstop.....	13
Bagian C: Membangun DPRD Menjadi Parlemen Modern dan Terbuka.....	15
Konteks Sosial-Politik-Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.....	23
Menuju DPRD Modern dan Terbuka.....	25
1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi.....	27
2. Teknologi Informasi.....	29
3. Fungsi Representasi.....	34

Bagian A: DPRD Modern dan Terbuka



Apa Itu DPRD Modern dan Terbuka?

DPRD modern dan terbuka adalah DPRD yang representatif; membuka ruang untuk partisipasi publik; mudah diakses; terbuka dan transparan; serta memanfaatkan teknologi informasi digital. DPRD modern dan terbuka menampung aspirasi publik yang disampaikan baik melalui cara-cara yang konvensional seperti surat/fax, kunjungan langsung, mengirimkan delegasi, maupun dengan cara memanfaatkan teknologi informasi digital seperti surat elektronik, website, Twitter, Facebook, Youtube, dan lain-lain. DPRD Modern dan Terbuka dapat memperkuat

sistem demokrasi perwakilan di daerah. Anggota dan lembaga DPRD didorong untuk menjadi lebih rasional, profesional, transparan, dan akuntabel.

Bagaimana Perkembangan Parlemen Modern dan Terbuka?

Perkembangan parlemen modern diawali tahun 1997 yaitu pada Konferensi Uni Eropa tentang *"The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance"* dengan fokus adanya perubahan sosial-masyarakat yang terjadi dan harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan. Salah satu penyebab perubahan yang penting adalah kondisi lingkungan internasional yang bercirikan globalisasi, trans-nasionalisasi, dan regionalisasi. Melihat kondisi ini, peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga demokrasi yang harus bersifat terbuka terhadap rakyatnya.

Selanjutnya, konferensi serupa terkait dengan keterbukaan akses informasi dilaksanakan di Jerman pada tahun 2003. Keterbukaan akses informasi di era demokrasi merupakan hal yang penting, terutama informasi yang berkaitan dengan kinerja parlemen. Hasil konferensi ini adalah pentingnya peningkatan dukungan terkait keterbukaan akses berbagai dokumen, informasi, dan data yang ada di parlemen untuk dapat digunakan oleh masyarakat tanpa ada restriksi hukum.

Perkembangan keterbukaan informasi terus berlangsung hingga pada tahun 2012 dengan dilaksanakan *Declaration on Parliamentary Openness* dalam *eventWorld e-Parliament Conferencedi* Roma, Italia.

Membangun parlemen modern dan terbuka adalah tuntutan perubahan zaman. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Kemenangan sistem politik demokrasi (*wave of democracy*). Ini terlihat dari runtuhnya negara-negara otoritarian di Asia dan Afrika, negara-negara komunis di Eropa Timur dan negara-negara junta militer di Amerika Latin. Sistem politik demokrasi telah membawa perubahan penting di parlemen, yaitu adanya dorongan untuk mengakomodasi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya, dan ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya.
2. Kemajuan teknologi informasi digital dan era globalisasi yang melahirkan masyarakat informasi tanpa batasan negara (*stateless information society*). Salah satu dampaknya adalah parlemen yang dahulu mengadopsi teknologi "komunikasi analog" yang bersifat *paper based* mulai ditinggalkan. Pola komunikasi anggota parlemen dengan para konstituen yang sebelumnya bersifat tatap-muka, berbiaya tinggi, menyita waktu, dan birokratis, secara bertahap berubah karena menggunakan berbagai sarana teknologi di era digital.

Kapan dan Siapa yang Harus Membangun DPRD Modern dan Terbuka?

Mewujudkan DPRD modern dan terbuka merupakan jawaban atas tantangan masa depan bangsa dan negara. Sejak Reformasi 1998, tuntutan publik akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas tidak terbendung lagi. Publik yang semakin kritis akibat kemajuan teknologi informasi dan pengaruh globalisasi perlu diantisipasi dengan baik dan responsif oleh lembaga parlemen dalam menjalankan fungsinya.

Membangun DPRD modern dan terbuka membutuhkan waktu serta proses, dan itu harus dimulai saat ini. DPRD periode 2014-2019 diharapkan memberikan prioritas untuk kerja membangun modern dan terbuka, melalui berbagai program kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Bagian B: Belajar dari Pengalaman DPR RI

Pendahuluan

Parlemen modern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada publik, dengan cara memberikan akses untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi di dalam lembaga dewan dan membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Dalam membangun DPR modern, transparansi dan keterbukaan akses terhadap informasi menjadi hal mendasar yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya demokrasi.

"*A Modern Parliament in a Modern Democracy*" adalah target yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga perwakilan di Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan dari semua *stakeholders*. Keberhasilan mencapai parlemen modern juga ditentukan oleh kerja sama dan koordinasi lintas unit kerja Sekretariat Dewan sebagai *supporting system* (sistem pendukung).



Dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka, DPRD bisa belajar dari pengalaman Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang sudah mulai membangun parlemen modern sejak 2013 hingga saat ini.

A. DPR RI Pascareformasi 1998

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang. Salah satu peristiwa besar terjadi pada tahun 1998 ketika rakyat Indonesia berhasil mengakhiri rezim otoriter dan melakukan reformasi sistem politik. Dalam konteks ini, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk dapat merespons perubahan tersebut. Di era teknologi informasi, DPR diharapkan dapat memanfaatkan perkembangannya dengan baik.

Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Untuk memfasilitasi tercapainya parlemen modern dan terbuka, diperlukan sarana dan infrastruktur yang memadai. Ada fakta yang tidak banyak diketahui oleh publik, bahwa



ternyata selama 70 tahun merdeka, Indonesia belum pernah membangun gedung khusus yang diperuntukkan bagi lembaga legislatif. Gedung DPR yang ada saat ini merupakan alih fungsi dari Gedung *CONEFO* (*Conference of New Emerging Forces*). Oleh karena itu, dibutuhkan gedung parlemen yang representatif sebagai simbol negara, dan yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan DPR sebagai parlemen modern.

B. DPR RI Menuju Parlemen Modern

1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

Dalam membangun parlemen modern, DPR sudah memiliki dasar hukum, seperti: [a] Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; [b] UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan data di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR, pada 2014 setidaknya tercatat



511 orang/badan/ lembaga yang meminta informasi tentang risalah rapat dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan DPR dengan jumlah jenis data sebanyak 1.288. Laporan persidangan yang sifatnya terbuka juga sudah dipublikasikan secara langsung melalui homepage www.dpr.go.id. Namun, program kerja tersebut belum dikelola secara lintas unit kerja.



Sejak tahun 2011, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI juga telah menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan BURT Nomor: 08/BURT/DPRRI/I/2010-2011 tentang Penetapan

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar masukan, kritikan, keluhan dan saran dari masyarakat terkait tugas, fungsi dan kewenangan DPRD RI dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik.

Dalam pelaksanaannya masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung baik itu berupa kunjungan langsung maupun mengirimkan delegasi, atau melalui media elektronik diantaranya laman (*website*) <http://pengaduan.dpr.go.id> maupun SMS aspirasi DPR RI di nomor 08119443344 yang ditujukan kepada alat kelengkapan dewan maupun opini pembaca melalui majalah parlementaria, juga melalui surat melalui pos yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Aspirasi dan pengaduan dari publik sudah direspon dengan baik, namun perlu tindak lanjut yang konkrit.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, DPR RI melakukan penguatan terhadap beberapa program kegiatan secara berkelanjutan dan menambah program-program baru yang relevan, di antaranya:

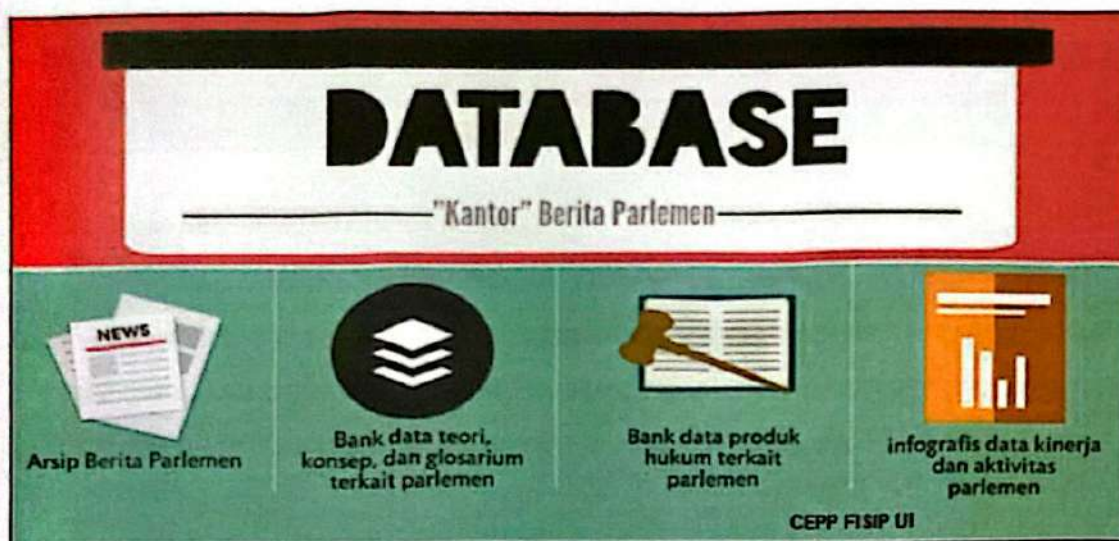
a. **"Kantor" Berita Parlemen**



"Kantor" Berita Parlemen merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang cita-cita membangun parlemen modern. "Kantor" dibangun sebagai pusat informasi resmi DPR RI yang disebarluaskan kepada publik melalui: media cetak (majalah dan buletin), media penyiaran (TV Parlemen), media online (TV Parlemen *Streaming*), *website* dan *social media*. Hal ini

bertujuan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan. "Kantor" ini akan menyeleksi, menyusun prioritas, menentukan agenda setting, membuat hak jawab dan hak koreksi kepada media dan publik.

Melalui "kantor" ini, DPRRI diharapkan menjadi *trend-setter* isu-isu tentang kelembagaan DPR yang berkembang di media. Dengan demikian DPR RI dapat menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses politik di dalamnya. Informasi yang diproduksi oleh DPR RI sebagai dokumen negara kemudian disimpan secara sistematis, baik, dan rapi. Untuk itu, penguatan sistem *database* informasi menjadi hal yang diperhatikan. *Database* adalah bank data dan informasi yang menunjang "Kantor" Berita Parlemen. Dengan demikian berita yang disampaikan selalu berdasarkan data dan informasi informasi yang cepat, tepat dan akurat.



b. Media Analisis

Media analisis sudah dilakukan oleh Tim Kehumasan DPR RI secara rutin. Tim Kehumasan menganalisis tiga jenis media, yakni media cetak, *online*, dan penyiaran. Hasil analisis media adalah berupa ringkasan berita, kliping berita, laporan rekapitulasi isu berita, laporan rekapitulasi *headline* berita, laporan rekapitulasi *tone* berita, laporan rekapitulasi *tone* per media, laporan rekapitulasi *newsmaker*, dan laporan rekapitulasi rekomendasi.

Media Cetak meliputi: Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Jawa Pos, dan Koran Tempo

Media Online meliputi: Detikcom, Yahooonews, dan Vivanews

Tujuan dari media analisis adalah diperolehnya penjelasan tentang *trend* berita (*tone* berita, isu, *headline*, jumlah berita, *newsmaker*) mengenai DPR yang bersumber dari media massa.

Tone Analisis Media

Tone analisis media adalah interpretasi terhadap *framing* media tentang berita DPR. Penulisan tone analisis media dilakukan berdasarkan dua pertimbangan, yaitu: [1] fungsi DPR (fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran); dan [2] asas parlemen modern (keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi perwakilan).

Klasifikasi tone

Positif	Netral	Negatif
Berita digolongkan ke dalam tone positif jika DPR menjalankan fungsinya dan/atau menjalankan asas parlemen modern.	Berita digolongkan ke dalam tone netral jika berita tersebut tidak berkaitan dengan fungsi DPR dan asas parlemen modern.	Berita digolongkan ke dalam tone negatif ketika DPR belum menjalankan fungsinya dan/atau menjalankan asas parlemen modern.

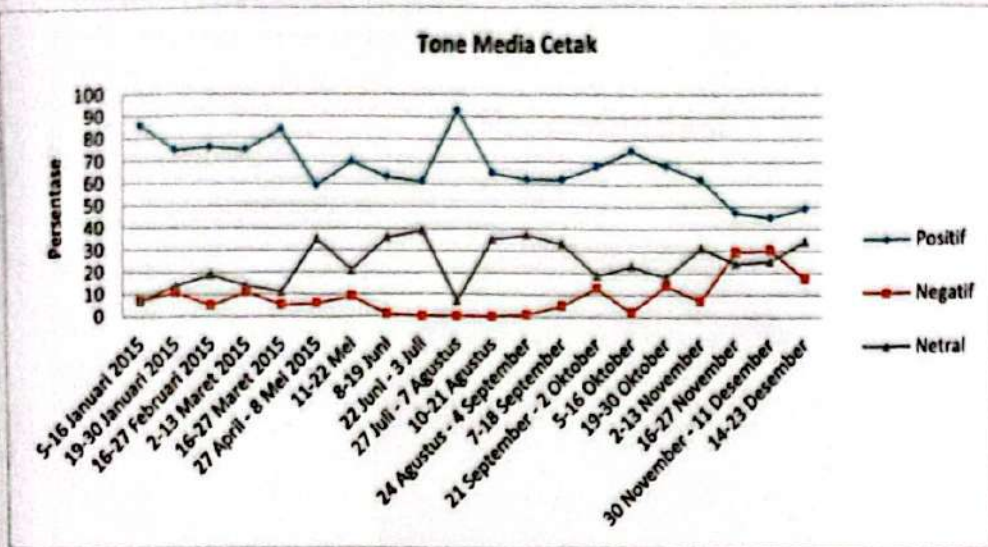
Penulisan Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi analisis media menjadi bahan pertimbangan Pimpinan Dewan untuk ditindaklanjuti berupa diantaranya mengeluarkan *press release*, menyelenggarakan *press conference*, juga tindak lanjut berupa kebijakan. Bahan pertimbangan pimpinan merujuk kepada hasil media analisis dan analisis isu-isu yang sedang dibahas dewan.

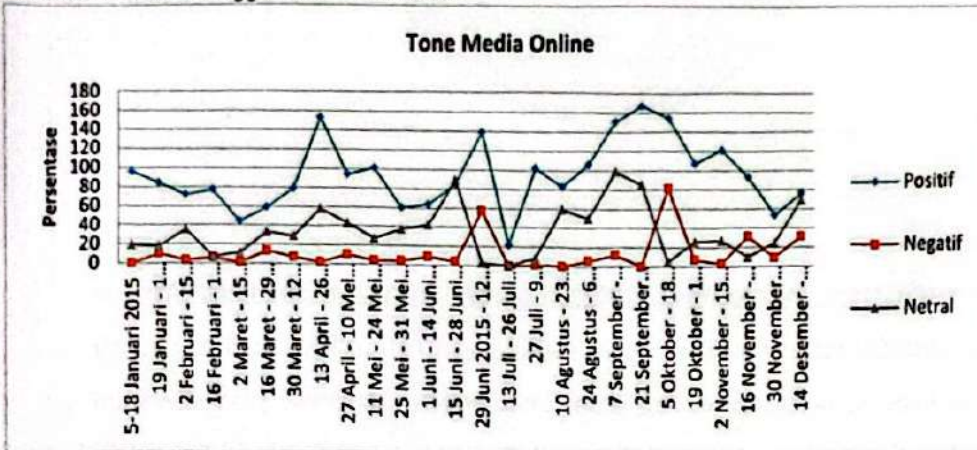
Klasifikasi rekomendasi analisis media

Tone	Rekomendasi	Tindakan	Indikator	
Negatif	Diketahui	-	Sebuah berita negatif perlu untuk diketahui ketika dianggap tidak memiliki urgensi terhadap kinerja DPRD.	
	Dicermati	-	Sebuah berita negatif perlu untuk dicermati ketika dianggap memiliki potensi untuk berkembang di media dan menyebabkan DPRD tidak dapat menjalankan tugas dengan efektif.	
	Ditindaklanjuti	<i>Press Release</i>		Sebuah berita negatif perlu untuk ditindaklanjuti ketika dianggap memiliki dampak negatif terhadap DPRD. Tindakan disesuaikan dengan tingkat signifikansi berita dan isu yang muncul.
		<i>Press Conference</i>		
<i>Blocking/Advertorial</i>				
Hak Jawab				
	Somasi			
Netral	Diketahui	-	Sebuah berita netral perlu untuk diketahui ketika dianggap tidak memiliki urgensi terhadap citra DPRD.	
	Dicermati	-	Sebuah berita netral perlu untuk dicermati ketika dianggap memiliki potensi untuk berkembang di media.	

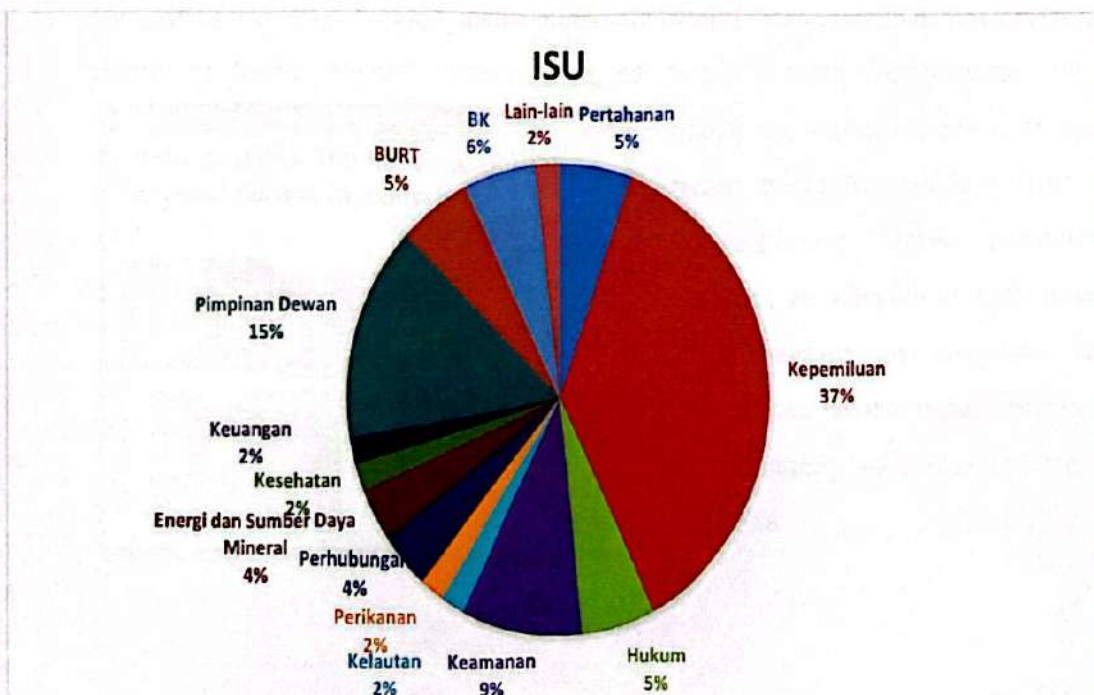
Tone Media Cetak hingga 23 Desember 2015



Tone Media Online hingga 23 Desember 2015



Contoh Sebaran Isu Media Mengenai DPR RI





c. Workshop dan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR

Untuk membuat analisis dan media rekomendasi yang berkualitas dibutuhkan tata bahasa Indonesia yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, maka dari itu diperlukan Pelatihan Bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR. Selain itu, workshop yang berkaitan dengan isu-isu yang sering dibahas di berbagai media massa dan menjadi perbincangan di masyarakat juga diperlukan. Media seringkali mempunyai agenda tersendiri dalam memberitakan tentang



sebuah isu, sehingga pemberitaan media terkait berita tertentu bisa diragukan keobjektifannya. Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan para peserta akan mendapatkan gambaran yang objektif dan holistik terkait dengan isu dan wacana yang berkembang di Indonesia.



Pelatihan Agenda Setting Mengenai Energi untuk Tim Kehumasan DPR by Prof. Adi Surjosatyo

Dalam menunjang kinerja tim Kehumasan DPR dalam menyusun analisis dan media rekomendasi yang berkualitas dibutuhkan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana media bekerja dan bagaimana relasi antara media dan politik. Sehingga dalam melakukan analisis *framing* dan isi terkait pemberitaan DPR di media bisa

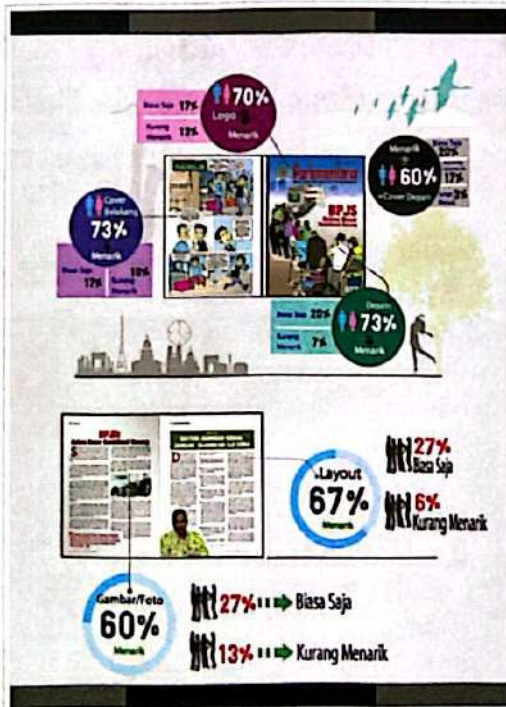
dilakukan secara maksimal. Media rekomendasi yang dihasilkan pun bisa secara tepat menjawab isu pemberitaan di media. Setelah melalui workshop dan pelatihan ini, Tim Kehumasan dituntut untuk dapat memahami relasi antara media dan politik, juga dapat memahami proses agenda setting media dari berbagai sudut pandang media.



Pelatihan untuk Tim Kehumasan DPR Mengenai Agenda Setting by Arief Suditomo

d. Majalah & Buletin Parlementaria

DPR RI memiliki majalah dan buletin *Parlementaria* sebagai sarana dalam mengomunikasikan kegiatan DPR kepada seluruh anggota dan publik. Majalah *Parlementaria* terbit satu bulan sekali. Isi berita dalam majalah *Parlementaria* bersifat spesifik mengenai kinerja AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Sedangkan buletin terbit satu minggu sekali. Buletin *Parlementaria* memuat konten kegiatan mingguan AKD. Majalah dan buletin didistribusikan kepada 560 anggota DPR, lembaga negara, kementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, LSM, kedutaan besar, kantor kecamatan, Bandara Soekarno Hatta Terminal 1 & 2 dan



Stasiun Kereta Api Gambir. Secara keseluruhan majalah dan buletin *Parlementaria* disebar ke 6.650 titik; 150 titik berada di luar negeri (KBRI dan Konsulat Jenderal) dan 6.500 titik di dalam negeri.

e. **TV Parlemen**

DPR RI saat ini telah memiliki TV Parlemen sebagai program untuk menginformasikan kegiatan dewan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI melalui televisi *streaming* yang ditayangkan melalui jaringan internet selama 24 jam. TV Parlemen adalah unit produksi televisi siaran terbatas di bawah Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI, diresmikan pada tanggal 8 Januari 2007 oleh Ketua DPR RI Agung Laksono.



TV Parlemen secara bertahap telah memulai kegiatan operasional berupa siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat-rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya, serta memproduksi program acara dialog/talkshow. Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan *livestreaming* melalui situs www.dpr.go.id dan www.mpr.go.id khusus untuk acara siaran langsung sidang MPR RI, juga jaringan televisi nasional yang *me-relay* siaran TV Parlemen. Pada awalnya, seluruh kegiatan disiarkan dengan media TV LCD (di lingkungan DPR), kemudian TV Parlemen memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan media televisi berlangganan *Berita SatuTV*, *First Media* dan *Big TV* di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa 28 Januari 2014.

f. **Meet the Press, Meet the DPR, dan Meet the Scholars**

Kegiatan ini merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Program ini menjadi forum pertemuan Pimpinan DPR RI dengan pimpinan redaksi media massa, pimpinan DPR Provinsi Se-Indonesia, dan *scholars*. Kegiatan ini bertujuan untuk



membangun komunikasi dan juga menjadi forum konsultasi publik untuk membahas berbagai isu yang sedang berkembang.

Hal penting dalam kegiatan ini adalah terjalannya komunikasi yang baik sehingga berbagai aspirasi yang dimiliki dan disampaikan oleh rakyat dapat diproses secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip parlemen modern.

g. Kunjungan Masyarakat



Kegiatan pendidikan politik bagi publik telah dilakukan oleh DPR RI, salah satunya melalui program Kunjungan Masyarakat. Dalam program ini publik dapat mengenal lebih jauh mengenai peran dan fungsi DPR. Kegiatan ini meliputi diskusi atau dialog secara langsung dengan Anggota Dewan/Setjen, pemutaran film, kunjungan museum, dan dapat hadir dalam rapat-rapat terbuka DPR RI.

Saat ini, publik yang ingin berkunjung dapat menghubungi Bagian Humas DPR RI untuk mengatur jadwal berkunjung dengan cara menelepon dan mengirimkan surat resmi. Kelak, publik dapat mengatur jadwal kunjungan mereka secara *online* (melalui *website*).

Museum dan Perpustakaan

Filosofi museum dan perpustakaan DPR RI adalah menjadi *state collective memories* (memori kolektif bangsa) dan *state collective knowledge* (pengetahuan kolektif bangsa). Hal ini penting untuk memelihara dan menjaga dengan baik dokumen-dokumen negara sehingga rekam jejak sejarah politik bangsa dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Museum dan Perpustakaan DPR RI bertujuan untuk menjadi simbol monumental yang membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional.





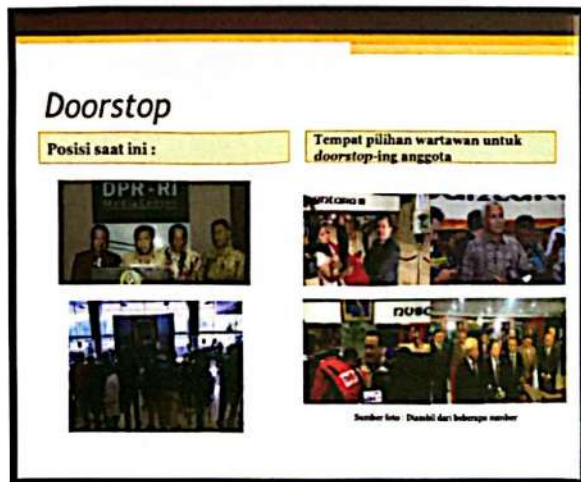
i. Doorstop



Dalam wawancara yang berlangsung di gedung DPR-RI, dilakukan dengan mencegat dan mengelilingi narasumber sangat sering dilakukan oleh para jurnalis. Padahal wawancara dengan metode tersebut sangat mengganggu pihak narasumber dan sangat mungkin menimbulkan opini-opini yang salah karena tanpa didukung data yang akurat.

Penyebabnya adalah ketidaksiapan narasumber dalam menghadapi wawancara mendadak. Berdasarkan pengalaman ini Tim Ahli Kehumasan DPR-RI mengusulkan membuat sebuah Doorstop sebagai sarana untuk mewawancarai Anggota Dewan sebagai narasumber.

Doorstop, merupakan sebuah istilah yang umum digunakan di kalangan pers merujuk kepada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mencegat narasumber. Istilah ini populer di kalangan pers di banyak negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya di negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bukan berarti Doorstop dilakukan dengan tanpa aturan. Aturan-aturan yang mengikat juga diberikan terutama pada pelaksanaannya di gedung-gedung pemerintahan. Selain itu Doorstop di negara-negara tersebut juga telah mulai difasilitasi dengan penempatan lokasi-lokasi tertentu untuk wawancara. Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.





Sarana Doorstop ditujukan untuk menjadi media bagi anggota dan pimpinan DPRD-RI serta mitra-mitra kerjanya untuk memberikan pernyataan pers dalam rangka memberi informasi-informasi untuk pemberitaan yang terkait. Doorstop juga ditujukan agar dapat menjadi tempat yang representatif dan kredibel bagi pernyataan-pernyataan tersebut. Terutama agar dapat menjadi ikon resmi yang melambangkan

pernyataan pers di DPR-RI agar semakin bersahabat dengan media massa dan masyarakat luas. Sarana Doorstop juga diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup bagi narasumber agar dapat nyaman dan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan pers.

Bagian C: Membangun DPRD Menjadi Parlemen Modern dan Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3), di setiap provinsi dan kabupaten kota di Indonesia memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Tugas dan fungsi DPRD, seperti yang tercantum dalam Pasal 314 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



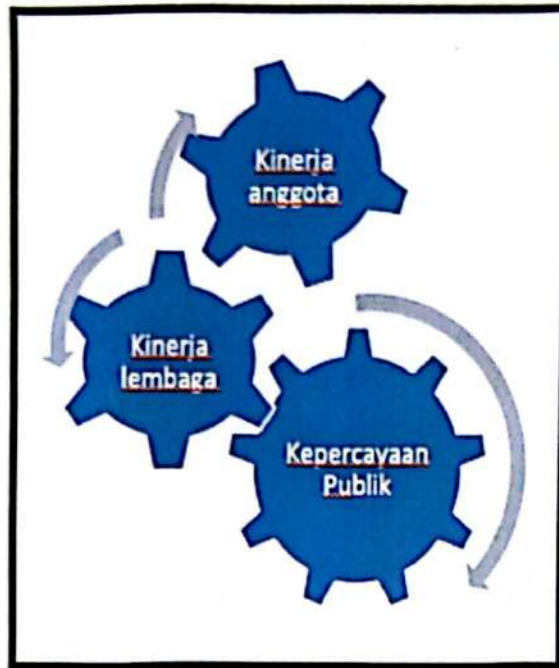
Perwakilan Rakyat Daerah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU MD3, meliputi fungsi: legislasi, anggaran dan, fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Fungsi ini merupakan fungsi yang identik seperti yang di emban oleh DPR RI, hanya

saja ruang lingkup kekuasaannya berbeda, yaitu pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan AKD lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Berdasarkan Pasal 237 UU MD3, jumlah Pimpinan DPRD disesuaikan dengan jumlah anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Daerah yang jumlah anggotanya sampai dengan 100 orang, Pimpinan DPRD akan terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Sementara itu, DPRD yang terdiri dari 45-84 anggota akan memiliki

satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua, dan DPRD yang memiliki anggota sebanyak 33-44 orang akan dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.

Sesuai dengan struktur dan tata laksana pada DPR RI, dalam struktur DPRD juga terdapat komisi-komisi yang menangani berbagai bidang. Pada pasal 239 UU MD3, mengatur bahwa jumlah komisi pada suatu DPRD disesuaikan dengan jumlah anggota DPRD. DPRD yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk empat komisi, yang pada umumnya terdiri dari: komisi pemerintahan, komisi perekonomian dan keuangan, komisi pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, DPRD yang beranggotakan lebih dari 55 orang,



dapat membentuk lima komisi, yang pada umumnya terdiri dari: komisi pemerintahan, komisi perekonomian, komisi keuangan, komisi pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat.

Untuk dapat mendorong DPRD dalam menjalankan tugasnya secara maksimal tentu DPRD perlu melakukan reformasi sistem lembaga perwakilan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan menjadi DPRD yang modern dan terbuka. Penggunaan teknologi informasi melalui website dan sosial media (facebook, twitter dan youtube) belum menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam data dibawah ini.

- ❖ Hanya 25 DPRD dari total 34 atau sebesar 73,5% yang memiliki website aktif (Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, NTB, Maluku, Malut.)
- ❖ Hanya 9 DPRD dari total 34 atau sebesar 26,5% yang memiliki akun Facebook Aktif. DPRD (Riau, Sumsel, Babel, Lampung, DKI, Jabar, Kaltim, Sultra, Maluku).
- ❖ Hanya 10 DPRD dari total 34 atau sebesar 29,4% yang memiliki akun Twitter Aktif (Riau, Babel, Lampung, DKI, Jabar, Kalbar, Kaltim, NTB, Sulsel, Sultra)
- ❖ Hanya 1 DPRD dari total 34 atau sebesar 2,9% yang memiliki channel youtube aktif (Bangka Belitung)

Data per 31 Januari 2016

Daftar Website dan Akun Sosial Media DPRD Se-Indonesia

No	Provinsi	Infrastruktur Website		Alamat Website dan Media Sosial						Ket
		Website	Status	Website	Facebook	Twitter	Youtube			
1	Provinsi Aceh	Ada	Aktif	www.DPRDa.acehprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
2	Provinsi Sumatera Utara	Ada	Aktif	http://DPRD-sumutprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
3	Provinsi Sumatera Barat	Ada	Aktif	http://www.DPRD-sumberprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
4	Provinsi Riau	Ada	Aktif	http://DPRD.riau.go.id/	https://www.facebook.com/HUMAS-DPRD-Provinsi-RIAU-532671810234651	https://twitter.com/DPRDDRIA	Tidak Ada	Tidak Ada		-
5	Provinsi Kepulauan Riau	Ada	Aktif	http://www.DPRD-kepriprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
6	Provinsi Sumatera Selatan	Ada	Aktif	http://DPRD-sumselprov.go.id/	https://www.facebook.com/DPRDDPRDovinsiSumateraSelatan	Tidak Ada	Tidak Ada			-
7	Provinsi Bangka Belitung	Ada	Aktif	http://DPRD-babelprov.go.id	https://www.facebook.com/DPRDdbabel	https://twitter.com/DPRDDdBabel	https://www.youtube.com/channel/UCTp3eFXQRTZn3LP5Olc6BmA			Socmed terintegrasi di dalam website
8	Provinsi Bengkulu	Ada	Aktif	http://DPRD.bengkuluprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
9	Provinsi Jambi	Ada	Aktif	http://DPRD-jambiprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-
10	Provinsi Lampung	Ada	Aktif	http://www.DPRD-lampungprov.go.id/	https://www.facebook.com/DPRD-Provinsi-Lampung-151231628265102	https://twitter.com/DPRDDdlampung	Tidak Ada	Tidak Ada		-
11	Provinsi Banten	Ada	Aktif	http://DPRD-bantenprov.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			-

	Provinsi DKI Jakarta	Ada	Aktif	http://www.DPRD-dki.jakartaprov.go.id	https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-DKI-Jakarta-900618620019758/	https://twitter.com/DPRDDdkjakarta	Tidak Ada	Socmed terintegrasi di dalam website
12	Provinsi DKI Jakarta	Ada	Aktif	http://www.DPRD-dki.jakartaprov.go.id	https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-DKI-Jakarta-900618620019758/	https://twitter.com/DPRDDdkjakarta	Tidak Ada	-
13	Provinsi Jawa Barat	Ada	Aktif	http://DPRD.jabarprov.go.id	https://www.facebook.com/DPRD-Jawa-Barat-69554153200/?fref=ts	https://twitter.com/humasDPRDd	Tidak Ada	-
14	Provinsi Jawa Tengah	Ada	Aktif	http://DPRD.jatengprov.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
15	Provinsi DI Yogyakarta	Ada	Aktif	http://www.DPRD-diy.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	Provinsi Jawa Timur	Ada	Aktif	http://DPRD.jatimprov.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Provinsi Kalimantan Barat	Ada	Aktif	http://DPRD-kalbarprov.go.id	Tidak Ada	https://twitter.com/DPRDDPRDovkb	Tidak Ada	-
18	Provinsi Kalimantan Selatan	Ada	Aktif	http://DPRD-kalselprov.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
19	Provinsi Kalimantan Tengah	Ada	Aktif	http://www.DPRD-kaltengprov.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
20	Provinsi Kalimantan Timur	Ada	Aktif	http://DPRD-kalitimprov.go.id/	https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Kalimantan-Timur-752775194788529/?fref=ts	https://twitter.com/DPRDDkaltim	Tidak Ada	-
21	Provinsi Kalimantan Utara	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
22	Provinsi Bali	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

24	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ada	Aktif	http://DPRD-ntbprov.go.id/	Tidak Ada	https://twitter.com/DPRD_NTB	Tidak Ada	-
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Ada	Aktif	http://www.DPRDdsulsel.go.id	Tidak Ada	https://twitter.com/DPRDdsulselprov	Tidak Ada	-
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	Ada	Aktif	http://www.DPRD-sultraprov.go.id/	https://www.facebook.com/pages/Sekretariat-DPRD-Prov-Sultra/509728935814804	https://twitter.com/DPRD_prov	Tidak Ada	-
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
28	Provinsi Sulawesi Barat	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
29	Provinsi Gorontalo	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
30	Provinsi Sulawesi Utara	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
31	Provinsi Maluku	Ada	Aktif	http://www.DPRD-malukuprov.go.id/	https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Maluku-269277183157465/	Tidak Ada	Tidak Ada	-
32	Provinsi Maluku Utara	Ada	Aktif	http://DPRDmalut.com	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
33	Provinsi Papua	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
34	Provinsi Papua Barat	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Daftar Website dan Akun Sosial Media Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Website		Alamat Website dan Media Sosial						Keterangan
		Website	Status	Website	Twitter	Facebook	Youtube			
1	Kota Semarang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ditautkan dengan website Pemkot Semarang
2	Kota Surakarta	Ada	Aktif	http://DPRD-surakartakota.go.id/	https://twitter.com/surakarta_DPRD	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.youtube.com/user/DPRDSDURAKARTA		-
3	Kota Salatiga	Ada	Aktif	http://DPRD-salatigakota.go.id/	https://twitter.com/DPRD_Salatiga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	Kota Tegal	Ada	Aktif	http://DPRD-tegalkota.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
5	Kota Magelang	Ada	Tidak Aktif	http://DPRD.magalangkota.go.id/	https://twitter.com/DPRD_kotamgl	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	twitter double account
6	Kota Pekalongan	Ada	Aktif	http://www.DPRD-pekalongankota.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.youtube.com/user/DPRDkabpekalongan		-
7	Kab. Semarang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
8	Kab. Banjarnegara	Ada	Aktif	http://DPRD.banjarnegarakab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
9	Kab. Banyumas	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.facebook.com/sekretariatDPRD.kabupatenbanyumas?fref=ts	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	fb: sekretariat
10	Kab. Batang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
11	Kab. Blora	Ada	Aktif	http://DPRD-blorakab.go.id/	https://twitter.com/DPRDBlorakab	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
12	Kab. Boyolali	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
13	Kab. Brebes	Ada	Aktif	http://www.DPRD-brebeskab.go.id/	Tidak Ada	https://www.facebook.com/setwan.brebes?fref=ts	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	fb: sekretariat
14	Kab. Cilacap	Tidak Ada	Tidak aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

15	Kab. Demak	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	Kab. Grobogan	Ada	Aktif	http://DPRD.grobogan.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Kab. Jepara	Ada	Aktif	http://DPRD.jeparakab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.facebook.com/DPRD.kabupatenjepara?fref=ts	Tidak Ada	-
18	Kab. Karanganyar	Ada	Aktif	http://www.karanganyarkab.go.id/tag/DPRD/	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.facebook.com/profile.php?id=100009558173235&fref=ts	Tidak Ada	-
19	Kab. Kendal	Ada	Aktif	http://www.DPRDkendal.com	https://twitter.com/GemaDPRD	https://www.facebook.com/gemaDPRD.kdi?fref=ts	https://www.facebook.com/gemaDPRD.kdi?fref=ts	Tidak Ada	FB dan twitter humas gema kendal
20	Kab. Kebumen	Ada	Aktif	http://DPRD-kebumenkab.go.id/	https://twitter.com/DPRDDKbm	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	FB closed group
21	Kab. Klaten	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
22	Kab. Kudus	Ada	Aktif	http://DPRD.kuduskab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
23	Kab. Magelang	Ada	Aktif	http://DPRD-magelangkab.go.id/	https://twitter.com/DPRDKabMagelang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
24	Kab. Pati	Ada	Tidak Aktif	http://DPRD-patikab.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
25	Kab. Pekalongan	Ada	Aktif	http://DPRD-pekalongankab.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.youtube.com/user/DPRDKabpekalongan	-
26	Kab. Pematang	Ada	Aktif	http://www.DPRD-pematangkab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
27	Kab. Purbalingga	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	https://twitter.com/DPRDPurbalingga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
28	Kab. Purworejo	Ada	Aktif	http://purworejokab.go.id	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
29	Kab. Rembang	Ada	Aktif	http://setDPRD.rembangkab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
30	Kab. Sragen	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.facebook.com	https://www.facebook.com	Tidak Ada	FB public group

31	Kab. Sukoharjo	Ada	Aktif	http://setDPRDd.sukoharjokab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	book.com/groups/DPRDdragen/	Tidak Ada	Tidak Ada	.
32	Kab. Tegal	Ada	Aktif	http://DPRD-tegalkab.go.id/	Tidak Ada	Tidak Ada	https://www.facebook.com/DPRD.kabupatentegal?ref=ts	Tidak Ada	Tidak Ada	.
33	Kab. Temanggung	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	.
34	Kab. Wonogiri	Ada	Aktif	http://www.DPRD-wonogirikab.go.id/	https://twitter.com/DPRD_wonogiri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	.
35	Kab. Wonosobo	Ada	Aktif	http://www.DPRD-wonosobo.net/	https://twitter.com/DPRDdwonosobo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	.

Konteks Sosial-Politik-Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dari jumlah tersebut Provinsi Jawa Tengah memiliki 573 kecamatan, 8.578 desa dengan jumlah penduduk mencapai 33,5 juta jiwa atau sekitar 13,29% dari total populasi Indonesia (BPS: 2015). Kondisi tersebut menyebabkan Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara demografi, penduduk di Provinsi Jawa Tengah tidak menyebar secara merata, penduduk masih terkonsentrasi di daerah-daerah kota. Kota Surakarta menjadi daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai 11 ribu jiwa per kilometer persegi (BPS:2015). Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan sinergi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani jarak antara wilayah kota dan desa.

Secara ekonomi mayoritas penduduk Jawa Tengah memiliki mata pencaharian sebagai buruh/karyawan sebesar 31,83%, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 17,55 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai angka 70,72% pada tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 6,02%. Sementara itu, sektor pertanian menyerap sekitar 30,86% pekerja dan merupakan sektor terbanyak dalam menyerap pekerja karena tidak membutuhkan kemampuan khusus (BPS:2015).

Jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2014 yang lalu mencapai 27,1 juta pemilih yang menghasilkan konfigurasi delapan fraksi pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang memiliki 27 dari 99 total kursi di DPRD Jawa Tengah, dan partai politik dengan kursi paling sedikit adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan jumlah 4 kursi.

Dalam konteks sosial-politik-ekonomi ada beberapa latar belakang yang penting diketahui untuk memahami kondisi Jawa Tengah secara umum, salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai indeks komposit, IPM memiliki empat indikator utama: tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup, harapan lama sekolah, dan tingkat konsumsi per kapita. Merujuk pada data yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, nilai IPM dari tahun 2010-2013 selalu menunjukkan tren positif. Data IPM pada tahun 2013, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan angka 74,05 yang berarti bahwa Jawa Tengah masih tergolong pada kategori sedang/menengah menurut klasifikasi IPM oleh UNDP.

Sebagai perbandingan, tabel dibawah ini akan memaparkan nilai IPM beberapa provinsi lain di pulau Jawa pada tahun 2013:

Perbandingan Nilai IPM Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Nilai IPM	Keterangan
DKI Jakarta	78,59	Menengah
Jawa Tengah	74,05	Menengah
Jawa Barat	73,58	Menengah
Jawa Timur	73,54	Menengah
Daerah Istimewa Yogyakarta	77,37	Menengah
Banten	71,90	Menengah

Sumber: *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Februari 2015, BPS*

Mengacu kepada tabel diatas nilai IPM yang dimiliki oleh Jawa Tengah cenderung masih komptetitif dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Jawa. IPM memang tidak bisa menjadi rujukan tunggal dalam melihat pembangunan manusia secara komprehensif pada sebuah daerah, tetapi setidaknya melalui IPM kita bisa mengetahui kondisi umum tentang kondisi penduduk dan kesejahteraannya di daerah tersebut.

Perkembangan teknologi informasi memaksa para pemangku kepentingan untuk dapat menghasilkan kebijakan yang mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi. Jawa Tengah menurut BPS (2015) sebanyak 15,37% rumah tangga memiliki akses terhadap komputer/laptop, dan persentase pengguna telepon seluler mencapai 84,07% dari total rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Namun, jumlah tersebut belum bisa dijadikan acuan atas perkembangan teknologi informasi, karena ada aspek seperti tingkat penetrasi internet atau jumlah pengguna dan pelanggan jasa internet yang tidak dapat digambarkan secara spesifik melalui data-data yang dirilis oleh BPS.

Parlemen Modern dan Terbuka memiliki tiga indikator utama dalam implementasinya, yaitu; keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi representasi. Transformasi menuju Parlemen yang modern dan terbuka membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk dukungan infrastruktur. Mengacu pada data pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum untuk memulai proses transisi menuju Parlemen Modern dan Terbuka.

Proses tersebut akan semakin diperkuat dengan dukungan dari kelompok penduduk usia muda dan produktif (15-30 tahun) yang mayoritas dari mereka merupakan pengguna aktif dari berbagai layanan teknologi informasi, termasuk di dalamnya pengguna media sosial seperti *Twitter*, *Facebook* dan *Youtube*. Dalam data piramida penduduk Jawa Tengah, komposisi jumlah penduduk tersebut mencapai angka 10,2 juta jiwa atau sekitar 30,4% dari total populasi (BPS:2015). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam optimalisasi penggunaan teknologi informasi terutama dalam proses pelibatan masyarakat dalam pembentukan dan perumusan kebijakan, serta dalam sosialisasi kebijakan. Kecenderungan generasi muda untuk terlibat aktif dalam penggunaan berbagai sarana teknologi informasi dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi tersebut.

Salah satu indikator yang dapat merefleksikan sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam proses perumusan kebijakan adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum. Merujuk kepada data yang dirilis oleh KPU, pada Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Jawa Tengah memiliki 27,1 juta pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,89%. Jumlah tersebut hampir mendekati rerata partisipasi pemilih nasional sebesar 75,11%. Angka tersebut menunjukan bahwa terdapat potensi yang besar untuk semakin memperpendek jarak antara rakyat dengan negara, mengingat sudah terbentuk pemahaman dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik yang terjadi. Tantangan yang harus dihadapi oleh pengambil kebijakan adalah bagaimana menjaga modal partisipasi yang telah dimiliki ini.

Menuju DPRD Modern dan Terbuka

Untuk menuju DPRD yang modern dan terbuka diperlukan dokumen rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan kerja. Paling tidak ada empat target hasil kinerja yang hendak dicapai. Keempat target tersebut adalah:

1. Terwujudnya pemberitaan yang berimbang dan terpercaya mengenai DPRD
2. Meningkatnya pemahaman publik mengenai peran DPRD
3. Memperbanyak kunjungan konstitusional dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap DPRD
4. Investasi Demokrasi bagi Indonesia

Untuk dapat mencapai visi dan misinya, DPRD dihadapkan pada dua tantangan utama yang membutuhkan langkah taktis dan strategis dalam menyelesaikannya. Di satu sisi, DPRD harus terus membangun kepercayaan publik, namun di sisi yang lain sebagai lembaga negara harus berkontribusi secara aktif bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan serta penguatan kelembagaan

dalam kerangka konstitusional dan membangun kesadaran publik melalui investasi demokrasi jangka panjang. Dalam hal ini, tentu perlu dirumuskan target taktis dan target secara strategis. Setelah merumuskan masing-masing program yang akan mendorong kedua target tersebut, langkah selanjutnya dilaksanakan lewat penentuan target melalui *output* dan *outcome*. Bentuk hasil pelaksanaan dari masing-masing program tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, berimbangya informasi mengenai DPRD dan dokumen kajian strategis.

Target taktis lebih ditujukan kepada bagaimana membentuk pemahaman masyarakat yang berimbang mengenai DPRD dan sebagai indikator penilaiannya digunakan metode media analisis. Sedangkan untuk target strategis yang hendak dicapai adalah dokumen kajian dan strategis dan implementasinya. Target taktis digunakan sebagai langkah untuk menyeimbangkan secara aktual dan cepat setiap berita yang berpotensi memberikan implikasi negatif terhadap kelembagaan DPRD. Target strategis untuk membangun kesadaran dalam jangka panjang secara menyeluruh.

Alasan dari penggunaan kedua bentuk hasil pelaksanaan ini didasari oleh pembagian target berdasarkan jangka waktu. Target pertama dirancang sebagai target jangka pendek, sedangkan target berikutnya lebih diarahkan menjadi program jangka panjang. Oleh karenanya, target strategis membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Sehingga dokumen kajian dan implementasinya merupakan persiapan dan *roadmap* yang akan membantu semakin terarahnya visi dan misi DPRD.

Program-program kerja membangun DPRD modern dan terbuka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan yang terkait:

1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi



Sebagai sebuah parlemen yang modern, DPRD harus dapat membuka akses yang luas bagi masyarakat, sehingga rakyat dapat mengenal wakil rakyatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka layanan pengaduan masyarakat

Source: <http://pengaduan.dpr.go.id/>

baik secara konvensional (surat, telp, fax, unjuk rasa, delegasi masyarakat, dll), ataupun

menggunakan teknologi informasi untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, DPRD memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tur parlemen, Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja, dan lain-lain.



Untuk kasus DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kolom 'Tautan Penting' dalam website DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya terdapat direktori khusus Aspirasi Masyarakat yang tersambung ke alamat: <http://aspirasi-masyarakat.dprd.jatengprov.go.id>. Namun belum terdapat kontak yang dapat dihubungi, baik dalam bentuk alamat e-mail, nomor telepon, maupun alamat surat. Oleh karena itu aspirasi masyarakat belum dapat diserap secara digital dan ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan kinerja dewan lainnya. Untuk itu direkomendasikan agar segera mencantumkan kontak DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Agar dapat bekerja secara optimal, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPRD perlu membangun sarana yang dapat meningkatkan partisipasi publik. Infrastruktur tersebut dapat berupa Perpustakaan dan Museum. Melalui dua sarana ini, masyarakat dapat mempelajari mengenai sejarah DPRD serta peran, fungsi dan tugas DPRD. Keberadaan Museum dan Perpustakaan DPRD juga merupakan bagian memori kolektif bangsa (*state collective memory*) dan pengetahuan kolektif bangsa (*state collective knowledge*). Dengan adanya museum ataupun perpustakaan, masyarakat diharapkan merasa lebih dekat dengan DPRD yang merupakan wakil mereka yang akan menentukan peraturan-peraturan di daerah mereka.

Jika kita melihat Website DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat arsip-arsip yang terdiri dari berbagai kategori buku dan produk hukum (bersifat nasional) yang disimpan dalam Tautan Penting di direktori E-Library DPRD Jawa Tengah (<http://elibrary.dprd.jatengprov.go.id>) dengan tampak sebagai berikut.

The screenshot shows the e-Library DPRD Jawa Tengah website. At the top, there is a header with the logo and the text 'e-Library DPRD Jawa Tengah' and 'Jelajah Dunia dengan Membaca'. Below the header is a navigation bar with 'Beranda', 'Tentang Kami', and 'Lainnya'. A search bar is located on the right side of the navigation bar. The main content area features a large banner image of a hand holding a tablet, with the text 'DPRD Jateng Launching E-Library'. Below the banner, there are several sections: 'Kategori' (Categories) with a list of categories like 'Agama (2)', 'Geografi (3)', 'Keputusan Presiden (22)', 'Kesehatan (2)', 'Peraturan Daerah (37)', 'Peraturan Gubernur (8)', 'Peraturan Pemerintah (83)', 'Peraturan Presiden (70)', and 'Perundang-undangan (7)'; 'Top Kategori' (Top Categories) with 'Geografi' as the top category and a description of 'Benda Cagar Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus'; 'Buku Terbaru' (New Books) with a list of books including 'Pergub No. 1 Th 2015', 'PANDUAN PRAKTIS ADMINISTRASI KLIAM FASKES BPJS KESEHATAN', 'LIST OF PLANNED PRIORITY EXTERNAL LOANS 2014', 'jurnal politik', 'PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2015', 'PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015', 'PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 2015', 'PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 2015', 'PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2015', and 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015'; and 'Buku Terpilih' (Selected Books) with a list of books including 'Benda Cagar Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus' and 'Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah'.

Selain itu kerja-kerja yang terkait dengan meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi diantaranya: [1] menyusun *Agenda Setting* yang menabuh genderangnya sendiri; [2] membangun "Kantor" Berita DPRD: *from news room to news-resource center*; [3] melakukan Media Analisis (Cetak, TV, *Online*) yang teratur; [4] menjalin hubungan kerja sama dengan insan media melalui kegiatan *meet the press* secara rutin.

Juga perlu dilakukan *Meet the DPRD Kab/Kota*, dan *meet the university scholars*; [5] dukungan perlu ditingkatkan dengan lebih banyak menerima kunjungan publik ke DPRD, baik untuk menghadiri sidang-sidang dewan, kunjungan museum, perpustakaan, dan lain-lain. Perlu dipertimbangkan juga untuk lebih mengoptimalkan: penggunaan fasilitas perpustakaan DPRD dengan memfokuskan koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan produk DPRD. Dalam upaya menjangkau pengguna perpustakaan yang lebih luas, maka fasilitas pendukung tersebut harus ditingkatkan melalui: a) pembangunan infrastruktur; b) pengembangan koleksi perpustakaan yang terkait dengan kinerja DPRD; c) peningkatan sistem *digital library*; d) peningkatan sistem dengan membangun *virtual DPRD tour* yang terintegrasi dengan *website* DPRD.

2. Teknologi dan Informasi

Di era digital ini, sudah merupakan suatu keniscayaan bagi lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD untuk memiliki *website* yang dapat menyampaikan informasi terkait dengan hasil kerja DPRD. Hasil kerja DPRD, baik yang berupa Peraturan Daerah, risalah rapat, rekam jejak anggota dewan (*hansard*) dan rekam jejak lembaga dewan (*bill digest*), dapat ditampilkan dalam *website*. Selain *website*, media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *youtube* menjadi penting peranannya, terutama terkait dengan menyampaikan informasi resmi seputar kinerja DPRD. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat.

Keberadaan *website* dan media sosial juga menjadi salah satu penunjang keterbukaan informasi DPRD. Dengan adanya sarana-sarana ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan akan kinerja DPRD. *Website* dan media sosial juga harus dimiliki oleh para anggota DPRD secara pribadi. Hal ini dikarenakan, *website* dan media sosial mempermudah para anggota DPRD untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Kerja-kerja yang terkait dengan teknologi informasi digital, di antaranya: [1] mengoptimalkan pengelolaan *website* yang mudah diakses serta menyediakan informasi terkini dan membuka

ruang bagi interaksi virtual antara DPRD dengan publik; [2] untuk menjangkau pengguna *website* yang lebih luas dan menjadikan fasilitas tersebut lebih bermanfaat untuk publik, maka perlu dibangun *website* yang dwi bahasa (*bilingual*); [3] mengoptimalkan penggunaan *social media* (*twitter, facebook, Youtube*) dan sosialisasinya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menyelenggarakan Kopi Darat *Blogger Meeting #KenalDPRD, Website, Youtube-PSA* (*Filler; Short Film*); [4] mengoptimalkan penggunaan portal internal (*intranet*) DPRD sebagai sarana komunikasi dan koordinasi baik antara Pimpinan dengan Anggota Dewan dari semua fraksi, antara Pimpinan/Anggota dengan Setwan/Sekwan, juga antara para Anggota Dewan dari semua fraksi, antara Setwan dan semua staf pendukung.

Penting bagi DPRD untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan parlemen modern. Teknologi informasi akan memudahkan dan memperkuat peningkatan kinerja anggota Dewan. Sementara itu masyarakat, menjadi mudah dan cepat dalam mengakses informasi yang diproduksi oleh DPRD. DPRD saat ini penting untuk membangun perangkat dan infrastruktur yang berbasis teknologi dan informasi digital. Beberapa program kegiatan yang perlu diperhatikan antara lain:

Website. Merupakan salah satu instrumen teknologi informasi yang memuat informasi dan berita. Sebagai lembaga negara perwakilan rakyat, DPRD RI membutuhkan portal informasi dan berita agar publik dapat memperoleh informasi tentang proses dan hasil kinerja dewan. Melalui *website*, publik semakin mudah untuk mengawasi kinerja DPRD RI. Di dalam *website*, publik dapat mengakses profil anggota dewan, agenda rapat DPRD RI, risalah rapat (*hansard*), maupun proses pembuatan undang-undang/Peraturan Daerah (*BillDigest*).

No	Judul	Tanggal
1	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
2	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
3	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
4	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
5	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
6	Rapat Bekerja Anggota DPRD Prov. Jateng dengan SAPD Prov. Jateng	09-11-2015
7	Rapat Bekerja Masyarakat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bermanah	04-11-2015
8	Rapat Bekerja Masyarakat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bermanah	04-11-2015
9	Rapat Bekerja Masyarakat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bermanah	04-11-2015
10	Rapat Bekerja Masyarakat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bermanah	04-11-2015

Dalam kolom informasi pada halaman pertama website DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa kita lihat jadwal yang terdiri dari judul agenda serta tanggal.

<http://dprd.jatengprov.go.id/>



Dalam halaman website DPR RI sebagaimana tampilan disamping ada berbagai direktori laman yang mempermudah pengunjung untuk berselancar.

<http://www.dpr.go.id/>

Media Sosial (twitter,

facebook, dan youtube). Media Sosial merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara *online*. Untuk sebuah lembaga atau badan usaha, kehadiran media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan berita secara cepat dan efektif ke publik. Selain itu, melalui media sosial lembaga DPRD dapat menjangkau aspirasi masyarakat, ataupun membentuk *agenda setting*.



Bila melihat website DPRD Jawa Tengah, belum ada hubungan dengan laman Facebook DPRD Jawa Tengah. Sementara untuk akun twitter website DPRD Jawa Tengah telah terhubung langsung dengan akun

@setwanjateng (Sekretariat DPRD Jawa Tengah). Di dalam bio twitter tersebut baru tercantum kontak yang dapat dihubungi, terdiri dari nomor telepon ponsel dengan alamat kantor Jl. Pahlawan No. 7 Semarang. Jumlah pengikut dari akun tersebut adalah 342 akun dengan tweet terakhir pada tanggal 21 Desember 2015. Sementara untuk jejaring YouTube website DPRD Jawa Tengah belum terhubung dengan laman YouTube DPRD Jawa Tengah.



Media Sosial DPR RI (dari kiri ke kanan): Fan Page Facebook DPRD RI, Twitter DPRD RI, Channel Youtube DPRD RI

Video PSA (Public Service Announcement) dan Infografis. Video dan infografis merupakan produk dari teknologi informasi yang ditujukan kepada publik dan bersifat kreatif, imajinatif, serta komunikatif. Video PSA dan Infografis dilakukan dalam kegiatan *online* dan *offline*.



Keduanya disebarakan melalui website dan media sosial resmi DPRD untuk kegiatan *online*.



Sedangkan untuk kegiatan *offline* dapat disebarakan kepada publik melalui kunjungan ke DPR ataupun dalam acara-acara tertentu. Dalam kolom informasi pada halaman pertama website DPRD Provinsi Jawa Tengah, telah ada berita yang dapat diakses oleh publik. Jenis

berita adalah berita kunjungan kerja yang meliputi tiga kunjungan kerja pada tanggal 03-11-2015 dan 01-10-2015.

Sementara dalam kolom Tautan Penting di direktori Warta Legislatif DPRD Jawa Tengah, meskipun akan merujuk ke halaman yang lain yakni <http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/> namun dalam laman tersebut memuat berita mengenai DPRD Jawa Tengah yang bersifat aktual dan spesifik dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Berbagai informasi, agenda dan kegiatan kedewanan ini tentu akan lebih menarik jika disajikan dengan lebih kreatif dan informatif melalui Video PSA dan Infografis. Sehingga para penonton/pembaca menjadi lebih tertarik melihat informasi/berita yang hendak disampaikan.



Kopi Darat. Sering kali ketika kita mendengar kata teknologi informasi kita akan terpusat pada kegiatan-kegiatan *online*. Namun, kegiatan *offline* juga penting dilakukan untuk dapat menunjang kegiatan-kegiatan *online* tersebut. Karena itu,



sangat penting untuk dapat membangun jaringan kerja di dunia maya. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media DPRD dan memberikan kesempatan bagi publik untuk dapat bertemu langsung dan mengklarifikasikan beberapa informasi yang belum jelas bagi mereka. Selain itu, komunitas *Blogger* dan *netizen* memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang bersifat lebih personal bagi pembacanya. Cara mereka berkomunikasi melalui tulisan kadang dapat membentuk pola berpikir dari pembacanya. Hal ini dilakukan untuk dapat membangun citra positif DPRD sesuai dengan apa yang telah dicapai. Salah satu program membangun jaringan dunia maya dapat dilakukan melalui program *Kopi Darat*.

3. Fungsi Representasi

DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD wajib melaksanakan fungsi representasi dengan baik, dan itu merupakan salah satu indikasi parlemen modern. Fungsi representasi antara lain ditandai oleh kemampuan anggota DPRD dalam menyerap, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, anggota DPRD akan semakin dekat dengan rakyat dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dua program penting untuk melaksanakan fungsi representasi, yaitu: Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) dan Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*).

Kerja yang terkait dengan fungsi representasi dewan, diantaranya: [1] membangun sistem Rekam Jejak Lembaga Dewan (*Bill Digest*) yang digunakan untuk lebih membuka ruang peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi baik dukungan maupun tuntutan. Sistem

Hansard

• *Hansard is the official record of the proceedings of the Parliament. It is not a strictly verbatim record, but rather a verified and accurate record. Repetitions and redundancies may be omitted and obvious mistakes corrected. Interjections not responded to by the principal speaker are omitted. Hansard has no editorial policy other than the pursuit of accuracy and consistency.*

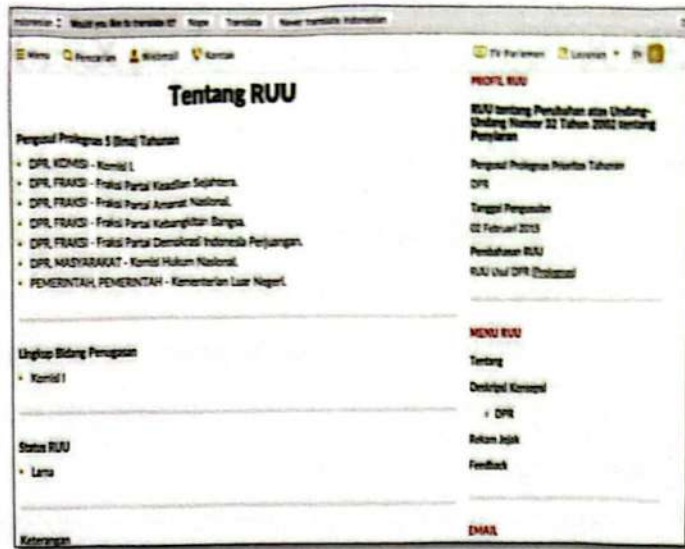
• *Sumber: FACT SHEET 19: RECORDS OF THE HOUSE, Parliament NSW, Australia. p.4*

Rekam Jejak Lembaga Dewan (*Bill Digest*) akan diintegrasikan dengan *website*; dan [2] membangun sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) yang digunakan untuk menginformasikan opini dan posisi politik Anggota Dewan terhadap isu-isu tertentu. Sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) akan diintegrasikan dengan *website*. Dalam skala yang

paling minimal terdapat risalah rapat dan hasil-hasil rapat dan diunggah ke dalam website DPRD.

Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*)

Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) merupakan program kegiatan digitalisasi proses pembentukan undang-undang di DPRD RI yang dipublikasikan melalui website resmi DPRD RI (www.DPR.go.id). Melalui *Bill Digest*, publik dapat mengikuti proses pembentukan undang-undang. *Bill Digest* memiliki kelebihan, antara lain memberi



ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang secara *online*. Publik dapat menyampaikan aspirasi, rekomendasi, dan kritik terhadap substansi dari undang-undang yang sedang dibahas pada setiap tahapan proses penyusunannya.



Proses Penyusunan *Bill Digest*

Sumber: Humas DPR RI

Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*)

Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) merupakan transkrip digital aktivitas rapat dan persidangan Anggota Dewan. *Hansard* adalah bukti proses rapat dan sidang di DPRD RI. Melalui

#	TANGGAL	JUDUL	TAHUN SIDANG	MASA SIDANG	RAPAT KE
1	01-07-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-35, 1 Juli 2015	2014-2015	IV	35
2	25-06-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-34, 25 Juni 2015	2014-2015	IV	34
3	23-06-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-33, 23 Juni 2015	2014-2015	IV	33
4	28-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 31, 28 Mei 2015	2014-2015	IV	31
5	26-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 30, 26 Mei 2015	2014-2015	IV	30
6	20-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 29, 20 Mei 2015	2014-2015	IV	29

On the right side of the screenshot, there is a list of topics: **Tentang**, **Sekretariat**, **Kontak**, **Jadwal Rapat**, **Risalah Rapat**, **Naskah Pidato**, **Laporan Pansus/Tim/Parja**, **Pokok-pokok Pembicaraan**, **Laporan Aspirasi Dapil**, **Laporan AKD**, **RUU yang Disahkan**, and **Pandangan/Pendapat/Keterangan/Sambutan**.

Hansard, publik dapat mengetahui kinerja setiap Anggota Dewan.

Contoh *Risalah Rapat* dalam website www.DPR.go.id

Aksesibilitas publik terhadap fungsi kedewanan merupakan sebuah hal yang dapat memengaruhi citra dewan di mata publik. Namun memang masih sedikit fungsi kedewanan yang dimunculkan dalam website DPRD Provinsi Jawa Tengah ini, berikut merupakan penjelasan lebih lanjut hasil penelusuran Tim CEPP FISIP UI:

a. Fungsi Legislasi

Belum ada konten website yang memperlihatkan sejauh mana kinerja legislasi dari DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga. Misalnya peraturan daerah apa yang telah atau sedang melalui proses perumusan, maupun produk legislasi lainnya yang khusus hasil kinerja DPRD Jawa Tengah.

b. Fungsi Anggaran

Belum ada konten website yang memperlihatkan kinerja DPRD Jawa Tengah dalam segi anggaran.

c. Fungsi Pengawasan

Kinerja kedewanan dalam hal pengawasan dapat terlihat dari kegiatan Kunjungan Kerja yang terdapat dalam galeri foto sertadirektori Warta Legislatif DPRD Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa website ini telah terhubung dengan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses melalui direktori Tautan Penting.

Berdasarkan UU MD3, anggota DPRD berasal dari partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana di mana rakyat dapat mengawasi sekaligus memastikan para wakil rakyat yang mereka pilih dapat bekerja dalam rangka. Sarana yang dimaksud dapat berupa Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) dan Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*), menjadi dua program yang penting dalam melaksanakan fungsi ini.

Bill Digest merupakan program kegiatan digitalisasi proses pembuatan Peraturan Daerah (*Perda*) yang kemudian dapat dipublikasikan melalui *website* resmi DPRD. Selain mengetahui proses pembentukan *Perda*, melalui *Bill Digest* juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi substansi *Perda* yang sedang dibahas. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Perda*, diharapkan menjadikan *Perda* yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Selanjutnya, rekam jejak anggota dewan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hansard*, merupakan transkrip digital akan aktivitas rapat para anggota DPRD. Melalui *Hansard*, publik

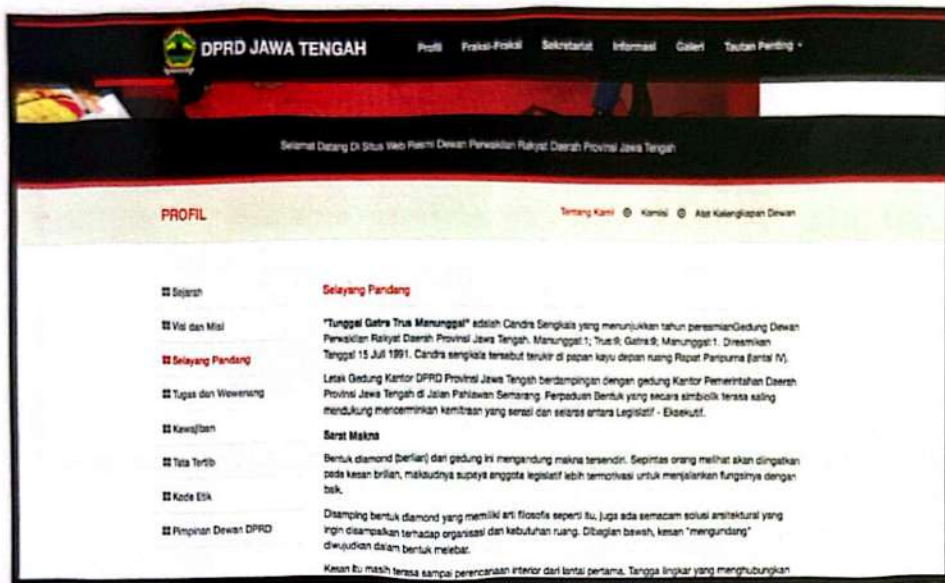
dapat mengetahui kinerja Anggota DPRD. Prinsip parlemen modern yang mengedepankan aksesibilitas dan transparansi, akan memudahkan kinerja baik anggota DPRD maupun masyarakat yang ingin memberikan pengaduan. Komunikasi antara rakyat dan wakilnya dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dibutuhkan oleh DPRD untuk dapat bekerja sebagai wakil rakyat. Keberadaan *hansard* dan *bill digest* juga merupakan bentuk transparansi demi akuntabilitas lembaga atau wakil rakyat.

Beberapa Informasi Umum yang bisa ditemui dalam website DPRD Prov Jawa Tengah

<http://dprd.jatengahprov.go.id/>

Sejarah/Selayang Pandang

Informasi umum yang terdiri dari sejarah dan selayangng pandang telah dicantumkan secara singkat dan padat pada halaman pertama web.



Profil Anggota

Walaupun belum terdapat profil anggota yang memperlihatkan rekam jejak anggota DPRD Jawa Tengah kepada publik, namun informasi berupa foto, nama anggota, pendidikan terakhir, beserta dengan Fraksi dan posisi di dalam Alat Kelengkapan Dewan telah tersedia.



Fraksi

Telah terdapat kolom fraksi yang mencantumkan anggota masing-masing partai politik di dalam DPRD Jawa Tengah. Di dalam kolom fraksi inilah profil anggota dewan dapat diakses yang berisikan nama anggota, foto, dan pendidikan terakhir.



Komisi

Telah terdapat kolom komisi yang mencantumkan deskripsi dari komisi tersebut beserta dengan anggota masing-masing komisi. Hal ini dapat mempermudah publik untuk mengetahui komisi yang membawahi bidang-bidang yang menjadi *concern* publik.



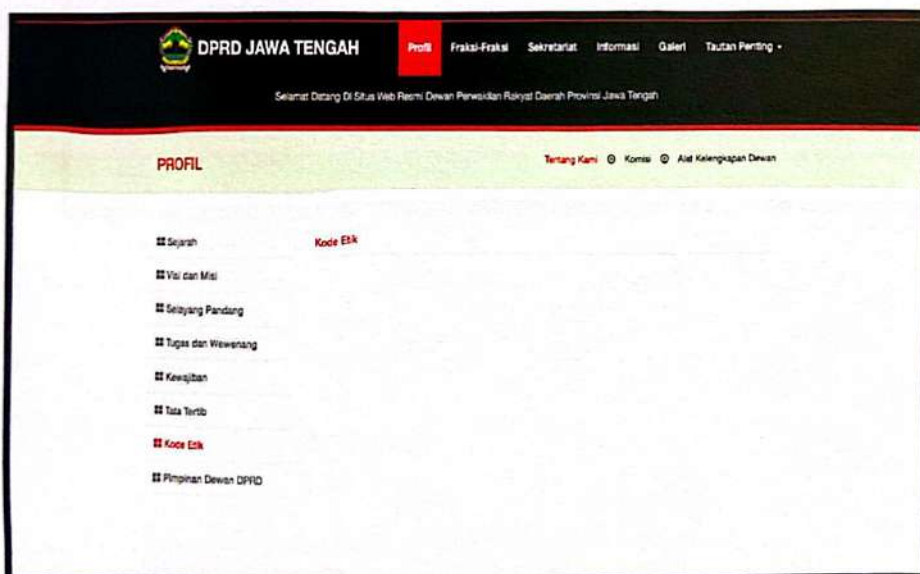
Sekretaris Jenderal

Dalam kolom Sekretariat, telah tercantum lengkap dari mulai visi dan misi hingga tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam Sekretariat Jenderal. Kesemua direktori yang terdiri dari (1) Bagian Umum, (2) Bagian Humas, (3) Bagian Keuangan, (4) Perundang-undangan, (5) Tugas Sekretariat, (6) Visi dan Misi, serta (7) Struktur Organisasi telah dilengkapi oleh deskripsi dan substansi yang dapat membuat publik memahami posisi serta fungsi Setjen dalam DPRD Jawa Tengah.



Kode Etik

Kolom bagi Kode Etik telah tersedia dalam laman pertama web ini, namun belum memiliki substansi yang dapat diakses oleh publik. Berikut merupakan tampak dari kolom Kode Etik.



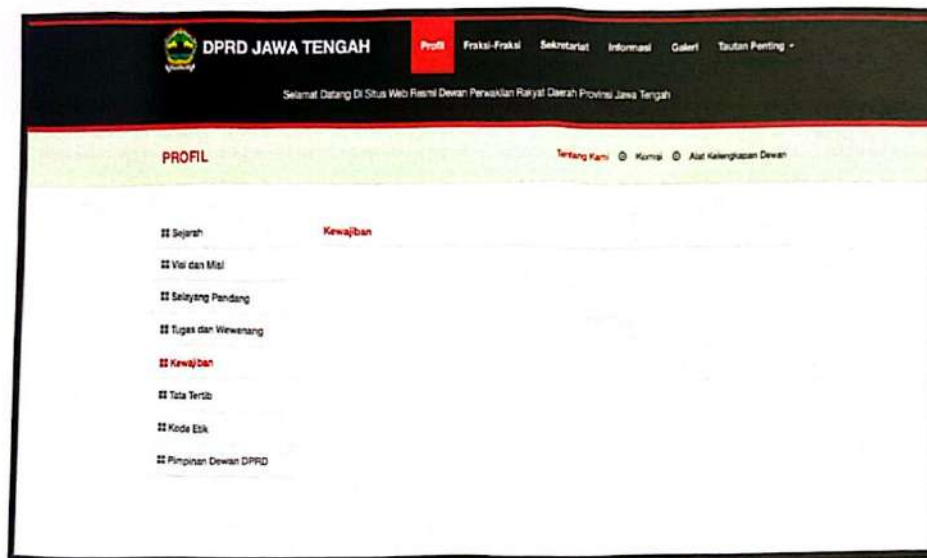
Tata Tertib

Sama halnya seperti Kode Etik, kolom Tata Tertib telah tersedia dalam laman pertama website ini tetapi belum diisi oleh substansi. Berikut merupakan tampak dari kolom Tata Tertib.



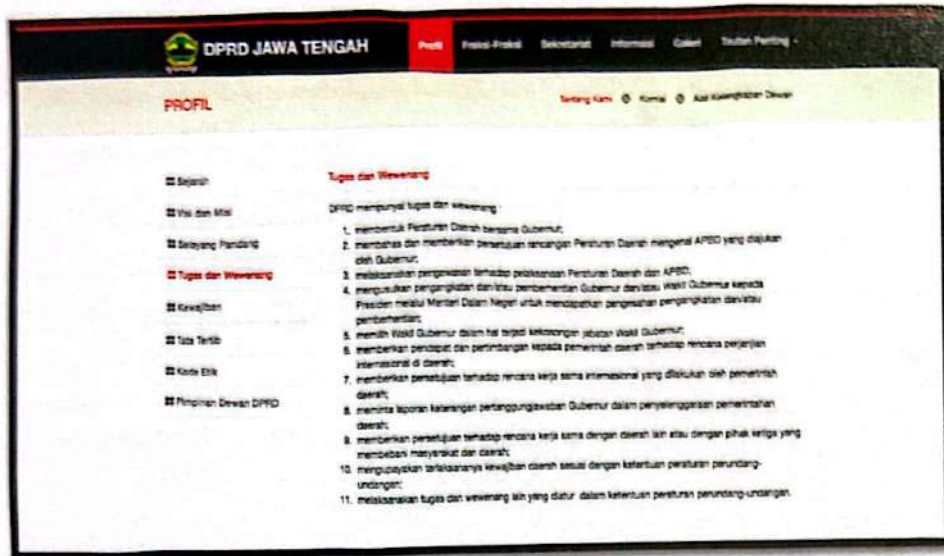
Hak dan Kewajiban

Kolom Hak dan Kewajiban juga telah tersedia dalam laman pertama website ini namun masih belum terisi. Berikut merupakan tampak dari kolom Kewajiban.



Tugas dan Wewenang

Telah tersedia informasi mengenai Tugas dan Wewenang DPRD Jawa Tengah di laman pertama website ini.



The screenshot shows the official website of the DPRD Jawa Tengah. The header includes the logo and name 'DPRD JAWA TENGAH' along with navigation links for 'Profil', 'Fungsi Pokok', 'Sekretariat', 'Informasi', 'Galeri', and 'Tautan Penting'. Below the header, there is a 'PROFIL' section with a sidebar menu containing: 'Sejarah', 'Visi dan Misi', 'Selayang Pandang', 'Tugas dan Wewenang' (highlighted in red), 'Kewajiban', 'Sisa Terbit', 'Kode Etik', and 'Pimpinan Dewan DPRD'. The main content area is titled 'Tugas dan Wewenang' and lists 11 specific duties and powers of the DPRD.

Tugas dan Wewenang

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. membantu Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengajukan pengabdian dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengabdian atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membekas masyarakat di daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai Opini Publik Atas Kinerja Legislasi DPRD Jawa Tengah 2015:



Pada 2015 lalu DPRD Jawa Tengah hanya menyelesaikan 10 dari 19 raperda (52%), antara lain Perda Pelayanan Publik, Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perda tentang Keolahragaan, Perda tentang Kearsipan, Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang. Pencapaian pembuatan Perda selama 2015 lalu lebih baik dibandingkan DPRD DKI Jakarta yang hanya dapat menyelesaikan lima perda dari 17 raperda atau 29%, DPRD Jawa Timur (Jatim) dari 28 raperda dapat rampung 14 perda atau 50%, dan Jawa Barat (Jabar) dari 30 raperda dapat selesai 11 perda atau 46%. Wakil

Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Jateng, Yudhi Indras mengatakan lambatnya pembuatan perda karena pengajuan prolegda oleh eksekutif tidak langsung disertai naskah akademik dan draf raperda, sehingga membutuhkan waktu lama.

DPRD Jawa Tengah menargetkan bisa merampungkan 20 program legislasi daerah (Prolegda) selama 2016. Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, dari 20 prolegda baru itu, 11 di antaranya merupakan prolegda baru dan sembilan lainnya merupakan raperda luncuran dari Prolegda 2015.

<http://gaul.solopos.com/kinerja-DPRD-jateng-mengklaim-lebih-unggul-dari-DPRD-dki-jabar-dan-jatim-ini-penjelasan-ketua-DPRD-jateng-682019>

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=36&date=2016-01-19>

Rencana pembangunan gedung baru DPRD Jateng senilai Rp12 miliar ditunda.

Selasa, 2 Februari 2016

Follow us on   

SEMARANGPOS.COM
SEMARANG

HOME NEWS SEMARANG SEPAK BOLA SPORT TEKNO LIFESTYLE HIBURAN

 **AsianDating.com**
Asian Dating and Singles

**DISCOVER
TRUE LOVE TODAY**

GEDUNG DPRD JATENG
**Proyek Pembangunan Gedung Baru Rp12 Miliar
Ditunda**



Gedung Berlian Kantor DPRD Jateng (infojawatengah.blogspot.com/ilustrasi)

<http://www.semarangpos.com/2015/11/26/gedung-DPRD-jateng-proyek-pembangunan-gedung-baru-rp12-miliar-ditunda-665086>

Kinerja Fungsi Anggaran: APBD Jateng 2016 Defisit Rp400 Miliar, Tapi Tetap Disahkan

Selasa, 2 Februari 2015

SOLOPOS.COM
NEWS

Follow us on    

Home Ekonomi Hukum Internasional Pendidikan

INFORIAL LOWONGAN KERJA : RS Indriati Solo Baru Buka

Dunia Keuangan InstaForex

40% bonus for each deposit Leverage dari 1:1 sampai 1:1000

APBD Jateng 2016 Defisit Rp400 Miliar, Tapi Tetap Disahkan




Gedung Berlian Kantor DPRD Jateng (info:awatengah.blogspot.com/ilustrasi)

Reby, 25 November 2015 22:40 WIB | Inccctunoto / IIRI / Solopos

<http://www.solopos.com/2015/11/25/apbd-jateng-2016-defisit-rp400-miliar-tapi-tetap-disahkan-664770>

Kinerja Fungsi Pengawasan: Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Jateng ke PT. Semen Indonesia di Rembang



DPRD JAWA TENGAH Profil Fraksi-Fraksi Sekretariat Informasi Galeri Tautan Penting -

INFORMASI Berita Agenda Umum

Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Jateng ke PT. Semen Indonesia di Rembang

Tanggal : 03-11-2015

Rembang, Humas Set. DPRD Jateng - Lokasi pendirian pabrik PT Semen Indonesia(Persero) Tbk di Kabupaten Rembang berada di Kecamatan Gunem & terletak pada 5 (lima) desa yang meliputi : Desa Kajar, Timbrangan, Tegaldowo, Pasucen serta Kadiwono, dimulainya Pekerjaan pada bulan Februari 2014 dengan rencana selesai pada triwulan 3 Tahun 2016. Dengan anggaran mencapai Rp. 4,452 Trilyun, untuk Kapasitas 3 Juta Ton Semen/Tahun. Hal itu disampaikan oleh Agung Wiharto selaku Corporate Sekretaris Semen Indonesia saat menerima Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ke PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang.

Untuk tenaga kerja di Proyek ada 1180 orang dengan 63,85% dari warga di sekitar proyek PT. Semen Indonesia di Rembang, untuk target Pekerjaan sampai akhir bulan April rencana pekerjaan 39,10 % namun realisasi pekerjaan sampai 38, 64%. Meskipun demikian Agung mengatakan harapannya PT. Semen Indonesia di Rembang bisa produksi pada awal Tahun 2017.

Agung menambahkan ada 3 Pilar Utama yang mendasari dalam Pendirian PT. Semen Indonesia yang pertaa adalah Ekonomi (Profit) menghasilkan kinerja keuangan yang selalu tumbuh sehingga menghasilkan pertumbuhan usaha yang baik dan berkelanjutan, yang Kedua Lingkungan (Planet) mengendalikan dampak negatif lingkungan dengan Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan masyarakat sekitar dan yang ketiga Sosial (People) mengembangkan dampak positif sosial masyarakat dengan berkomitmen pada pengelolaan Perusahaan berdasar prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan ketiga Pilar utama tersebut menghasilkan pengertian bahwa PT. Semen Indonesia adalah Industri berwawasan Lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan perusahaan dengan kelestarian Lingkungan Hidup, mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat.

<http://DPRD.jatengprov.go.id/post/kunjungan-kerja-komisi-d-DPRD-jateng-ke-pt-semen-indonesia-di-rembang>

Profil Organisasi DPRD di Indonesia

1. Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)

Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia merupakan paguyuban yang terdiri dari pimpinan DPRD dan sekretaris dewan di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Saat ini, ADPSI dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Saefullah periode 2015-2020. Sebelumnya, Ketua ADPSI periode sebelumnya 2010-2015 dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan. ADPSI beralamat di jalan Kebon Sirih 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta. Kontak Telepon (021) 3822152, Fax: (021) 34830069 dan tidak ada website aktif.

2. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ("ADKASI") merupakan organisasi yang anggotanya adalah DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 415. Didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001, ADKASI bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi. ADKASI beralamat di Gedung Yarnati Lt. 1 Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320 Telp. 021 - 3156785 Faks. 021 – 31904861. Tidak ada website aktif

3. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 90 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. ADEKSI beralamat di KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM ROP III WO-10Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, Jakarta 12960 Phone. +6221-83788653, 83786087 Fax. +6221-83786087 Hotline: +628121018679 E-mail: seknas@adeksi.or.id website <http://www.adeksi.or.id>

4. Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI)

Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia atau ASDEKSI d/h Forum Komunikasi dan Konsultasi Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia atau disingkat FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia adalah suatu organisasi profesi yang Anggota dan Pengurusnya berasal dari Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini telah ada 489 Anggota sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota termasuk hasil pemekaran daerah tahun 2008.

Pembentukan ASDEKSI bermula dari kegiatan Workshop Peningkatan Wacana dan Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia pada tanggal 2 – 3 Juli 2001 di Hotel Grand Cempaka – Jakarta. Pada kegiatan tersebut banyak wacana seperti permasalahan yang kerap di hadapi para Sekwan di daerah menjadi bahan diskusi sehingga beberapa Sekwan yang hadir pada saat itu mengusulkan untuk membentuk suatu organisasi yang bisa memediasi atau memfasilitasi permasalahan dan kebutuhan para sekwan. Dari pertemuan tersebut berhasil melahirkan rekomendasi “Perlu adanya forum komunikasi dan konsultasi, sebagai wadah media tukar menukar informasi Sekretaris DPRD baik di tingkat Nasional maupun regional yang difasilitasi oleh Pemerintah”. Selain itu dengan adanya wadah ini juga diharapkan bisa berfungsi memberikan dukungan dan fasilitas pemberdayaan SEKWAN dalam mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari wacana dan rekomendasi inilah akhirnya melahirkan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia atau disingkat FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia yang dideklarasikan melalui MUNAS I pada tanggal 9 s/d 11 Nopember 2001 di Hotel Intan Bali Kabupaten Badung- Provinsi Bali. Keberadaan FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui suratnya No. 165/1092/OTDA tanggal 18 September 2002. Dan pada tahun 2008 akta pendirian ASDEKSI juga dibuat dengan No. -24- tanggal 18 Maret 2008 melalui Notaris Lily Harjati Soedewo, SH.MKn.

Sekretariat Nasional (SEKNAS) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) beralamat di Gedung The Boulevard Lt.3/3A-2 Jl. Fachruddin Raya No. 5 Jakarta Pusat, Telp. : 021 31991309 Fax. : 021 31991346 E mail : asdeksi@gmail.com, : asdeksi@yahoo.com, Web. www.asdeksi.org

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang mahapemurah lagi mahapenyayang, serta seluruh puji dan rasa syukur yang hanya kepadaNya lah dipanjatkan hingga penyusunan Laporan Akhir Kajian Potensi Investasi Peternakan di Kabupaten Batang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akhir ini merupakan tahap akhir dari kegiatan Kajian Optimalisasi UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Isi laporan ini mencakup seluruh hasil analisis data dengan pembahasan mengarah kepada analisis situasi UPTD Kumesu, analisis strategi optimalisasi dan program optimalisasi yang dapat diterapkan pada UPTD Kumesu.

Semoga laporan yang kami susun ini mampu mendatangkan manfaat, sebagai masukan bagi pihak yang terkait dan berkepentingan untuk pembangunan peternakan di Kabupaten Batang. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam keseluruhan dari awal hingga akhir rangkaian kegiatan kajian.

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

PERPUSTAKAAN KHUSUS	
SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
No. Daft.	
Tanggal	

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
INTI SARI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Rumusan dan Pendekatan Penyelesaian Masalah	1-2
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	1-4
1.4 Lingkup Pekerjaan.....	1-4
1.5 Metodologi dan Analisis Data	1-5
1.6 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan.....	1-7
1.7 Pelaporan Hasil Kegiatan	1-7
BAB 2 TINJAUAN UPTD KUMESU	2-1
2.1 Tinjauan Umum.....	2-1
2.2 Tinjauan Manajemen Pengelolaan.....	2-2
2.3 Tinjauan Kelembagaan	2-9
2.4 Tinjauan Lingkungan Eksternal UPTD Kumesu.....	2-10
2.5 Analisis UPTD Kumesu	2-14
BAB 3 STRATEGI OPTIMALISASI UPTD KUMESU	3-1
3.1 Komponen SWOT UPTD Kumesu	3-2
3.2 Pilihan Strategi Berdasarkan Komponen SWOT UPTD Kumesu.....	3-5
3.3 Pemetaan Posisi Strategis UPTD Kumesu	3-7
3.4 Strategi Optimalisasi.....	3-10
BAB 4 RENCANA TINDAK OPTIMALISASI UPTD KUMESU	4-1
4.1 Analisis Tujuan.....	4-1
4.2 Analisis Alternatif.....	4-2
4.3 Rencana Tindak	4-3
BAB 5 PENUTUP	6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan	1-6
-----------	-----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Kajian Optimalisasi UPTD Kumesu	1-3
Gambar 1.2	Alur Analisis Data	1-6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Lokasi Kajian	2-1
Gambar 2.2	Tata Letak Bangunan Fisik pada Lokasi Berbukit	2-4
Gambar 2.3	Lahan HPT UPTD Kumesu	2-5
Gambar 2.4	Unit Pengolahan Limbah Kotoran Ternak	2-8
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.....	2-9
Gambar 2.6	Sebaran Kegiatan Pertanian Kabupaten Batang	2-11
Gambar 2.7	Sebaran Populasi Ternak Sapi dan Kerbau.....	2-12
Gambar 2.8	Perubahan Populasi Ternak Potong 2003 - 2013.....	2-12
Gambar 2.9	Diagram Analisis Situasi UPTD Kumesu	2-14
Gambar 3.1	Analisis SWOT untuk Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu	3-1
Gambar 3.2	Posisi Strategis UPTD Kumesu dalam Kuadran SWOT	3-10
Gambar 3.3	Lima Poin Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu	3-12
Gambar 3.4	<i>Roadmap</i> Optimalisasi UPTD Kumesu.....	3-13
Gambar 4.1	Bagan Analisis Tujuan	4-2
Gambar 4.2	Bagan Analisis Alternatif	4-3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Analisis SWOT UPTD Kumesu	viii
	a. Matrik Komponen SWOT.....	viii
	b. Matrik Strategi S – O	ix
	c. Matrik Strategi S – T.....	x
	d. Matrik Strategi W – O.....	xi
	e. Matrik Strategi W – T	xii
	f. <i>Internal – External Strategic Factors Analysis Summary</i>	xiii
	g. Matrik Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu	xv
Lampiran 2	Analisis ZOPP UPTD Kumesu.....	xvi
	a. Analisis Tujuan	xvi
	b. Analisis Alternatif.....	xvii
	c. Matrik Perencanaan Proyek Analisis ZOPP	xviii
Lampiran 3	Roadmap Optimalisasi UPTD Kumesu	xix
Lampiran 4	Analisis Kelembagaan BLUD.....	xx

INTI SARI (Exclusive Summary)

- UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu merupakan lembaga pelaksana teknis bidang peternakan yang bernaung secara structural dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Dalam mengemban salah satu tugas tanggung jawabnya mengembangkan ternak sapi sebagai bibit unggul bagi masyarakat, UPTD Kumesu telah melaksanakan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental. Status populasi sapi yang dipelihara pada saat kegiatan kajian dilakukan adalah: sapi indukan 20 ekor, dan pedet sapih 4 ekor.
- Studi Potensi investasi Peternakan Kabupaten Batang telah dilakukan dengan focus kajian pada Optimalisasi Usaha Pembibitan Sapi Potong Simmental di UPTD BB Pembibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu. Serangkaian tahapan kajian yang telah ditempuh menyajikan gambaran keadaan UPTD Kumesu secara rinci berikut inventarisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun pilihan-pilihan penyelesaian masalah dalam bentuk *roadmap* optimalisasi UPTD Kumesu. Alat analisis yang digunakan dalam kegiatan kajian ini adalah Analisis SWOT dan Analisis ZOPP, dengan pembahasan yang mengacu kepada pendekatan manajemen / tatalaksana produksi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.
- Analisis situasi terhadap UPTD Kumesu menunjukkan bahwa kinerja yang tidak produktif yang ditampilkannya selama ini merupakan dampak, sedangkan permasalahan mendasar yang sesungguhnya adalah: a.) Sarana produksi yang tidak memadai; b.) Proses produksi yang tidak optimal, memerlukan penguatan manajemen pembibitan yang diaplikasikan dengan baik brikut berbagai penerapan teknologi yang tepat jenis dan tepat guna; c.) Kapasitas SDM kurang, dari segi jumlah dan kualifikasinya; d.) Orientasi kewirausahaan belum muncul; dan e.) Kelembagaan dan payung regulasi yang kurang mendukung.
- Analisis SWOT terhadap UPTD Kumesu memberikan gambaran arahan strategi optimalisasi terhadap usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental, dengan memunculkan lima poin strategi optimalisasi UPTD Kumesu: a.) Penajaman orientasi dan tujuan usaha pembibitan; b.) Penguatan sarana prasarana produksi; c.) Penguatan manajemen produksi; d.) Penguatan kelembagaan dan payung regulasinya; dan e.) Penguatan jaringan kerjasama dan partisipasi masyarakat. *Roadmap* optimalisasi UPTD Kumesu disusun berdasarkan lima strategi optimalisasi tersebut.
- Peningkatan PAD Kabupaten Batang sebagai suatu tujuan yang dimasukkan kedalam analisis ZOPP, maka sebuah rencana tindak optimalisasi UPTD Kumesu telah disusun. Rencana tindak tersebut terdiri dari sepuluh butir langkah operasional yang memiliki kemungkinan besar dapat berhasil jika dikerjakan, yaitu: a.) Seleksi indukan produktif, pengeluaran dan penggantian betina afkir yang tidak produktif; b.) Pengadaan 2 sapi pejantan pemacek jenis persilangan simental; c.) Rehab kerusakan sarana fisik; d.) Redesign tataletak sarana bangunan fisik; e.) Menyediakan bangunan kandang kelompok untuk InKA; f.) Penyediaan pakan hijauan dan konsentrat; g.) Produksi

kompos siap jual; h.) Penguatan kapasitas SDM; i.) Transformasi kelembagaan (UPTD - BLUD); dan j.) Penguatan jaringan antar lembaga dibawah dinas pertanian (*integrated*), membangun kelompok mitra di masyarakat peternak.

- Pada akhirnya, intervensi kegiatan yang bisa diterapkan dapat membawa perbaikan kepada kinerja dan produktifitas UPTD Kumesu dalam setidaknya empat indikasi keuntungan, yaitu indikasi material fisik, indikasi social, indikasi teknis teknologi terapan, dan indikasi financial ekonomi. Sebagai salah satu indikasi financial ekonomi yang ditampilkan oleh UPTD Kumesu adalah besaran sumbangan PAD yang diterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah investasi peternakan di Indonesia nampaknya dimulai sekitar tahun 1970-an, yang pada saat itu tercatat bahwa Indonesia sebagai Negara pengekspor sapi. Pada era itu mulai digencarkan usaha peternakan sapi potong berskala besar, baik usaha penggemukan maupun usaha pembibitannya. Bangsa-bangsa sapi potong unggul introduksi dari Amerika dan Australia mulai marak dikembangkan, antara lain bangsa sapi Santa Gertrudis, Angus, Charolais, Simmental, Limousine, Brahman, dan Hereford. Kemudian, pada era 1980-an, pemerintah gencar mengembangkan program Inseminasi Buatan (IB) sebagai program nasional. IB tersebut menggunakan pejantan atau semen dari berbagai bangsa sapi potong introduksi, sehingga hasil persilangan sapi potong tersebut dapat kita jumpai menyebar sampai sekarang. Salah satu jenis sapi potong hasil persilangan yang banyak dijumpai dipelihara oleh peternak adalah sapi potong persilangan Simmental, karena tampilan produksinya yang bagus dan terbukti adaptasi baik dengan lingkungan tropis Indonesia.

Sampai dengan kondisi pada saat sekarang ini, ketika Indonesia selalu menutup kekurangan kebutuhan daging dengan cara mengimpor, bahkan peternakan merupakan kegiatan usaha produktif yang semakin mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Investasi dalam jumlah besar pada bidang agrobisnis peternakan potong pun terus dikembangkan mulai dari hulu sampai hilir guna mendukung program pembangunan peternakan yang telah dicanangkan dapat mencapai keberhasilan sesuai harapan.

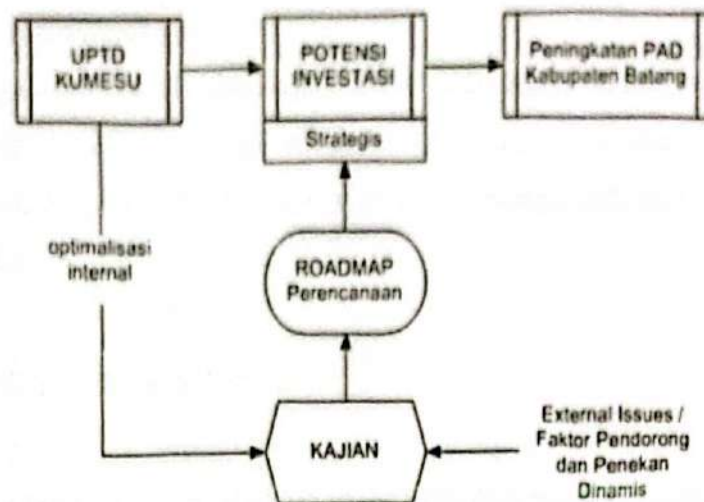
Pembangunan peternakan pada skala tingkat yang lebih kecil diperani oleh pemerintah daerah. UPTD yang menjalankan peran teknis dibidang peternakan merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam mengupayakan pembangunan peternakan yang berlangsung pada tingkat daerah.

1.2 RUMUSAN DAN PENDEKATAN PENYELESAIAN MASALAH

Kabupaten Batang telah memiliki UPTD yang melaksanakan tugas pada bidang peternakan, yaitu UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak. Secara terstruktur UPTD BB, atau dikenal pula dengan nama UPTD Kumesu karena lokasinya yang berada di Desa Kumesu Kecamatan Reban, berada dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Ketika UPTD Kumesu ditinjau sebagai bentuk investasi Kabupaten Batang pada usaha pembangunan peternakan, maka sudah semestinya UPTD menampilkan kinerja yang produktif yang salahsatunya dapat diwujudkan dalam bentuk besaran kontribusi PAD yang diterimakan oleh UPTD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu memiliki tugas tanggung jawab mengembangkan dan menyebarkan ternak potong bibit unggul kepada masyarakat peternak, dan telah menjalankannya dengan melaksanakan usaha pemeliharaan sapi potong persilangan bangsa Simmental. Orientasi pemeliharaannya adalah pembibitan untuk menghasilkan pedet. Permasalahan yang ada pada UPTD Kumesu secara garis besarnya adalah kinerja yang rendah dan tidak produktif, sehingga perlu dilakukan tindakan optimalisasi agar UPTD dapat menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik, serta mampu pula memberikan sumbangan kepada PAD Kabupaten Batang.

Optimalisasi internal yang dilakukan oleh UPTD Kumesu merupakan upaya bersifat dinamis, sehingga pada pelaksanaannya akan sarat pula dipengaruhi oleh berbagai factor dinamis yang berasal dari luar organisasi UPTD (*external dynamic issues*). Implikasinya adalah dibutuhkannya perencanaan yang baik yang bertumpu kepada dasar pengetahuan - pemahaman keadaan internal organisasi UPTD yang baik dengan pula secara peka memperhitungkan pengaruh factor dinamis yang berasal dari luar organisasi.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Kajian Optimalisasi UPTD Kumesu

Pada kesempatan ini, Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang mengambil focus pada Kajian Optimalisasi UPTD sehingga dapat dihasilkan sebuah *roadmap* perencanaan sebagai rekomendasi untuk diterapkan pada UPTD Kumesu selama periode tiga tahun kedepan. Kajian menggunakan tiga pendekatan berikut untuk mengulas dan menemukan pilihan-pilihan pemecahan masalah pada optimalisasi UPTD Kumesu, yaitu:

1. Pendekatan Manajemen Pengelolaan

Pendekatan ini terkait dengan kondisi eksisting internal operasional UPTD. Kondisi terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, evaluasi dari aplikasi kebijakan baik ke arah teknis pengelolaan maupun inovasi teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memetakan secara rinci tentang perbaikan yang dibutuhkan oleh UPTD dalam hal tatalaksana pengelolaan.

2. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan menyangkut UPTD sebagai lembaga di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang mendasarkan peraturan yang sudah ada. Pendekatan ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan melandasi berdirinya UPTD serta peraturan-peraturan lain yang memungkinkan transformasi bentuk kelembagaan yang lain terkait dengan refitalisasi kelembagaan UPTD.

3. Pendekatan Sosial Kemasyarakatan

UPTD sebagai lembaga milik pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari sudut aspek financial, tetapi juga dari sisi aspek social benefit. Melalui pendekatan ini diharapkan terjalin reversible gift dari lembaga dan masyarakat sehingga terbangun financial dan social benefit.

1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan kajian ini adalah tersusunnya dokumen pengkajian optimalisasi usaha pembibitan ternak sapi potong bangsa Simmental pada UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Dokumen kajian ini sedianya dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan-kegiatan lanjutan, menyusun *roadmap* perencanaan UPTD, dan upaya pengembangan ternak potong unggul di Kabupaten Batang.

Tiga poin yang menjadi tujuan pada kajian ini adalah:

1. Identifikasi beserta penguraian permasalahan dan kendala yang ada pada UPTD.
2. Tersusunnya konsep alternatif penyelesaian permasalahan di UPTD.
3. Terwujudnya peran optimal UPTD dalam peningkatan PAD Kabupaten Batang.

Roadmap perencanaan yang disusun sebagai rekomendasi untuk langkah-langkah operasional selama periode tiga tahun kedepan merupakan sasaran kegiatan pengkajian ini. Perencanaan tersebut bersifat reliable dan realistis untuk diterapkan guna semakin meningkatkan kinerja dan produktifitas UPTD dalam kaitannya dengan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Batang.

1.4 LINGKUP PEKERJAAN

LINGKUP LOKASI KEGIATAN KAJIAN

Kajian dilakukan di UPTD BB Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Lokasi UPTD berada di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

LINGKUP MATERI KAJIAN

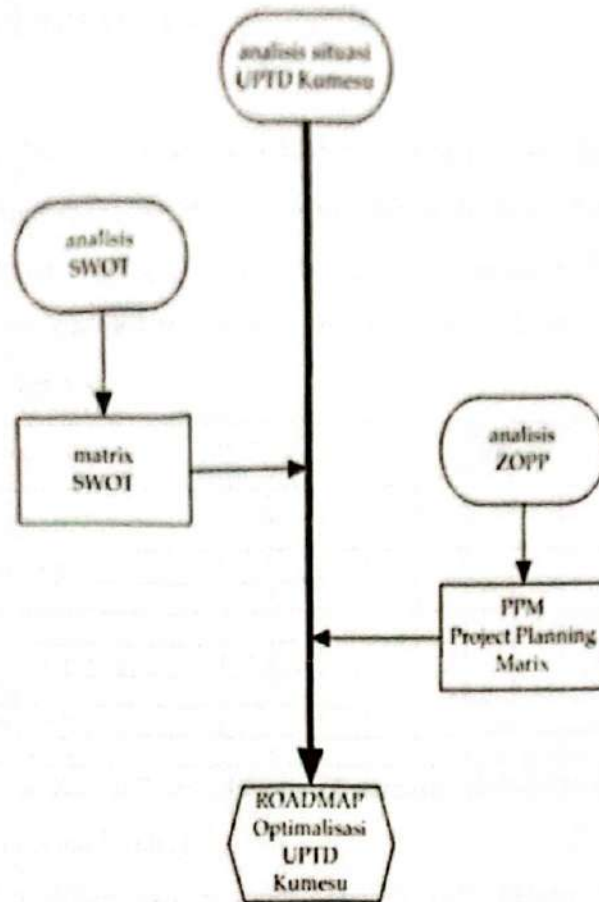
Merujuk kepada sasaran kegiatan kajian yang hendak dicapai berupa *roadmap* perencanaan pada UPTD BB Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak, maka pembahasan yang terlalu melebar harus dihindari. Batasan pembahasan pada kegiatan kajian ini diuraikan dalam lingkup materi kajian sebagai berikut:

1. Tatalaksana pemeliharaan dan sistem produksi pedet yang diterapkan.
2. Sarana prasarana produksi dan bagaimana pemanfaatannya.
3. Kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain yang terlibat dalam kegiatan usaha.
4. Kelembagaan dan payung kebijakan.
5. Dayadukung lingkungan dan partisipasi masyarakat sekitar.

1.5 METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

Pemilihan obyek kajian dilakukan secara menyengaja (*purposive*) yaitu terhadap UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Pengambilan data kajian dilakukan secara bertahap selama proses kajian berlangsung, melalui: pengamatan langsung, interview semi-terstruktur, interview penajaman dan diskusi, serta dokumentasi. Data sekunder berupa arsip dan literature juga dipakai dalam pengolahan data dan analisis.

Tahapan pengolahan data kajian dilakukan menurut alur seperti digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1.2. Alur Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data Kajian Optimalisasi UPTD Kumesu terdiri dari Analisis SWOT dan Analisis ZOPP. Kedua alat analisis tadi dipergunakan secara saling terkait, seperti diperlihatkan oleh Gambar 1.2 di atas. Pengolahan data dengan Analisis SWOT diharapkan dapat menampilkan ulasan potensi dan permasalahan dalam Matrix SWOR, kemudian dapat memunculkan strategi-strategi dalam rangka optimalisasi UPTD Kumesu. Langkah berikutnya, dengan Analisis ZOPP, strategi optimalisasi yang diturunkan dari Analisis SWOT dapat diurutkan secara prioritas dan diperinci menjadi langkah-langkah operasional optimalisasi UPTD Kumesu, kemudian disusun dalam bentuk matriks (PPM: *Project Planning Matrix*).

1.6 MEKANISME PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang dilaksanakan di UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan kalender, mengikuti tahapan kegiatan seperti tercantum dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan

NO	TAHAP KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN											
		BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Studi/ Kajian Literatur												
3	Observasi dan Survey Lapang												
4	Laporan Pendahuluan												
5	Analisis Data												
6	Penyusunan Konsep Laporan Akhir												
7	Konsultasi Draft Laporan Akhir												
8	Penyusunan Laporan Akhir												

Organisasi pelaksana Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang meliputi:

1. Ketua Tim (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang Magister (S2) bidang peternakan lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang peternakan (empat) tahun atau S1 dari latar belakang pendidikan yang sama dengan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

2. Tenaga Ahli Peternakan

Tenaga Ahli Peternakan disyaratkan seorang Sarjana (S1) Peternakan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pekerjaan sejenis sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun.

3. Tenaga Pendukung dengan kualifikasi minimum S1 untuk tenaga administrasi dan operator komputer.

1.7 PELAPORAN HASIL KEGIATAN

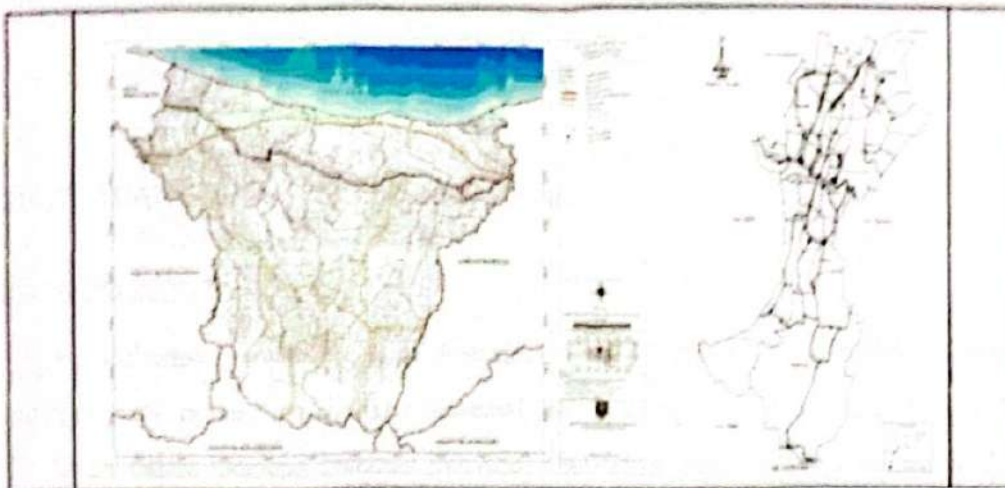
1. Laporan Pendahuluan.
2. Buku Laporan Akhir.

BAB II

TINJAUAN UPTD KUMESU

2.1 TINJAUAN UMUM

Kegiatan Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang pada kesempatan ini difokuskan kepada Kajian Optimalisasi UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu. Sesuai dengan namanya tersebut, UPTD Kumesu memang secara administratif berada di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Letaknya sekitar 30 km di sebelah timur kota Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Lokasi Kajian

Kecamatan Reban beserta kecamatan lain di sekelilingnya, yaitu Kecamatan Blado, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Tersono, merupakan wilayah pertanian tanaman pangan yang dinamis. Populasi ternak sapi potong pada wilayah ini juga termasuk yang tertinggi untuk wilayah Kabupaten Batang, dengan system dan fungsi pemeliharaan ternak yang terkait erat dengan pola usaha tani tanaman pangan yang dijalankan. Ini menandakan bahwa UPTD Kumesu telah berada pada lokasi yang tepat, yaitu dengan tugas tanggung jawab yang diembannya mengembangkan dan menyebarkan ternak sapi potong bibit unggul kepada masyarakat peternak.

UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu telah melaksanakan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental. Orientasi usaha pembibitan yang dilakukan

adalah melaksanakan pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anakan atau pedet. Sementara, sapi persilangan Simmental menjadi pilihan jenis sapi potong yang dikembangkan karena memiliki tampilan dan potensi produksi yang baik, penerimaan dan harga pasar yang tinggi, serta telah teruji memiliki daya adaptasi yang baik dengan keadaan lingkungan pada wilayah Kabupaten Batang.

Kondisi umum yang ada tersebut telah secara sederhana menunjukkan bahwa usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental merupakan usaha yang potensial untuk dikerjakan, dan dengan menempatkan investasi pada alokasi yang tepat maka nampaknya usaha peternakan sapi potong dapat memberikan kemanfaatan yang besar. Maka untuk tujuan itulah salah satunya mengapa Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang ini penting untuk dilakukan.

2.2 TINJAUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

1. SISTEM DAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN

Sistem Pembibitan

Pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh UPTD Kumesu adalah memelihara indukan sapi potong persilangan simental untuk menghasilkan anakan. Sapi indukan dipelihara dalam kandang kereman individu. Manajemen pembibitannya dilakukan dengan inseminasi buatan (IB).

Sebanyak 20 ekor indukan mampu menghasilkan 4 ekor pedet sapih, atau dengan proporsi keberhasilan reproduksi sebesar 20 persen. Angka keberhasilan sebesar itu tergolong masih rendah. Keberhasilan reproduksi yang rendah tadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, nampaknya kombinasi dua faktor antara perkandangan kereman dan jenis sapi persilangan Simmental inilah yang menjadi penyebab utamanya. Persilangan Simmental memang diketahui memiliki tampilan reproduktifitas yang kurang baik, yaitu dengan siklus birahinya yang tidak kentara (*silence estrus*). Sementara disisi lain, aplikasi IB terhadap indukan yang dipelihara dalam kandang kereman sangat tergantung kepada kemampuan pengamatan pemelihara ketika tanda birahi sapi muncul.

Untuk mengatasi permasalahan keberhasilan reproduksi semacam itu dapat diterapkan perbaikan pada manajemen reproduksi dan system perkandangannya, yaitu dengan menerapkan intensifikasi kawin alam (InKA) dan menempatkan indukan dalam satu kandang kelompok bercampur dengan pejantan pemaceknya. Keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dengan model pemeliharaan seperti ini adalah tingkat kebuntungan ternak yang baik, jarak beranak yang dapat diperpendek dan keberhasilan reproduksi yang dapat ditingkatkan.

Manajemen Pakan

Meskipun tersedia lahan HPT, namun penggunaannya sebagai sumber hijauan nampaknya masih minim. Faktor utama penyebabnya adalah kekuarangan tenaga kerja untuk mengelola lahan HPT yang tidak ada. Namun demikian, pemenuhan pakan hijauan untuk pemeliharaan ternak di UPTD Kumesu diperoleh dari hijauan limbah pertanian, yaitu jerami padi atau jagung.

Upaya penyimpanan jerami untuk ketersediaan sumber pakan hijauan telah dilakukan. Teknologi pengolahan jerami fermentasi juga telah diterapkan di UPTD Kumesu sehingga penyediaan pakan dapat lebih efisien. Disamping itu, penggunaan bahan pakan penguat dan tambahan berupa mineral ternak juga telah diterapkan.

Secara umum manajemen pakan yang diterapkan pada UPTD Kumesu telah dijalankan dengan baik, tinggal perlu dimantapkan lagi sehingga keamanan sediaan pakan untuk ternak dapat terjamin kecukupannya untuk mendukung produktifitas ternak yang dipelihara. Tindakan dan teknologi pakan yang diterapkan juga harus terus dimantapkan agar efisien, karena porsi pakan ternak dalam keseluruhan komponen usaha pemeliharaan ternak dapat mencapai 70 persen.

2. KEADAAN SARANA PRODUKSI

Bangunan Fisik

Bangunan kandang yang terdapat di UPTD Kumesu merupakan kandang individu berupa kandang los memanjang. Posisi sapi yang dipelihara adalah ditambatkan, saling berhadapan (*head to head*). Atap menggunakan seng dengan kemiringan 30°, lantai semen dengan kemiringan 2%. Palungan tempat minum terbuat dari semen berukuran panjang 100

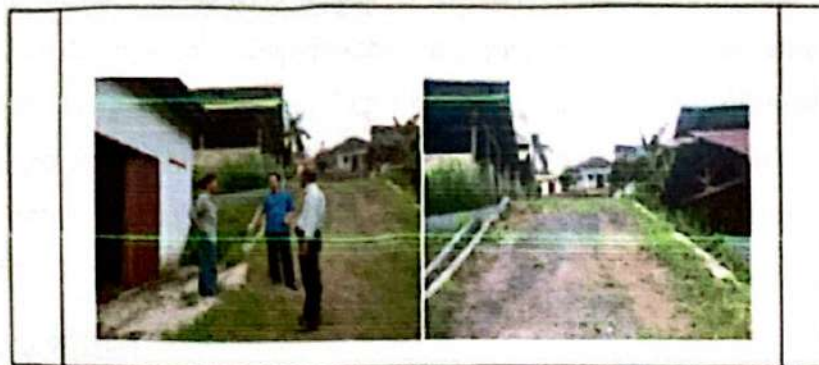
cm, lebar 70 cm, kedalaman 25 cm. Tempat makan panjang 190 cm, lebar 70 cm dan kedalaman 25 cm.

Keseluruhan bangunan kandang berjumlah enam, yaitu:

- 2 Bangunan Kandang berukuran 24m x 8m,
- 3 Bangunan Kandang berukuran 9m x8 m, dan
- 1 Bangunan Kandang berukuran 6 m x 8 m.

Pada saat kegiatan kajian dilaksanakan, hanya 1 kandang saja yang digunakan, yaitu untuk menampung pemeliharaan 20 ekor sapi potong indukan dan 4 ekor pedet lepas sapih. Selain bangunan kandang, sarana bangunan fisik lain yang dimiliki oleh UPTD Kumesu adalah:

- 1 Kantor
- 1 Laboratorium
- 1 Bangunan Rumah Dinas
- 2 Bangunan Gudang
- 1 Bangunan Rumah Genset
- 1 Bangunan Rumah Kompos



Gambar 2.2 Tataletak Bangunan Fisik pada Lokasi Berbukit

Kondisi lokasi UPTD Kumesu yang berkontur berbukit nampaknya menjadi pembatas dalam penataan sarana bangunan fisik tersebut. Penataan atau tataletak sarana fisik sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kemudahan operasional pekerjaan. Ini dibuktikan di UPTD Kumesu yang pada operasional pekerjaannya memanfaatkan sarana tidak sesuai dengan peruntukan. Maka untuk langkah optimalisasi ke depan perlu dirumuskan mengenai kebutuhan jenis sarana bangunan fisik, kapasitas bangunan, serta tataletaknya untuk menunjang operasional pekerjaan yang baik.

Lahan Hijauan Pakan Ternak

Lahan Hijauan Makanan Ternak yang dimiliki UPTD Kumesu adalah seluas $\pm 1,5$ Hektar. Lokasi lahan HPT menyatu dengan bangunan kandang dan fasilitas bangunan fisik lainnya. Jenis rumput yang ditanam adalah rumput gajah, dan Glirisidae (tanaman pakan jenis leguminosa) yang ditanam sebagai pagar keliling lahan HPT.



Gambar 2.3 Lahan HPT UPTD Kumesu

Letak lahan HPT yang tepat berada di belakang lokasi perkandangan dan fasilitas bangunan fisik lainnya ini menyediakan ruang yang luas untuk pengembangan lokasi kandang, pergudangan pakan atau keperluan lain jika nantinya dibutuhkan. Kontur kemiringan hamparan lahan HPT yang berbatasan dengan lokasi kandang juga cenderung lebih rata sehingga lebih memudahkan tata letak bangunan fisik baru yang akan dikembangkan.

Inventarisasi Peralatan

Inventarisasi peralatan yang tersedia di UPTD Kumesu adalah:

No.	NAMA BARANG	Jumlah
1.	Mobil Grand Max Pick Up	1
2.	Motor Honda Win	1
3.	Meja	1
4.	Kursi	1
5.	Songkro	1

6.	Traktor Yanmar	4
7.	Pemecah Rumput (Coper)	4
8.	Pemecah Rumput (Coper) Besar	1
9.	Disel Penyedot Air	2
10.	Pengayak Rabuk	1
11.	Jenset	1
12.	Disel Generator	1

Daftar kebutuhan inventaris yang belum tersedia, antara lain:

No.	NAMA BARANG	Jumlah
1.	Komputer	1
2.	Printer	1
3.	Meja Kursi tamu	1
4.	Almari	1
5.	Kulkas	1

3. KEADAAN TERNAK

Populasi actual ketika kegiatan kajian dilaksanakan adalah: sapi indukan sejumlah 20 ekor, dan pedet sapih sebanyak 4 ekor. Dengan membandingkan proporsi jumlah pedet sapih dan indukannya maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan reproduksi pada usaha pembibitan sapi potong yang dilaksanakan oleh UPTD Kumesu masih tergolong rendah, yaitu 20 persen. Upaya optimalisasi diharapkan dapat menaikkan keberhasilan reproduksi pada angka minimal 60 persen.

Jenis sapi indukan yang dipelihara tersebut adalah jenis sapi potong persilangan Simmental. Catatan silsilah tetua dari sapi persilangan tidak teridentifikasi, dan tidak pula terdapat sertifikasi bibit untuk sapi indukan yang dipelihara. Melalui tampilan figure ternaknya, dapat diperkirakan kalau indukan-indukan tersebut adalah persilangan Simmental dengan peranakan Ongole. Namun porsi gen peranakan Ongole masih nampak lebih dominan.

Berbeda dari indukannya, pedet yang dihasilkan nampaknya menampilkan gen Simmental yang lebih baik. Hal ini terjadi karena pedet yang dilahirkan merupakan hasil Inseminasi Buatan (IB) dengan menggunakan *straw* yang bersumber dari pejantan dengan gen Simmental yang baik.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Tenaga kerja aktif yang menangani semua kegiatan di UPTD Kumesu terdiri dari:

PEKERJAAN	JUMLAH	PENDIDIKAN/KEAHLIAN
Manajer	1	Sarjana Peternakan, IB
Kerja Kandang	1	-
Paruh Waktu, Jaga Malam	1	-

Secara kualifikasi, sebetulnya sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pembibitan sapi pada UPTD Kumesu telah mencukupi. Seorang manajer dengan latar belakang pendidikan sarjana dibidang peternakan (SPt), ditambah keahlian sebagai petugas IB adalah sangat sesuai untuk tugasnya. Hanya saja, untuk menangani seluruh kegiatan kerja pemeliharaan indukan sapi potong dengan populasi sebanyak 20 ekor pada model kandang individu akan tidak cukup dikerjakan oleh satu orang pekerja kandang saja.

Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan pemeliharaan indukan pada usaha pembibitan dengan model perkandangan individu seperti yang dimiliki oleh UPTD Kumesu adalah satu orang pekerja menangani antara 7 ekor sapi, atau paling banyak 10 ekor. Kekurangan tenaga kerja akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasional pekerjaan secara keseluruhan. Konsekwensi kekurangan tenaga kerja akan menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi terbengkalai, dan operasional pekerjaan tidak efisien. Disamping itu, harus menjadi catatan bahwa pada pemeliharaan pembibitan dengan model kandang individu sangat membutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang pengetahuan yang cukup mengenai siklus fisiologi reproduksi ternak, mengingat aplikasi IB sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu pelaksanaannya.

Beberapa pekerjaan yang terbengkalai pada UPTD Kumesu antara lain adalah unit pengolahan limbah menjadi kompos dan pemeliharaan lahan HPT. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi, perlu segera dilakukan agar

usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental yang dilaksanakan dapat mencapai keberhasilan dengan keberlanjutan yang baik.

5. PENERAPAN TEKNOLOGI

Pada manajemen pembibitan, teknologi reproduksi yang diterapkan adalah inseminasi buatan (IB). Sebetulnya teknologi reproduksi sederhana seperti 'kalender reproduksi sapi' dapat diterapkan seiring dengan IB, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan dan keberhasilan reproduksi. Disamping IB, InKA (Intensifikasi Kawin Alam) merupakan pilihan teknologi reproduksi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi pedet pada usaha pembibitan sapi potong.

Pada manajemen pakan, teknologi yang diterapkan antara lain: penyimpanan sediaan pakan (*feed bank*), pengolaha fermentasi jerami padi, dan penyediaan pakan tambahan berupa konsentrat dan mineral. Pengembangan aplikasi teknologi pakan ini pada UPTD Kumesu akan semakin mengarah kepada integrasi ternak-tanaman dengan system LEISA (*Low Externnal Input Sustainable Agriculture*), dengan perencanaan keamanan ketersediaan pakan.

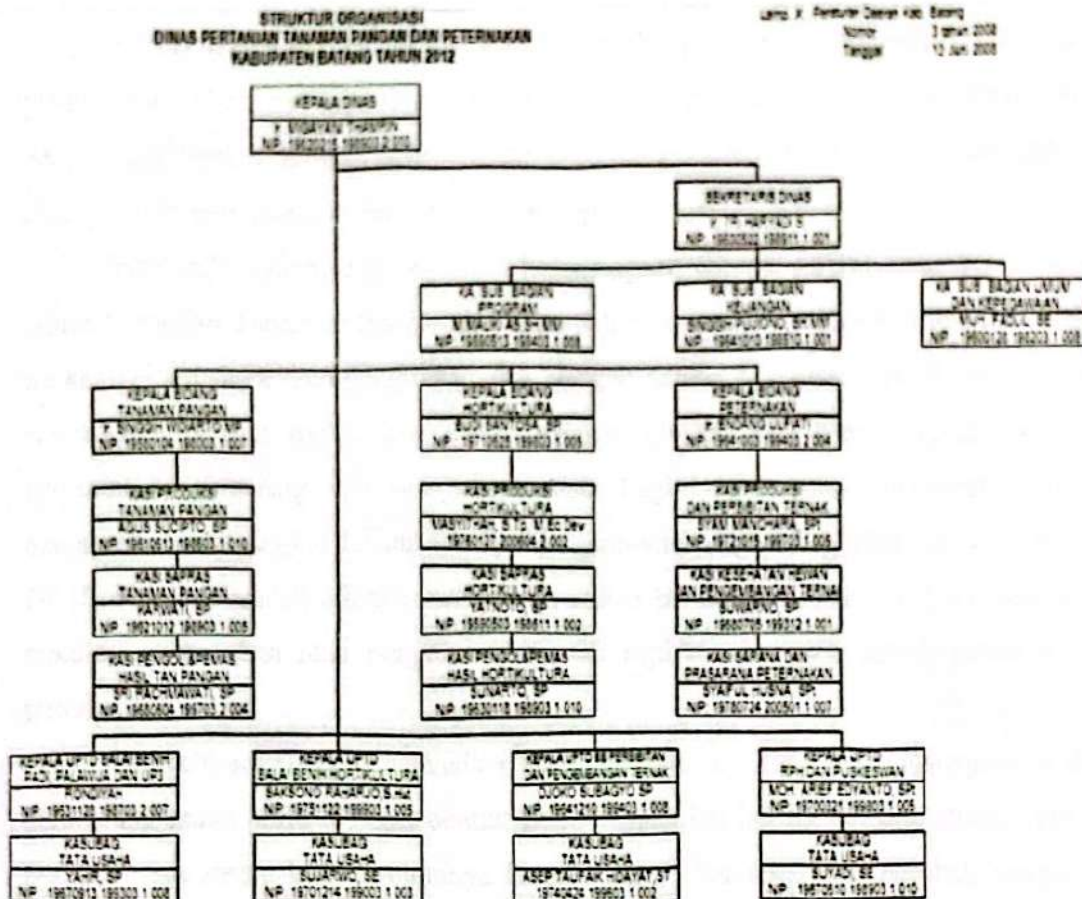


Gambar 2.4 Unit Pengolahan Limbah Kotoran Ternak

Pada unit pengolahan limbah, sebetulnya perkembangan teknologi terapan mengolah limbah kotoran ternak menjadi kompos telah banyak ragam dan pengembangannya. Namun nampaknya pengolahan limbah menjadi kompos siap jual di UPTD Kumesu belum mampu dilaksanakan.

2.3 TINJAUAN KELEMBAGAAN

1. HIRARKI STRUKTURAL LEMBAGA



Gambar 2.5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang

UPTD BB Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu merupakan salah satu bagian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang yang mengelola langsung aktifitas usaha peternakan sapi. Sesuai dengan namanya, UPTD Kumesu seharusnya melaksanakan usaha peternakan sapi potong dalam tiga jenis usaha, yaitu: usaha pembibitan untuk menghasilkan anakan sapi, usaha pembesaran pedet untuk menghasilkan sapi bakalan atau sapi bibit, dan usaha penggemukan sapi bakalan untuk menghasilkan ternak siap potong. Namun sementara ini yang baru dilaksanakan oleh UPTD

Kumesu adalah baru pada usaha pembibitan sapi potong saja, dengan jenis sapi yang dipelihara adalah sapi potong persilangan Simmental.

2. KELEMBAGAAN DAN REGULASI YANG MENGIKAT

UPTD BB Balai Perbibitan dan Pengembangan ternak merupakan lembaga milik pemerintah sehingga memiliki kekuatan yang berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah daerah. Seluruh investasi dan aktivitas operasional yang dijalankan oleh UPTD didukung dengan pembiayaan dari anggaran pemerintah.

Namundemikian, dengan status kelembagaan sebagai UPTD yang berada dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan maka UPTD Kumesu dengan sendirinya terikat mekanisme aturan yang disamakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Keterikatan dengan mekanisme aturan sebagai konsekwensi bentuk kelembagaan milik pemerintah ini sering kali menjadi kendala bagi UPTD untuk mengambil keputusan manajemen pada tingkat lapang (on farm). Terutama yang paling dirasakan oleh pengelola UPTD Kumesu adalah adanya mekanisme aturan ini sangat membatasi keleluasaan dalam sirkulasi pemasukan atau pengeluaran ternak sapi ataupun penyediaan pakan dan obat ternak.

Untuk menunjang keberhasilan usaha pembibitan dan keberlangsungannya dimasa mendatang maka perlu digagas bentuk kelembagaan berikut mekanisme aturan yang lebih fleksibel dan sesuai bagi terciptanya kinerja UPTD Kumesu yang optimal, dengan tetap memberikan andil dalam peningkatan PAD Kabupaten Batang.

2.4 TINJAUAN LINGKUNGAN EKSTERNAL UPTD KUMESU

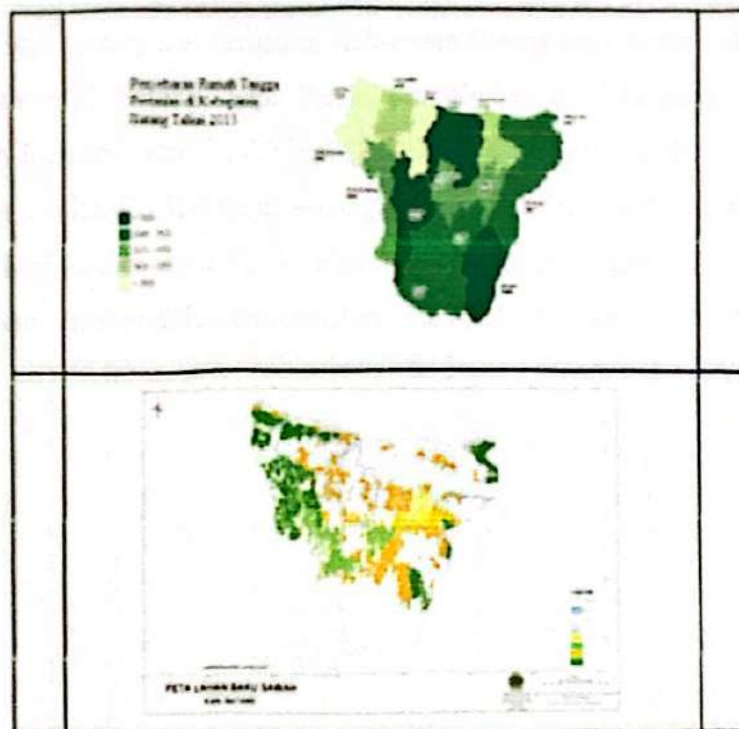
1. KONDISI AGROEKOSISTEM

Daya dukung lingkungan beserta ketersediaan sumberdaya alam merupakan aspek mendasar yang wajib dijadikan rujukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan baik dan menghasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Maka, kajian potensi investasi dalam rangka mengembangkan peternakan di Kabupaten Batang ini mengambil aspek kesesuaian agroekosistem sebagai salah satu tinjauan.

Usaha peternakan sapi potong sangat erat kaitannya dengan usaha pertanian tanaman pangan, sehingga tidak jarang bagi suatu daerah pertanian tanaman pangan maka di tempat itu pula identik dengan daerah sumber ternak potong.

Terbaca dari pemetaan sebaran kegiatan pertanian dan area persawahan pada Gambar 6. bahwa hampir secara merata di seluruh Kabupaten Batang dapat dikatakan sebagai daerah pertanian. Kemudian, kaitannya dengan sebaran ternak dapat dilihat melalui pemetaan pada Gambar 7. yang menunjukkan bahwa sebaran ternak potong juga hampir merata ada di setiap wilayah Kabupaten Batang.

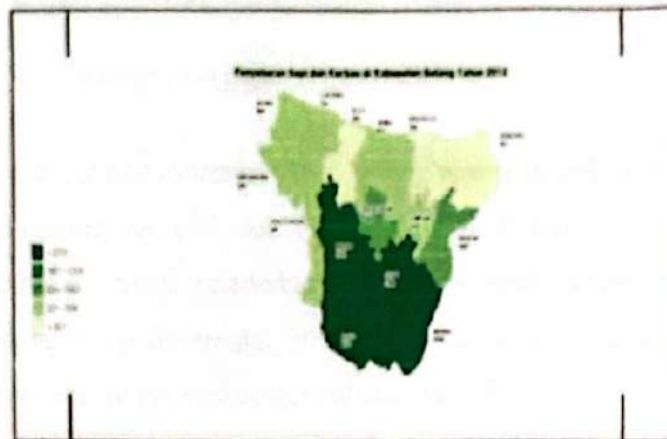
Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Batang memiliki kondisi agroekosistem yang sesuai untuk pengembangan usaha peternakan sapi potong. Kemampuan daya tampung (carrying capacity) perlu diperhitungkan sehingga sampai batas populasi berapa pengembangan usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Batang dapat diterapkan. Kajian potensi investasi peternakan Kabupaten Batang ke depan harus memperhitungkan sampai kepada kapasitas tampung dan upaya pemusatan pembangunan peternakan di wilayah Kabupaten Batang.



Gambar 2.6. Sebaran Kegiatan Pertanian Kabupaten Batang

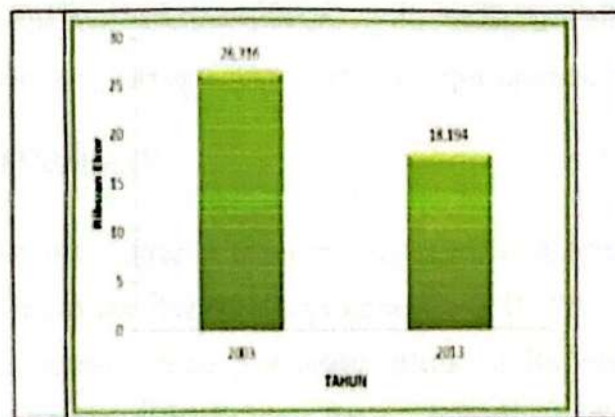
2. DINAMIKA TERNAK POTONG KABUPATEN BATANG

Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 apabila dirinci menurut wilayah, Kabupaten Batang yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Kecamatan Reban dengan jumlah populasi sebanyak 3.456 ekor, kemudian Kecamatan Bawang (3.140 ekor), dan Kecamatan Blado (2.201 ekor). Sebaran populasi ternak potong, termasuk sapi potong dan kerbau, menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 diilustrasikan dalam Gambar 7. berikut.



Gambar 2.7. Sebaran Populasi Ternak Sapi dan Kerbau

Pendataan sapi potong dan kerbau di Kabupaten Batang juga dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011. Populasi sapi dan kerbau hasil PSPK di Kabupaten Batang adalah 26.316 ekor, sedangkan menurut hasil sensus pertanian 2013 populasi sapi dan kerbau mencapai 18.194 ekor. Artinya, selama antara tahun 2011 – 2013 saja telah terjadi penurunan populasi ternak potong sebanyak lebih dari 30 persen.



Gambar 2.8. Perubahan Populasi Ternak Potong 2003 – 2013

Penurunan populasi ternak potong yang begitu besar harus disikapi dengan baik, dan langkah antisipasi perlu segera dilakukan untuk menghindari pengurasan ternak secara lebih jauh lagi. Pengurasan ternak potong dapat terjadi disebabkan oleh laju pengeluaran ternak yang tinggi, pengiriman ternak ke luar daerah, atau disebabkan karena laju pemotongan ternak yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan daging. Pengurasan ternak potong dapat menyebabkan penurunan mutu genetik ternak yang tersisa, oleh karena pemotongan betina produktif dan pemotongan dini ternak muda yang tidak terkontrol.

3. POTENSI INVESTASI PETERNAKAN

Dengan melihat keadaan dinamika ternak potong seperti digambarkan di atas, maka langkah taktis perlu segera diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mendorong pengembangan usaha peternakan potong di wilayah Batang. Investasi pada pembangunan peternakan di Kabupaten Batang nampaknya perlu mencakup seluruh komponen kegiatan agribisnis peternakan dari hulu sampai hilir.

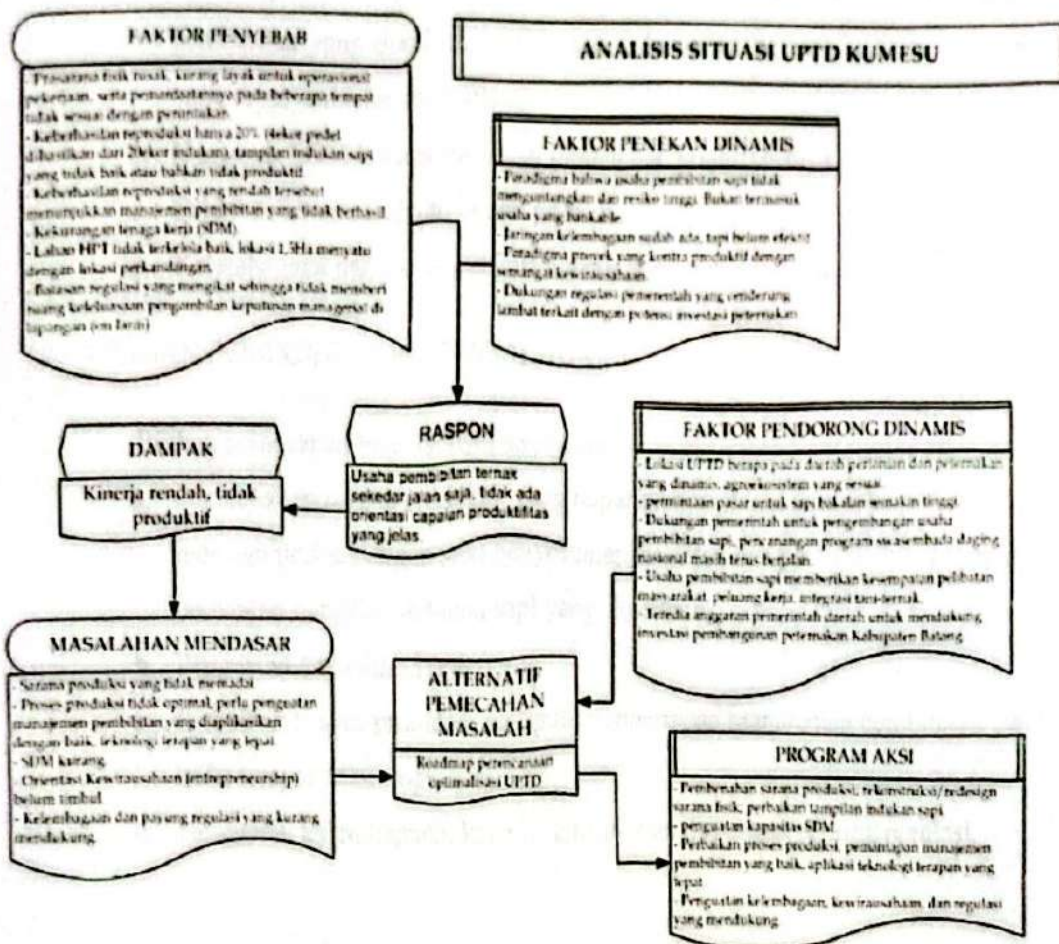
Pada sisi hulu agribisnis peternakan yang perlu dikembangkan antara lain adalah usaha pembibitan ternak potong yang menghasilkan sapi bibit unggul, pembesaran pedet potong yang menghasilkan sapi bakalan (*feedercattle*) dan sapi bibit pengganti (*replacement*), dan usaha penggemukan bakalan unggul penghasil daging. Masih pada sisi hulu adalah mengembangkan mekanisme ketahanan pakan ternak, yang dapat dipadukan dengan tanaman pangan (*integrated*). Sementara pada sisi hilir memegang peran penting dalam pengaturan bagaimana produk hasil peternakan berupa daging dapat secara aman, sehat, utuh dan halal dapat sampai kepada masyarakat konsumen. Komponen agribisnis ternak potong hulu sampai hilir harus secara sinambung dikembangkan sehingga pemenuhan kebutuhan produk ternak yang kian meningkat dapat secara tepat dipenuhi.

4. JARINGAN KELEMBAGAAN

Nampak dalam bagan struktur organisasi pada Gambar di atas, bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan juga menaungi UPTD RPH dan Puskesmas, yaitu UPTD yang melaksanakan tugas pada bidang peternakan. Berbeda dengan UPTD Kumesu yang melaksanakan tugas budidaya ternak, nampaknya UPTD RPH lebih cenderung melaksanakan usaha peternakan pada sisi hilir pasca budidaya. Artinya, tidak

hanya berada pada satu naungan koordinasi saja tetapi antara UPTD Kumesu dengan UPTD RPH seyogyanya menjalin kerjasama yang terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja secara bersama-sama. Bahkan gagasan lebih luas lagi adalah seluruh UPTD yang berada di bawah pembinaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang dapat diarahkan untuk membangun jaringan kerjasama yang terintegrasi dengan baik.

2.5 ANALISIS SITUASI UPTD KUMESU



Gambar 2.9. Diagram Analisis Situasi UPTD Kumesu

1. ANALISIS PERMASALAHAN MENDASAR

Seperti nampak dalam ilustrasi pada Gambar. di atas, maka keadaan kinerja yang rendah dan tidak produktif yang dialami UPTD Kumesu bukan lah permasalahan yang sesungguhnya. Kinerja rendah UPTD hanya merupakan dampak yang terbentuk oleh keadaan faktor penyebab internal dan faktor penekan dinamis dari luar UPTD. Sementara, turunan dari analisis permasalahan menemukan permasalahan mendasar yang terjadi pada UPTD Kumesu adalah:

- a. Sarana produksi yang tidak memadai.
- b. Proses produksi yang tidak optimal, memerlukan penguatan manajemen pembibitan yang diaplikasikan dengan baik berikut berbagai penerapan teknologi yang tepat jenis dan tepat guna.
- c. Kapasitas SDM kurang, dari segi jumlah dan kualifikasinya.
- d. Orientasi kewirausahaan belum muncul.
- e. Kelembagaan dan payung regulasi yang kurang mendukung.

2. PILIHAN PEMECAHAN PERMASALAHAN

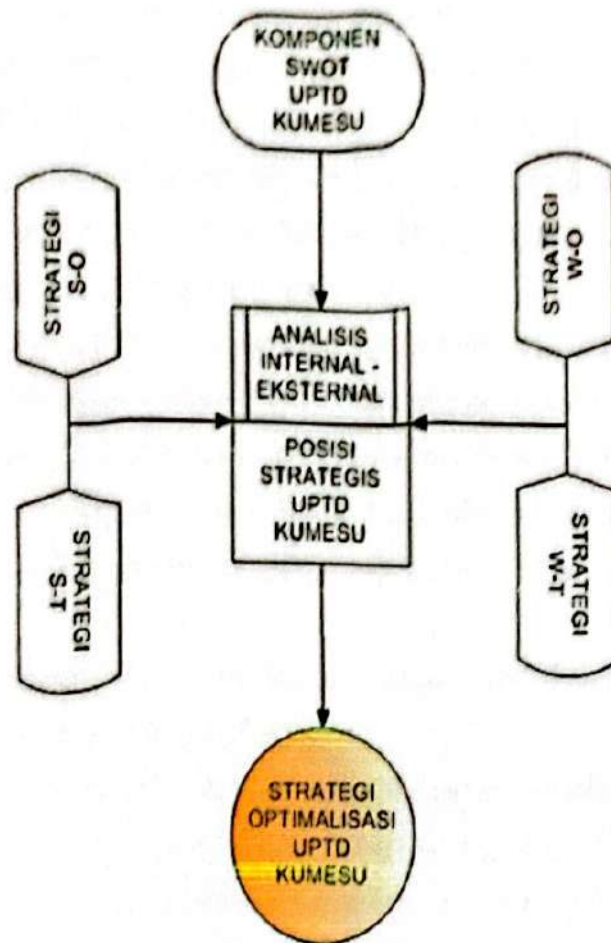
Pilihan pemecahan masalahnya, antara lain:

- a. Pembenahan sarana produksi, yang dapat meliputi: tindakan rekonstruksi atau redesign perkandangan atau penyesuaian tataletak bangunan fisik lainnya; upaya perbaikan tampilan indukan sapi yang dipelihara.
- b. Penguatan kapasitas SDM.
- c. Perbaikan proses produksi, meliputi: pematapan manajemen pembibitan yang baik; terapan teknologi.
- d. Penguatan kelembagaan, kewirausahaan, dan dukungan payung regulasi.

BAB III

STRATEGI OPTIMALISASI UPTD KUMESU

Perumusan strategi optimalisasi UPTD Kumesu dilakukan melalui pengolahan data kajian dengan menggunakan alat analisis SWOT. Gambar 1. berikut ini memberikan ilustrasi tahapan proses analisis data sampai diperoleh hasil strategi optimalisasi UPTD Kumesu. Kemudian, rumusan strategi optimalisasi digunakan sebagai acuan untuk penyusunan *roadmap* optimalisasi UPTD Kumesu.



Gambar 3.1. Analisis SWOT untuk Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu



3.1 KOMPONEN SWOT UPTD KUMESU

1. Komponen Kekuatan (*Strengths*)

- a. **KOMODITAS;** Pilihan bangsa sapi yang dipelihara adalah bangsa sapi potong persilangan Simmental, merupakan bangsa sapi unggul sebagai penghasil daging dengan potensial produksi yang baik, telah teruji adaptif terhadap kondisi lingkungan, dan nilai jual yang tinggi.
- b. **SARANA PRODUKSI;** Kelengkapan sarana fisik sudah baik, meliputi: bangunan kandang, pergudangan pakan dan peralatan, kandang isolasi/karantina, unit pengolahan limbah, dan bangunan kantor. Masih tersedia ruang untuk pengembangan sarana fisik, seperti misalnya untuk penambahan bangunan kandang atau pergudangan dan lainnya jika diperlukan. Proyeksi untuk peningkatan populasi atau skala produksi masih terbuka. Tersedia lahan HPT seluas 1.5Ha yang letaknya menyatu dengan lokasi pemeliharaan ternak.
- c. **PROSES PRODUKSI;** Aplikasi IB dalam manajemen pembibitannya. Penyediaan pakan jerami padi, disamping upaya penyimpanan jerami kering untuk menjamin ketersediaan diterapkan pula teknik fermentasi jerami guna meningkatkan nilai nutrisinya. Penyediaan pakan tambahan juga dilakukan, berupa dedak padi kasar dan kulit kopi kering, serta molases, garam dan mineral. Unit pengolahan limbah menjadi kompos.
- d. **SDM;** Manager UPTD memiliki latarbelakang pendidikan Peternakan, keahlian inseminator IB, dan berpengalaman.
- e. **KELEMBAGAAN;** Bentuk lembaga UPTD, legalitas kelembagaan milik pemerintah sesuai mekanisme payung kebijakan yang berlaku, dengan tujuan dan fungsi kerja yang jelas. Sumber pendanaan untuk seluruh operasional kerja bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.

2. Komponen Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. JENIS USAHA; Pembibitan sapi potong merupakan usaha dengan tingkat resiko tinggi dan keuntungan ekonomi kecil. Daur produksi lama, perputaran kapital lambat.
- b. KOMODITAS; Asal-usul sapi persilangan Simmental yang dipelihara dalam pembibitan UPTD tidak diketahui, tidak ada catatan silsilah, tidak memiliki sertifikasi bibit. Umumnya bagi sapi persilangan Simmental ialah menunjukkan tampilan reproduktifitas yang rendah, yaitu silence estrus, gejala birahi yang tidak kentara.
- c. SARANA PRODUKSI; Kondisi sarana fisik rusak, perlu perbaikan dan perawatan. Penggunaan sarana fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini mengindikasikan bahwa tataletak bangunan sarana fisik tidak tepat, menyusahakan operasional pekerjaan. Lahan HPT seluas 1.5Ha belum dikelola dengan baik. Kontur lokasi usaha pembibitan sapi yang berbukit, bukan hamparan rata, menjadikan pengaturan tataletak harus menyesuaikan kondisi konturnya. Konstruksi bangunan kandang adalah kandang kereman individu *head to head*, yang cenderung lebih tepat untuk produksi penggemukan ketimbang pembibitan sapi potong.
- d. PROSES PRODUKSI; Perbandingan 4ekor pedet yang dihasilkan dari 20ekor indukan menunjukkan bahwa keberhasilan reproduksi masih rendah (20%). Penerapan IB perlu dioptimalkan, atau dapat diterapkan InKA (Intensifikasi Kawin Alam) untuk meningkatkan produksi pedet. Unit pengolahan limbah masih lemah dan tidak produktif. Jalur pembuang limbah dari kandang menuju unit pengolahannya perlu penataan ulang, menyesuaikan kondisi kontur. Aplikasi racun serangga (pestisida) untuk pengendalian lalat, mengandung resiko terhadap kesehatan ternak dan peternak.
- e. SDM; Kekurangan tenaga untuk menangani kegiatan harian pemeliharaan ternak, unit pengolahan limbah / produksi kompos, lahan HPT. Kekurangan dalam segi jumlah maupun segi kualifikasinya.
- f. KELEMBAGAAN; Regulasi UPTD yang mengikat menjadi pembatas bagi manajemen untuk menjalankan operasional kerja lapangan (*on farm*), terkait dengan

input dan output. Regulasi UPTD membatasi sumber pendanaan dari anggaran daerah, menutup kemungkinan dana investasi dari pihak lain yang mungkin potensial untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha pembibitan sapi ke depan. Kerjasama antar lembaga bidang peternakan baik ditingkat daerah maupun tingkat yang lebih luas, atau lembaga pemerintah maupun swasta, yang dapat menunjang keberhasilan usaha belum secara efektif terjalin. Integrasi antar lembaga yang terkait perlu dikembangkan. Pola pelibatan partisipasi masyarakat petani-peternak nampaknya belum tersentuh.

3. Komponen Peluang (*Opportunities*)

- a. PASAR OUTPUT; Nilai sapi potong persilangan Simmental yang bagus, diminati peternak, permintaan tinggi. Pupuk kompos dan pupuk cair juga semakin populer dengan posisi tawar yang baik ditingkat konsumen.
- b. PASAR INPUT; Kesesuaian agroekosistem sangat menunjang untuk penerapan integrasi ternak-tanaman, sehingga usaha pembibitan sapi potong dapat menerapkan sistem LEISA, beserta pendekatan Zero Waste - Zero Cost melalui penambahan nilai dari pengolahan limbahnya menjadi kompos. Kemandirian pakan.
- c. KELEMBAGAAN; Kegiatan pembibitan ternak dilaksanakan pada tingkat daerah dalam bentuk badan usaha produktif, sehingga menguntungkan bagi organisasi pengelola, bagi pemerintah dalam bentuk PAD, serta bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Peluang kerjasama dan jaringan kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta, membuka peluang untuk akses pasar maupun permodalan. Meningkatkan semangat kewirausahaan. Usaha peternakan sapi potong oleh petani peternak dapat didorong kearah pemberdayaan, sebagai mitra kerjasama, kelompok peternak yang melaksanakan pembesaran pedet atau penggemukan, atau sebagai kelompok pembibitan (VBC).
- d. REGULASI; Dukungan payung kebijakan secara nasional untuk program swasembada daging sapi.

4. Komponen Ancaman (*Threats*)

- a. **PENGURASAN TERNAK;** Pemotongan sapi betina produktif yang masih terus berlangsung. Pemotongan dini pada ternak sapi sebelum mencapai tingkat potensial produksinya.
- b. **PERGESERAN POLA BETERNAK;** Pada peternakan rakyat terjadi kecenderungan meninggalkan pembibitan dan beralih kepada usaha penggemukan sapi potong dengan alasan pertimbangan nilai manfaat ekonomi yang lebih menguntungkan.
- c. **PASOKAN DARI LUAR DAERAH;** Kemudahan memperoleh pasokan dari luar daerah, baik berupa daging atau ternak potong, menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha peternakan.

3.2 PILIHAN STRATEGI BERDASARKAN KOMPONEN SWOT UPTD KUMESU

1. STRATEGI S-O

- a. Penguatan usaha pembibitan dengan penajaman orientasi memproduksi pedet untuk pembesaran dan penggemukan sebagai ternak potong.
- b. Peningkatan efisiensi kerja dengan pemanfaatan sarana produksi yang tersedia secara optimal. Peningkatan nilai tambah dengan unit pengelolaan limbah menjadi kompos siap jual.
- c. Pemantapan manajemen pembibitan untuk menaikkan produksi pedet, penerapan teknologi bidang pembibitan ternak.
- d. Penambahan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktifitas.

2. STRATEGI S-T

- a. Peningkatan produksi pedet dan efisiensinya, semakin meningkatkan peran sebagai balai perbibitan.
- b. Menjalin kerjasama kemitraan dengan kelompok peternak, dan menjalin kerjasama antar lembaga bidang peternakan.

- c. Penguatan kapasitas usaha peternakan dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk semakin berperan mengembangkan investasi peternakan, memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan peternakan rakyat.
- d. Penguatan jiwa kewirausahaan.

3. STRATEGI W-O

- a. Perbaiki tampilan indukan yang dipelihara, pencatatan silsilah atau sertifikasi bibit untuk menghasilkan peranakan dengan mutu genetis yang unggul.
- b. Perbaiki dan penataan sarana prasarana agar mampu mendukung produktifitas yang optimal.
- c. Pemanjapan manajemen pembibitan untuk meningkatkan produksi pedet. Target keberhasilan reproduksi >60%, memperpendek jarak beranak 12-14 bulan.
- d. Pemanfaatan teknologi terapan untuk efisiensi biaya produksi, integrasi tanaman-ternak, sistem LEISA, teknik pengolahan limbah sehingga prinsip zero waste - zero cost dapat dicapai.
- e. Menggagas perubahan bentuk kelembagaan beserta payung kebijakan yang mendukung kepada keberhasilan dan keberlangsungan usaha pembibitan, membangun semangat kewirausahaan.
- f. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga, pemerintah maupun swasta, membuka peluang untuk akses pasar maupun permodalan. Mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat peternak.
- g. Penguatan Kapasitas SDM, menutup kekurangan jumlah tenaga kerja sekaligus kualifikasi yang sesuai.

4. STRATEGI W-T

- a. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga bidang peternakan untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi terhadap laju pengurusan ternak potong.
- b. Membangun pola partisipasi masyarakat peternak dengan mendorong pemberdayaan kelembagaan kelompok ternak melalui kerjasama untuk usaha pembesaran pedet atau pengeggemukan sapi bakalan yang dihasilkan oleh UPTD Kumesu.

- c. Menutup kekurangan SDM.

3.3 PEMETAAN POSISI STRATEGIS UPTD KUMESU

1. URAIAN

Pemetaan posisi strategis adalah bagian penting dalam analisis SWOT. Dengan melakukan pemetaan ini maka posisi strategis UPTD Kumesu dapat ditentukan, sehingga arahan strategi yang tepat untuk optimalisasi UPTD Kumesu dapat ditetapkan. Pilihan-pilihan strategi yang tepat untuk upaya optimalisasi UPTD Kumesu juga didasarkan pada titik posisi strategis ini.

Cara melakukan pemetaan posisi strategis adalah dengan menghitung komponen internal dan komponen eksternal pada analisis SWOT UPTD Kumesu. Komponen internal dihitung secara kuantitatif dengan memberikan skor dan bobot pada faktor kekuatan dan faktor kelemahan, dirangkum dalam matrik IFAS. Kuantifikasi yang sama juga dilakukan terhadap komponen eksternal faktor peluang dan faktor ancaman, kemudian dirangkum dalam matrik EFAS.

Hasil perhitungan kuantitatif terhadap komponen SWOT tersebut kemudian diterapkan ke dalam kuadran analisis SWOT, sehingga titik koordinat yang ditunjukkan pada kuadran tersebut merepresentasikan posisi strategis UPTD Kumesu. Nilai yang dihasilkan dari matrik IFAS adalah angka koordinat sumbu x, dan nilai dari matrik EFAS adalah angka koordinat sumbu y.

2. MATRIK ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Matrik IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*):

No	Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Menjalankan usaha pembibitan sapi potong memiliki peran strategis sebagai industry hulu dari rangkaian agrobisnis peternakan sapi potong.	4	0.02	0.08
2	Jenis sapi potong persilangan Simmental	3	0.06	0.18

	merupakan jenis unggul bernilai ekonomis tinggi.			
3	Sarana prasarana produksi tersedia lengkap, sarana berupa bangunan fisik perkandangan, pergudangan, dan lahan HPT, semua ada.	4	0.07	0.28
4	Aplikasi teknologi IB pada manajemen pembibitan, dan teknologi pengolahan pakan pada system pemberian pakan ternak.	4	0.08	0.32
5	Manajer pengelola yang ahli dengan latarbelakang pendidikan peternakan, praktisi IB.	2	0.04	0.08
6	Kelembagaan dalam bentuk unit usaha milik pemerintah, UPTD, dengan dukungan peraturan serta pendanaan dari sumber pemerintah.	4	0.1	0.4
Total Faktor Kekuatan (Total S)				1.34
No	Faktor Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Usaha pembibitan membutuhkan periode produksi yang lama, perputaran capital lambat, beresiko tinggi.	4	0.05	0.2
2	Indukan sapi persilangan Simmental tidak diketahui asal usul silsilahnya, tidak ada sertifikasi kualitas bibit.	3	0.1	0.3
3	Kondisi sarana fisik bangunan kandang dan pergudangan rusak, pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukannya.	4	0.13	0.52
4	Produktifitas dalam menghasilkan pedet masih rendah, penerapan teknologi reproduksi masih kurang, dan aplikasi racun serangga untuk pengendalian lalat terlalu beresiko.	4	0.15	0.6
5	Banyak aspek pekerjaan harian yang tidak tergarap disebabkan oleh kekurangan jumlah tenaga kerja.	4	0.1	0.4

6	Regulasi kelembagaan UPTD membatasi ruang gerak untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha, sumber pendanaan terbatas dari anggaran daerah menutup pendanaan dari investor luar.	4	0.13	0.52
Total Bobot			1	
Total Faktor Kelemahan (Total W)				2.54
Total S – Total W = (-1.2)				

Matrik EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*):

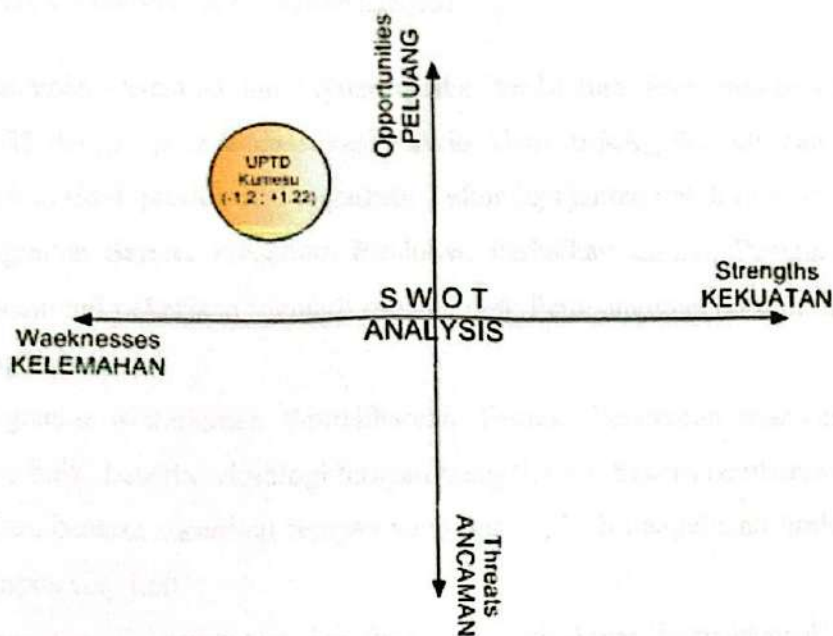
No	Faktor Peluang (<i>Opportunities</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Permintaan sapi potong persilangan Simmental tinggi, potensi produksi unggulan, disukai peternak, nilai ekonomis tinggi.	4	0.2	0.8
2	Kesesuaian agroekosistem yang masih mampu untuk mendukung pengembangan usaha peternakan sapi potong.	4	0.2	0.8
3	Penguatan kelembagaan, membangun jaringan kerjasama antar lembaga, membangun peranserta produktif masyarakat peternak.	3	0.15	0.45
4	Payung regulasi pembangunan peternakan yang kondusif.	3	0.12	0.36
Total Faktor Peluang (Total O)				2.41
No	Faktor Ancaman (<i>Threats</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Pengurusan populasi ternak potong karena pemotongan betina produktif dan pemotongan ternak muda.	4	0.2	0.8
2	Pergeseran pola beternak pada peternakan rakyat, dari usaha pembibitan yang cenderung beralih kepada penggemukan sapi potong.	3	0.08	0.24
3	Pengurangan usaha peternakan sapi potong	3	0.05	0.15

	karena pasokan ternak potong atau produk daging yang tersedia dari luar daerah.		
Total Bobot		1	
	Total Faktor Ancaman (Total T)		1.19
Total O – Total T = (1.22)			

Sumbu x = -1.2

Sumbu y = 1.22

3. KUADRAN SWOT



Gambar 3.2. Posisi Strategis UPTD Kumesu dalam Kuadran SWOT

3.4 STRATEGI OPTIMALISASI

1. ARAHAN STRATEGI OPTIMALISASI

Untuk dapat menentukan arahan strateginya maka terlebih dahulu perlu dipahami pemetaan posisi strategis UPTD Kumesu. Dalam kuadran SWOT pada Gambar 2, posisi strategis UPTD dipetakan pada koordinat (-1.2 ; 1.22). Angka (-1.2) pada sumbu x

bernilai negative menunjukkan bahwa kondisi faktor internal UPTD Kumesu lebih cenderung lemah, sementara angka (1.22) pada sumbu y bernilai positif menunjukkan bahwa faktor peluang lebih besar dibanding acaman. Artinya, peluang untuk usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental sangat prospektif untuk dikembangkan, ketika faktor kelemahan internal UPTD Kumesu dapat ditanggulangi.

Maka, arahan strategi optimalisasi UPTD Kumesu adalah menangkap peluang dengan melanjutkan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental, dan menerapkan strategi penanggulangan faktor kelemahan internal. Investasi merupakan bagian dari strategi penanggulangan faktor internal UPTD Kumesu.

2. LIMA POIN STRATEGI OPTIMALISASI

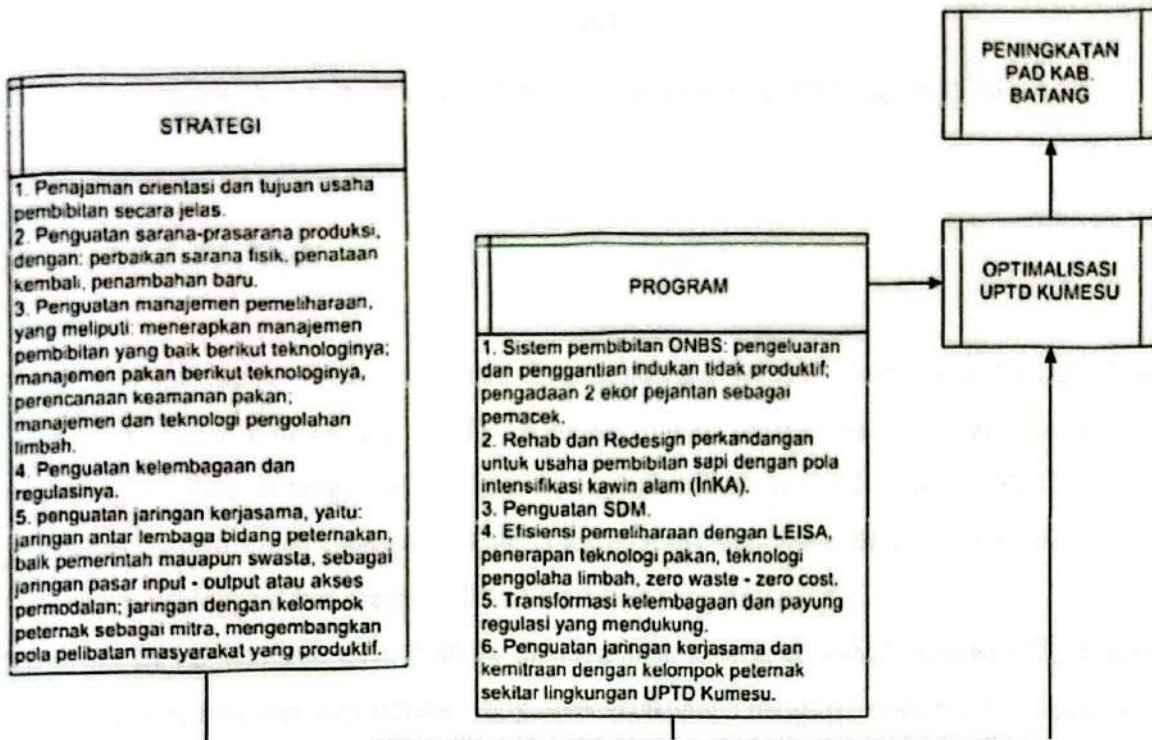
- a. Penajaman Orientasi dan Tujuan Usaha Pembibitan: Menerapkan sistem pembibitan ONBS dengan pola Intensifikasi Kawin Alam (InKA); Pengeluaran dan penggantian indukan tidak produktif; Pengadaan 2 ekor sapi jantan untuk Pemacek.
- b. Penguatan Sarana Prasarana Produksi: Perbaikan sarana; Penataan kembali argar operasional pekerjaan menjadi mudah, dan; Pembangunan baru untuk sarana penting yang belum ada.
- c. Penguatan Manajemen Pemeliharaan Ternak: Penerapan manajemen pembibitan yang baik, beserta teknologi terapan yang Sesuai; Sistem pemberian dan penyediaan pakan, beserta teknologi terapan yang Sesuai; Unit pengolahan limbah memproduksi kompos siap jual.
- d. Penguatan Kelembagaan dan Payung Regulasinya: Transformasi bentuk lembaga; Regulasi yang kondusif untuk keberlanjutan usaha; Menutup kekurangan SDM.
- e. Penguatan Jaringan Kerjasama: Antar lembaga, dan; Kemitraan dengan kelompok peternak.



Gambar3.3. Lima Poin Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu

3. ROADMAP OPTIMALISASI UPTD KUMESU

Setelah arahan strategi optimalisasi UPTD Kumesu terpetakan dengan baik sehingga lima butir strategi optimalisasi dapat ditentukan, maka dengan berdasar arahan dan strategi tersebut disusunlah sebuah *Roadmap* Optimalisasi UPTD Kumesu. Sejumlah program atau proyek yang diturunkan dari strategi optimalisasi, seperti ditampilkan dalam Gambar. merupakan kegiatan yang saling terkait antara satu dan lainnya. Pendekatan manajemen proyek atau perencanaan proyek harus diterapkan agar semua rancangan optimalisasi dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai.



Gambar 3.4. Roadmap Optimalisasi UPTD Kumesu

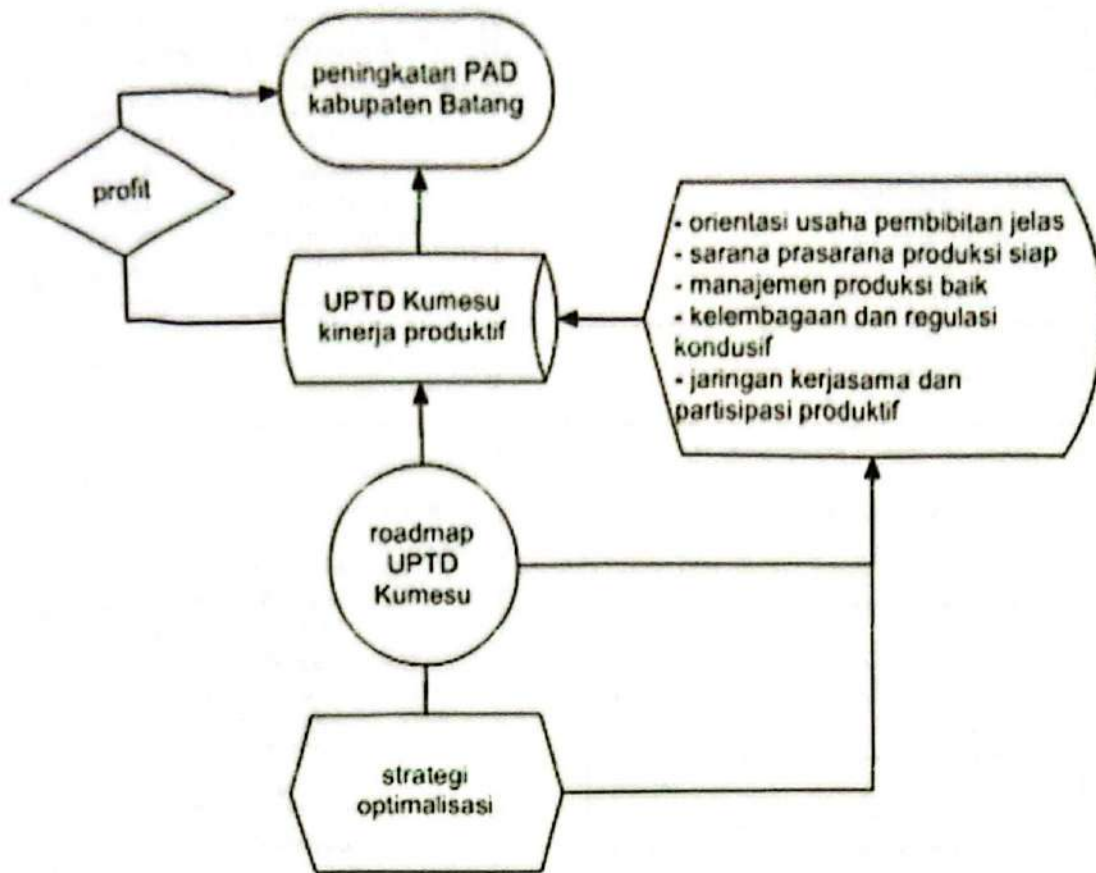
BAB IV

RENCANA TINDAK OPTIMALISASI UPTD KUMESU

4.1 ANALISIS TUJUAN

Peningkatan PAD Kabupaten Batang sebagai sebuah tujuan yang hendak dicapai melalui upaya optimalisasi UPTD Kumesu diulas dalam analisis tujuan berikut ini. Berangkat dari strategi optimalisasi yang dihasilkan melalui analisis SWOT UPTD Kumesu, maka dapat ditetapkan kriteria-kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh UPTD Kumesu sehingga dapat menampilkan kinerjanya yang produktif.

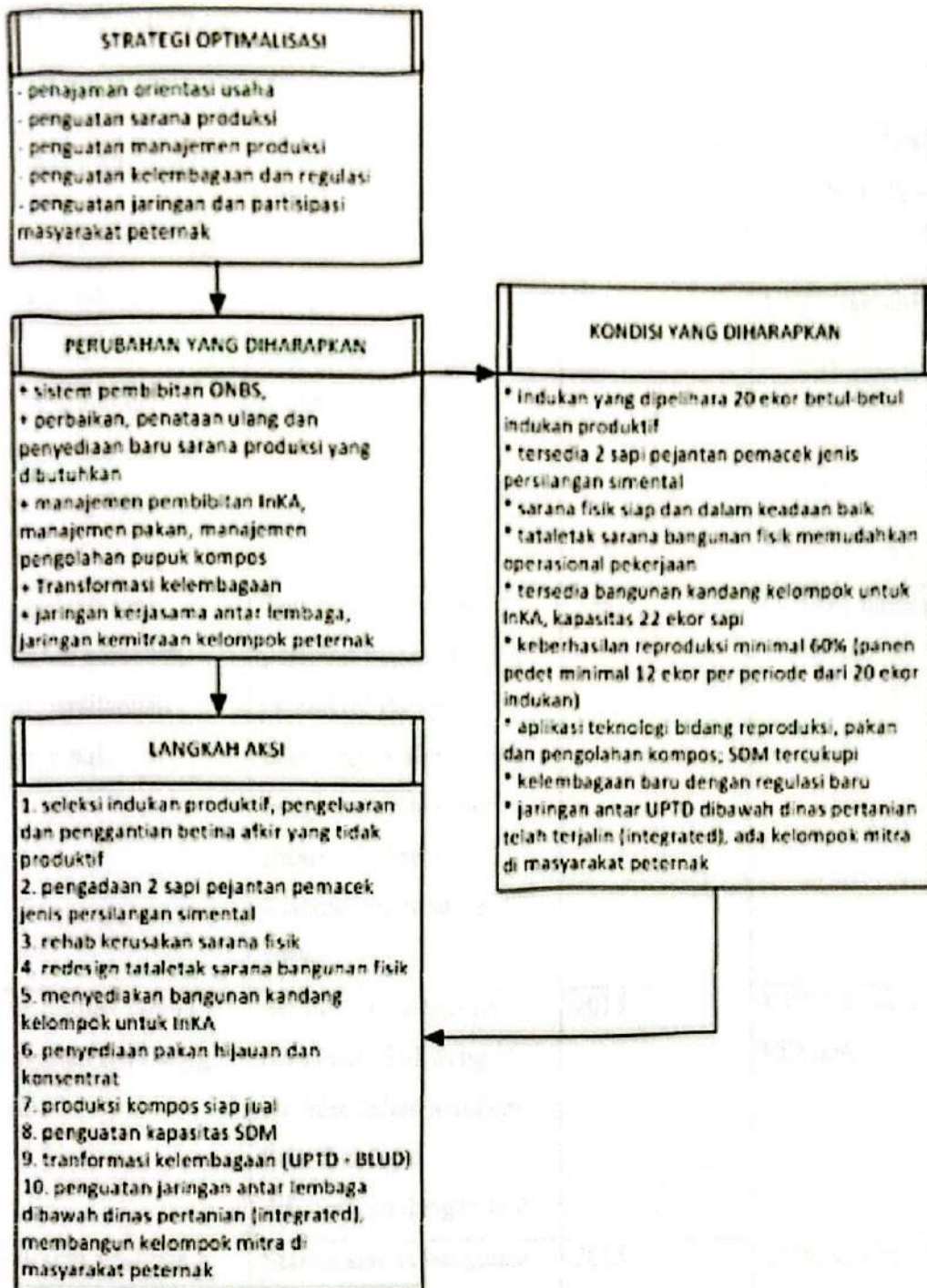
UPTD Kumesu akan mampu menampilkan kinerja produktif jika memiliki kriteria: a.) usaha pembibitan sapi potong yang dilaksanakannya memiliki orientasi dan tujuan yang jelas; b.) dukungan sarana dan prasarana produksi yang memadai; c.) manajemen produksi yang baik; d.) Kelembagaan dan payung regulasi yang kondusif; dan e.) mengembangkan jaringan kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah ataupun swasta, dan mengembangkan pola partisipasi masyarakat secara produktif. Dengan demikian maka kemampuan UPTD Kumesu untuk menjalankan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental dapat menghasilkan laba keuntungan, dan secara optimal dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan PAD Kabupaten Batang.



Gambar 4.1. Bagan Analisis Tujuan

4.2 ANALISIS ALTERNATIF

Analisis alternative berikut ini mencoba menguraikan strategi optimalisasi UPTD Kumesu kedalam pilihan-pilihan langkah operasional yang lebih rinci. Analisis alternative dengan pendekatan proyek menemukan sepuluh butir langkah operasional yang memiliki kemungkinan besar dapat berhasil jika dikerjakan. Sepuluh langkah operasional inilah yang kemudian dimasukkan kedalam rencana tindak optimalisasi UPTD Kumesu.



Gambar 4.2. Bagan Analisis Alternatif

4.3 RENCANA TINDAK

RENCANA TINDAK	KELUARAN	SASARAN WAKTU	PENGEMBAN KEPENTINGAN
MANAJEMEN USAHA PETERNAKAN			
1. Seleksi indukan produktif, pengeluaran dan penggantian betina afkir yang tidak produktif.	Tersedia 20 ekor indukan produktif yang siap untuk usaha pembibitan.	2015	UPTD Kumesu
2. Pengadaan sapi pejantan pemacek jenis persilangan Simmental.	Tersedia 2 ekor sapi pejantan pemacek yang produktif, dari jenis persilangan Simmental, dengan criteria umur antara 2,5-3 tahun. Kisaran bobot badan 500kg.	2015	UPTD Kumesu
3. Rehabilitasi sarana bangunan fisik yang rusak.	Semua sarana berupa bangunan fisik yang tersedia dalam keadaan baik dan dapat difungsikan dengan baik.	2015	UPTD Kumesu, PEMDA
4. Redesign tataletak sarana bangunan fisik.	Semua sarana bangunan fisik tertata dengan baik sehingga kemudahan operasional pekerjaan dapat tercapai. Terutama pada penataan	2015	UPTD Kumesu, PEMDA

	pergudangan pakan, gudang peralatan, dan system alur pembuangan kotoran.		
5. Menyediakan bangunan kandang kelompok untuk pemeliharaan dengan pola Intensifikasi Kawin Alam (InKA).	Tersedia bangunan kandang kelompok dengan model setengah terbuka untuk menampung populasi 22 ekor sapi dewasa. Dengan menerapkan pola InKA ini diharapkan angka kebuntungan ternak meningkat, jarak beranak menjadi lebih pendek, dan target keberhasilan reproduksi minimal 60% dapat tercapai.	2015	UPTD Kumesu, PEMDA
6. Penyediaan pakan hijauan dan penguat.	Tersedia bangunan pergudangan pakan yang mampu menampung ketersediaan pakan untuk mencukupi jumlah ternak yang dipelihara selama periode produksi. Perlengkapan pengolahan pakan. Penyediaan Urea Mineral Molases Blok sebagai pakan tambahan untuk ternak yang	2015	UPTD Kumesu

	dipelihara.		
7. Produksi kompos siap jual.	Tersedia perangkat peralatan, bahan dan tempat untuk pengolahan kotoran ternak menjadi produk kompos komersial.	2015	UPTD Kumesu
KELEMBAGAAN USAHA			
8. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	Tercukupi kebutuhan SDM menurut jumlah dan kualifikasi keahlian, sesuai dengan post operasional pekerjaan yang ada. Penguatan kapasitas SDM yang diarahkan kepada persiapan transformasi kelembagaan dari UPTD menjadi BLUD.	2015 – 2016	UPTD Kumesu, Dinas Pertanian, PEMDA
9. Tranformasi kelembagaan usaha.	Menggagas dan menyiapkan proses peralihan bentuk kelembagaan dari UPTD menuju kepada kelembagaan BLUD. Diharapkan dalam dua tahun proses transformasi kelembagaan telah selesai, sehingga berganti nama menjadi BLUD Kumesu.	2015-2016	UPTD Kumesu, Dinas Pertanian, PEMDA

PARTISIPASI MASYARAKAT			
<p>10. Penguatan jaringan kerjasama antar lembaga UPTD dibawah Dinas Pertanian (integrated), dan membangun kelompok mitra dengan masyarakat peternak.</p>	<p>Terjalin hubungan kerjasama antar UPTD yang berada dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, yang saling terintegrasi masuk sebagai bagian dari operasional pekerjaan masing-masing UPTD, berdasarkan azas jujur adil dan transparan.</p> <p>Terbangun kelompok-kelompok mitra peternak yang menjalankan peran usaha pembesaran pedet hasil pembibitan UPTD, atau usaha penggemukan sapi potong, atau sebagai kelompok pembibitan ternak potong (<i>Village Breeding Center</i>).</p>	<p>2015-2017</p>	<p>UPTD Kumesu, Dinas Pertanian, PEMDA, Masyarakat Peternak.</p>

BAB V

PENUTUP

Demikianlah rangkaian proses Kajian Potensi Investasi Peternakan Kabupaten Batang telah selesai dilaksanakan, dengan harapan intervensi kegiatan yang bisa diterapkan dapat membawa perbaikan kepada kinerja dan produktifitas UPTD Kumesu sebagaimana indikasi berikut:

A. INDIKASI MATERIAL FISIK

UPTD Kumesu memiliki usaha pembibitan sapi potong yang didukung oleh kelengkapan prasaranan bangunan fisik yang memadai, berupa: perkandangan, pergudangan pakan dan peralatan, bangunan kantor, rumah dinas, laboratorium dan bangunan unit pengolahan limbah. Kelengkapan peralatan dan benda inventaris bergerak lain yang mampu mendukung operasional pekerjaan dengan optimal.

B. INDIKASI SOSIAL

UPTD Kumesu yang semakin dinamis dengan berbagai aspek pekerjaan yang dikelola membuka peluang pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Disamping itu, konsep pengembangan yang melibatkan partisipasi masyarakat peternak dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan kelompok peternak untuk menjalankan usaha peternakan adalah sebuah konsep yang potensial dapat mensejahterakan kehidupan petani peternak di lingkungan wilayah UPTD berada.

C. INDIKASI TEKNIS TERAPAN TEKNOLOGI

UPTD Kumesu menerapkan berbagai teknologi reproduksi yang dibutuhkan, dari yang sederhana seperti penerapan kalender kebuntingan ternak atau penerapan teknologi IB yang sudah dipraktikan meluas, sampai dengan teknologi yang lebih rumit semisal teknik hormonal gertak birahi atau teknik Embrio Ternak dapat pula diaplikasikan. Kemudian, berbagai jenis teknologi bidang pakan juga dapat teraplikasikan. Teknologi lain adalah pada bidang pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk kompos atau

pupuk cair. Sehingga harapannya nanti, peran UPTD Kumesu dapat berkembang menjadi pusat percotohan dan penyebaran teknologi terapan yang bermanfaat bagi pembangunan peternakan atau pertanian secara luas di wilayah Kabupaten Batang.

D. INDIKASI FINANSIAL EKONOMI

UPTD Kumesu telah memiliki orientasi dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental, sehingga hasil panen berupa pedet lepas sapih dapat secara optimal dicapai. Dengan asumsi keberhasilan reproduksi minimal 60% dapat diwujudkan, maka dari jumlah indukan 20 ekor yang dipelihara akan menghasilkan pedet sejumlah minimal 12 ekor dalam kurun periode produksi 12 – 14 bulan. Terlebih lagi dengan adanya transformasi kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan bisnisnya, maka produksi pedet tersebut dapat ditingkatkan lagi. Potensi peningkatan pendapatan dapat ditingkatkan lebih besar lagi ketika jalinan kerjasama kemitraan dengan kelompok peternak rakyat berhasil digalang, karena dengan usaha pembesaran pedet atau penggemukan sapi potong yang dilaksanakan oleh mitra akan secara nyata memberikan penambahan nilai produk sapi yang dihasilkan. Disamping perolehan keuntungan dari penjualan sapi sebagai produk utama dari kegiatan pembibitan sapi potong, UPTD Kumesu juga akan memiliki produk andalan lain yaitu pupuk kompos. Dari populasi 20 ekor sapi yang dipelihara, jika setiap hari mengeluarkan kotoran yang dikonversi setara 5kg kompos, maka tiap bulan tersedia kompos siap jual sejumlah 3Ton. Dengan pengelolaan limbah secara baik melibatkan penerapan teknologi yang tepat maka konsep *Zero Waste – Zero Cost* dapat dicapai. Pada akhirnya, indikasi financial ekonomi yang ditampilkan oleh UPTD Kumesu adalah besaran sumbangan PAD yang diterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

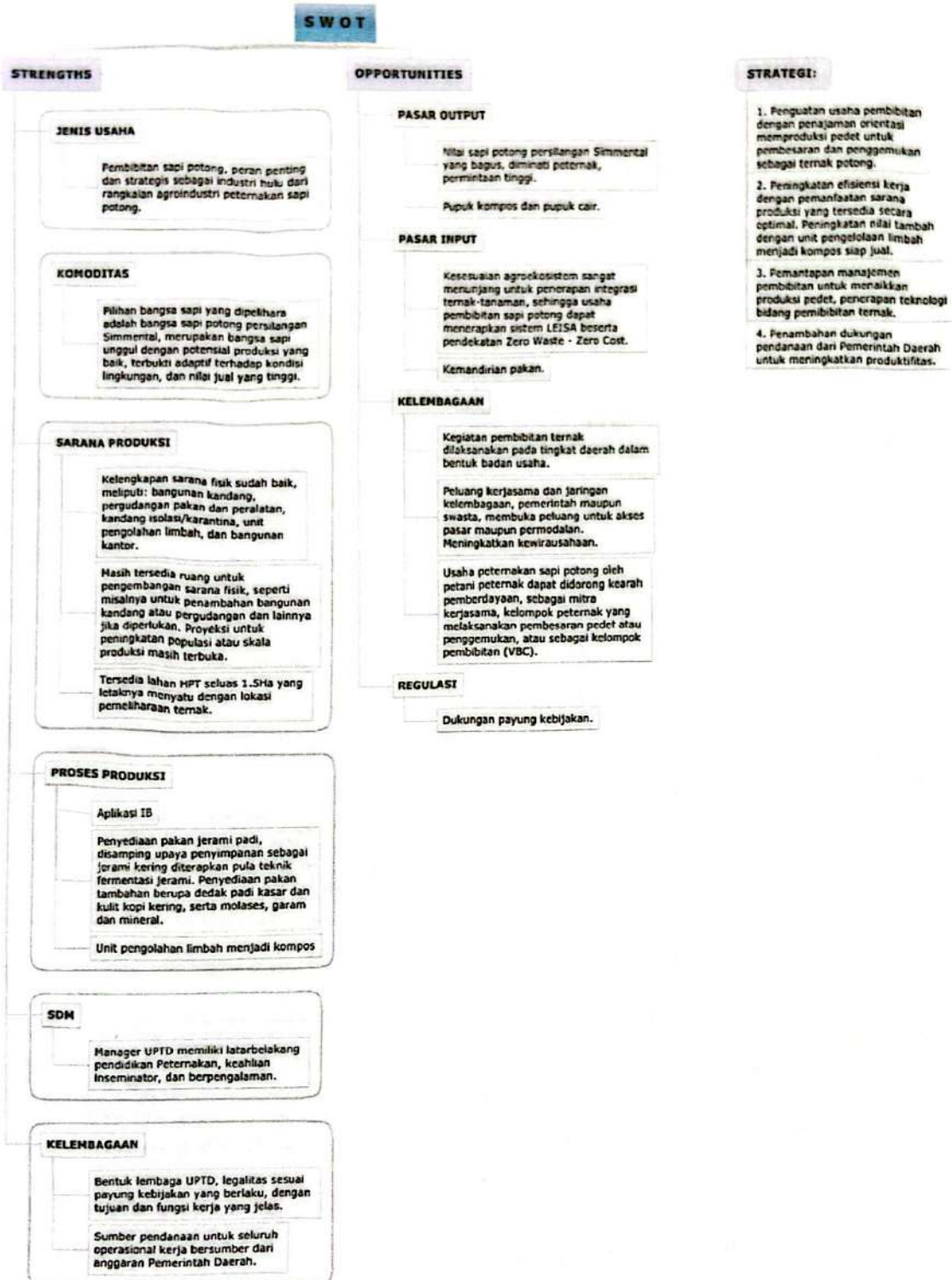
Terakhir, perkenankan ucapan terimakasih kami untuk seluruh pihak dan personal yang telah terlibat dalam proses kegiatan kajian ini. Besar harapan kami semoga hasil kajian potensi investasi peternakan Kabupaten Batang ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan peternakan secara khusus dan pembangunan di Kabupaten Batang umumnya. Terimakasih.

LAMPIRAN 1. ANALISIS SWOT UPTD KUMESU

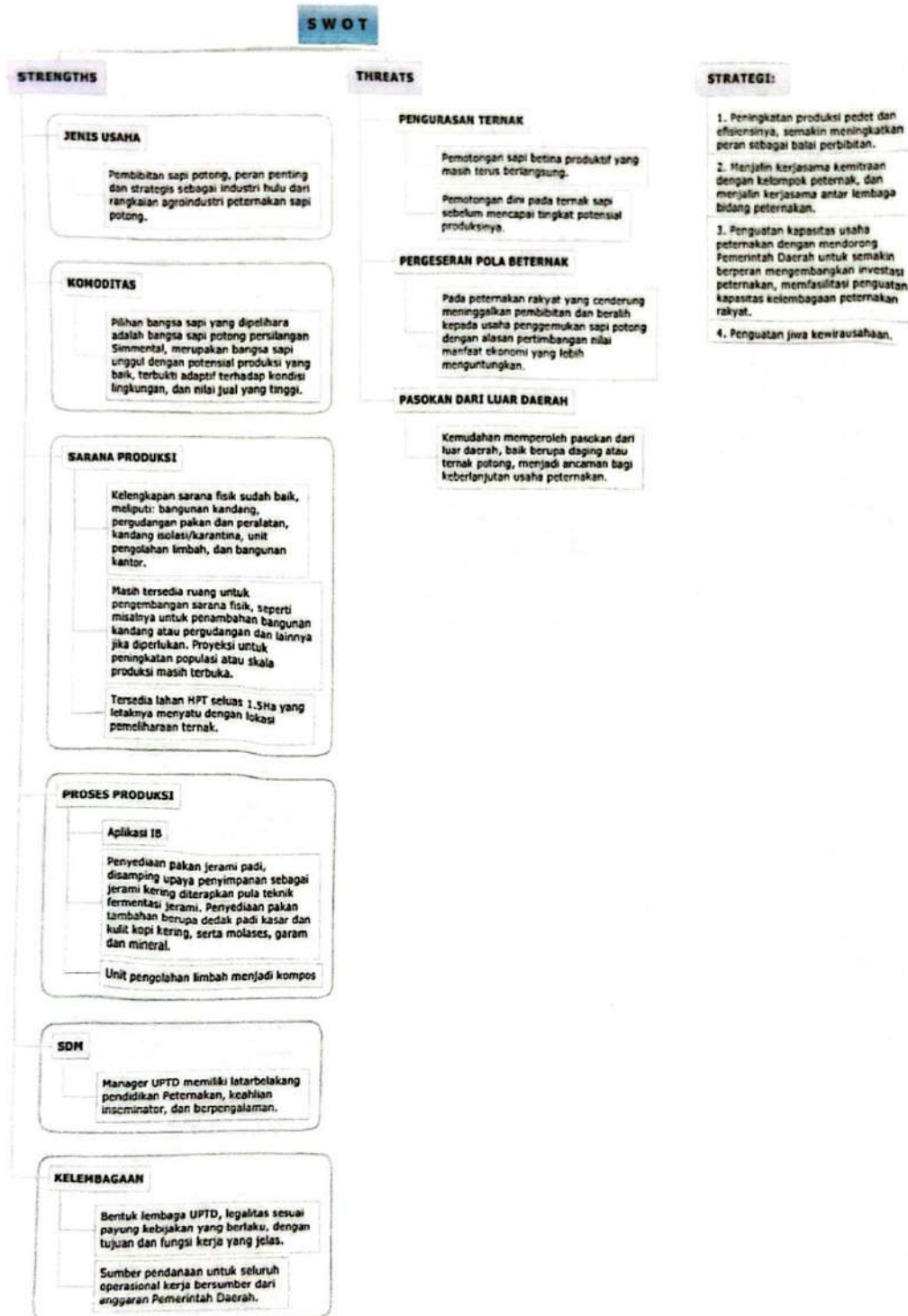
Lampiran 1a. Matrik Komponen SWOT UPTD Kumesu

SWOT			
STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
<p>JENIS USHAHA</p> <p>Pembibitan sapi potong, perah pasteurisasi dan strategi usaha industri hulu, dan rangkaian agribisnis peternakan sapi potong.</p> <p>KEKOMODITAS</p> <p>Pasaran bangsa sapi yang dipelihara adalah bangsa sapi potong peranakan Simmental, merupakan bangsa sapi unggul dengan potensial produksi yang baik, terbukti adaptif terhadap kondisi lingkungan, dan nilai jual yang tinggi.</p> <p>SARANA PRODUKSI</p> <p>Kelengkapan sarana fisik sudah baik, meliputi: bangunan kandang, perundang pakan dan peralihan, kandang restasi/terapan, unit pengalihan limbah, dan bangunan lain-lain.</p> <p>Masih tersedia ruang untuk pengembangan sarana fisik, seperti: meliputi unit pemukiman bangunan kandang atau perungutan dan lainnya jika diperlukan. Proyek untuk pemukiman populasi atau skala produksi masih bertahap.</p> <p>Terdapat lahan HPT seluas 1.5ha yang telahnya memveto dengan lahan pemeliharaan ternak.</p> <p>PROSES PRODUKSI</p> <p>Ajilaku IS</p> <p>Penyediaan pakan jerami padi, disamping upaya penyediaan sebagai jenis kering ditiripasi pula teknik fermentasi jerami. Penyediaan pakan tambahan berupa dedak padi kasar dan huli kopi kering, serta molases, garam dan mineral.</p> <p>Unit pengolahan limbah menjadi kompos</p> <p>SDH</p> <p>Manajer UPTD memiliki latarbelakang pendidikan peternakan, bahkan insesimatur, dan berpengalaman.</p> <p>KELEMBAGAAN</p> <p>Bentuk lembaga UPTD, kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan tujuan dan fungsi kerja yang jelas.</p> <p>Sumber pendanaan untuk seluruh operasional kerja bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.</p>	<p>JENIS USHAHA</p> <p>Pembibitan sapi potong, merupakan usaha dengan tingkat resiko tinggi dan membutuhkan modal besar. Untuk produksi lama, diperlukan modal yang banyak.</p> <p>KEKOMODITAS</p> <p>Ara-utal sapi peranakan simmental yang dipelihara dalam peternakan UPTD tidak dilindungi, tidak ada catatan kesehatan, tidak memiliki sertifikat bibit.</p> <p>Umumnya sapi sapi peranakan Simmental tidak menunjukkan kemampuan reproduktifitas yang rendah, siklus estrus, gejala birahi yang tidak kentara.</p> <p>SARANA PRODUKSI</p> <p>Kondisi sarana fisik rusak, perlu perbaikan dan pemeliharaan.</p> <p>Penggunaan sarana fisik yang tidak sesuai dengan zoonosisnya. Ini mengindikasikan bahwa tataletas bangunan sarana fisik tidak tepat, menyebabkan operasional peternakan.</p> <p>Lahan HPT seluas 1.5ha belum dikelola dengan baik.</p> <p>Kurangnya lahan usaha pemibitan sapi yang banyak, bukan hamparan rata.</p> <p>Konstruksi bangunan kandang adalah kandang keraman individu, tidak ada ruang, yang cenderung lebih tepat untuk produksi pengomakan ketimbang pemibitan sapi potong.</p> <p>PROSES PRODUKSI</p> <p>Perbandingan ekor pedet yang dihasilkan dan 20ekor indukkan menunjukkan bahwa kebermampuan reproduksi masih rendah (20%). Terdapat terapan yang dapat digunakan adalah IS dan ISKA.</p> <p>Unit pengolahan limbah masih belum dan tidak produktif. Jalur pemibitan limbah dan kandang menuju unit pengolahannya perlu pemetaan ulang.</p> <p>Aplikasi racun serangga (pestisida) untuk pengendalian lalat. Mengandung resiko terhadap kesehatan ternak dan hasil ternak.</p> <p>SDH</p> <p>Ketukangan tenaga untuk menangani terapan pakan pemeliharaan ternak, unit pengolahan limbah / produksi kompos, lahan HPT.</p> <p>Ketukangan dalam segi jumlah maupun segi kualitasnya.</p> <p>KELEMBAGAAN</p> <p>Anggaran UPTD yang mengikat menjadi hambatan bagi manajemen untuk menjalankan operasional kerja lapangan (on farm), terkait dengan input dan output.</p> <p>Anggaran UPTD membatasi sumber pendanaan dan anggaran daerah, menjadi kemungkinan dana investasi dan pihak lain yang mungkin potensial untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha pemibitan sapi le depan.</p> <p>Kerjasama antar lembaga bidang peternakan baik di tingkat daerah maupun tingkat yang lebih luas, atau lembaga pemibitan maupun swasta, yang dapat menunjang keberlanjutan usaha secara efektif terjamin. Integrasi antar lembaga yang terkait perlu dikembangkan.</p> <p>Pola perilaku partisipasi masyarakat petani-peternak nampaknya belum terbentuk.</p>	<p>PASAR OUTPUT</p> <p>Nilai sapi potong peranakan Simmental yang tinggi, demand potensial, pemeliharaan tinggi.</p> <p>Pajak kompos dan pupuk cair.</p> <p>PASAR INPUT</p> <p>Ketersediaan agrikultur sangat menunjang untuk pemibitan sapi ternak-ternak, sehingga usaha pemibitan sapi potong dapat menerapkan sistem LEISA beserta pendekatan Zero Waste - Zero Cost.</p> <p>Kemandirian pakan.</p> <p>KELEMBAGAAN</p> <p>Engkainya pemibitan ternak dilaksanakan pada tingkat daerah dalam bentuk badan usaha.</p> <p>Peluang membangun jaringan kerjasama kelembagaan secara luas, pemibitan maupun swasta, membuka peluang untuk akses pasar maupun pemibitan. Meningkatkan kemandirian.</p> <p>Usaha peternakan sapi potong oleh peternak peternak dapat ditolong kearah pemberdayaan, sebagai mitra kerjasama, kelompok peternak yang melaksanakan pemibitan pedet atau pengomakan, atau sebagai kelompok pemibitan (VSC).</p> <p>REGULASI</p> <p>Dukungan payung kebijakan.</p>	<p>PENCURASAN TERNAK</p> <p>Pemibitan sapi ternak produktif yang masih terus berlanjut.</p> <p>Pemibitan dari pada ternak sapi ternak untuk meningkatkan produktivitas.</p> <p>PERGESERAN POLA BETERNAK</p> <p>Pada peternakan rakyat yang cenderung mengabaikan pemibitan dan berarah kepada usaha pengomakan sapi potong dengan alasan pertimbangan nilai manfaat ekonomi yang lebih menguntungkan.</p> <p>PASOKAN DARI LUAR DAERAH</p> <p>Kemudahan memperoleh pasokan dari luar daerah, baik berupa daging atau ternak potong, menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha peternakan.</p>

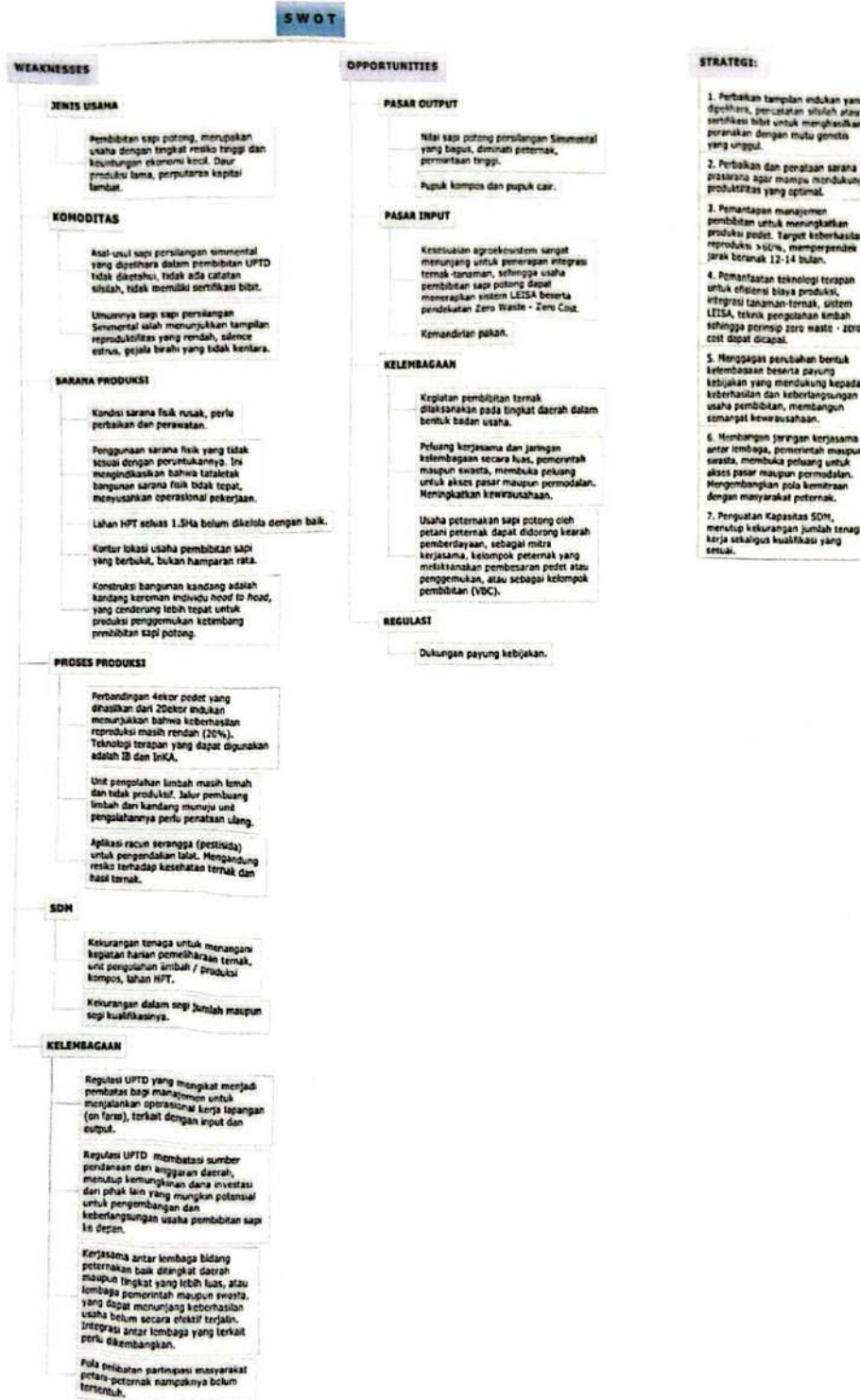
Lampiran 1b. Matrik Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) UPTD Kumesu



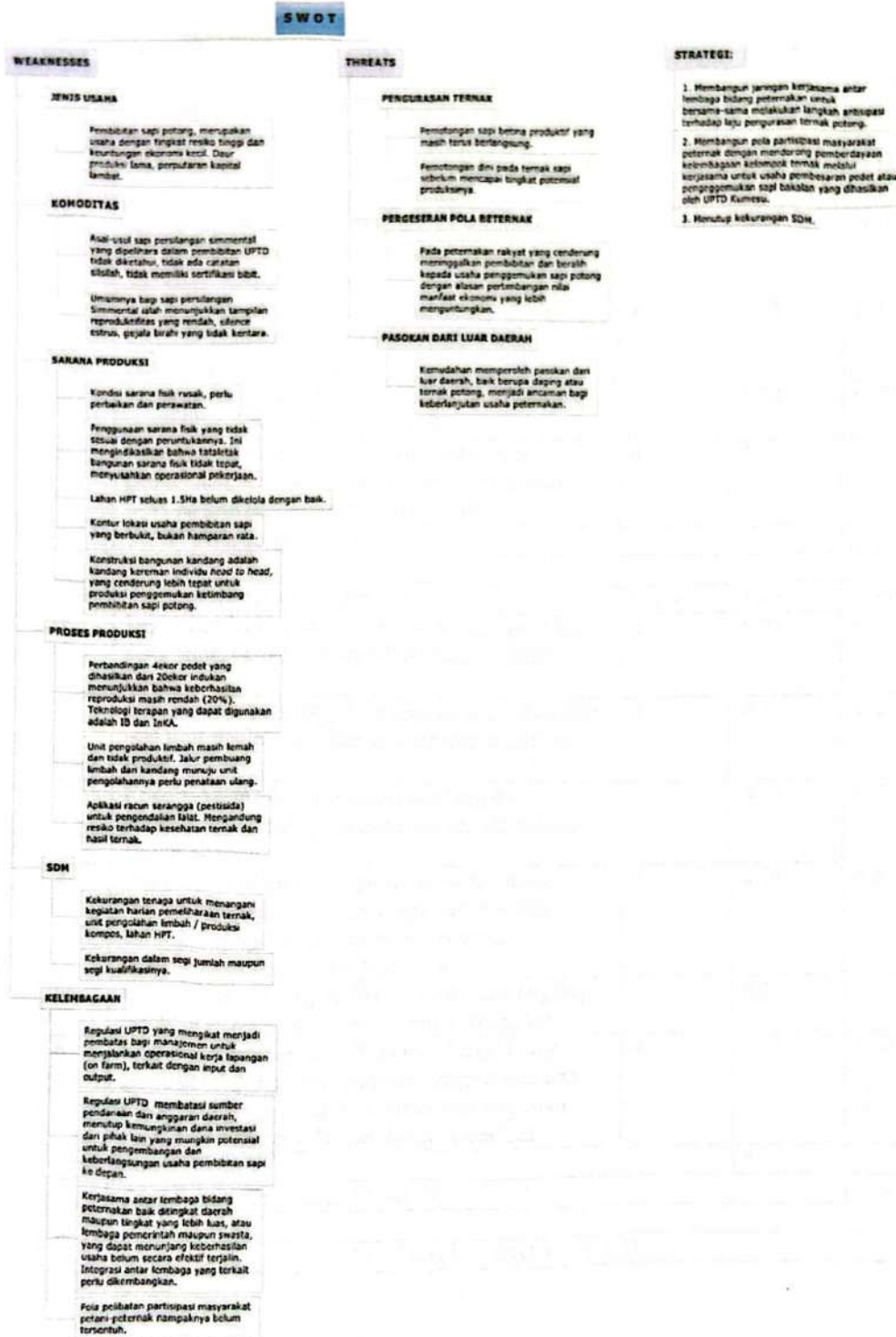
Lampiran 1c. Matrik Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T) UPTD Kumesu



Lampiran 1d. Matrik Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) UPTD Kumesu



Lampiran 1e. Matrik Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T) UPTD Kumesu



Lampiran 1f. Internal – External Strategic Factors Analysis Summary

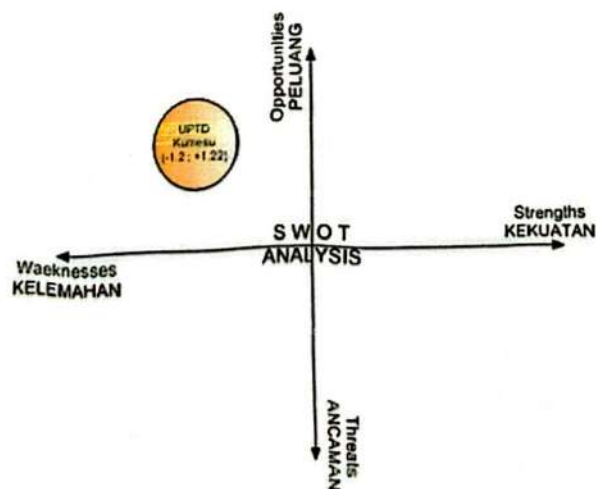
A. Matrik Internal Strategic Factors Analysis Summary

No	Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Menjalankan usaha pembibitan sapi potong memiliki peran strategis sebagai industry hulu dari rangkaian agrobisnis peternakan sapi potong.	4	0.02	0.08
2	Jenis sapi potong persilangan Simmental merupakan jenis unggul bernilai ekonomis tinggi.	3	0.06	0.18
3	Sarana prasarana produksi tersedia lengkap, sarana berupa bangunan fisik perkandangan, pergudangan, dan lahan HPT, semua ada.	4	0.07	0.28
4	Aplikasi teknologi IB pada manajemen pembibitan, dan teknologi pengolahan pakan pada system pemberian pakan ternak.	4	0.08	0.32
5	Manajer pengelola yang ahli dengan latarbelakang pendidikan peternakan, praktisi IB.	2	0.04	0.08
6	Kelembagaan dalam bentuk unit usaha milik pemerintah, UPTD, dengan dukungan peraturan serta pendanaan dari sumber pemerintah.	4	0.1	0.4
Total Faktor Kekuatan (Total S)				1.34
No	Faktor Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Usaha pembibitan membutuhkan periode produksi yang lama, perputaran capital lambat, beresiko tinggi.	4	0.05	0.2
2	Indukan sapi persilangan Simmental tidak diketahui asal usul silsilahnya, tidak ada sertifikasi kualitas bibit.	3	0.1	0.3
3	Kondisi sarana fisik bangunan kandang dan pergudangan rusak, pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukannya.	4	0.13	0.52
4	Produktifitas dalam menghasilkan pedet masih rendah, penerapan teknologi reproduksi masih kurang, dan aplikasi racun serangga untuk pengendalian lalat terlalu beresiko.	4	0.15	0.6
5	Banyak aspek pekerjaan harian yang tidak tergarap disebabkan oleh kekurangan jumlah tenaga kerja.	4	0.1	0.4
6	Regulasi kelembagaan UPTD membatasi ruang gerak untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha, sumber pendanaan terbatas dari anggaran daerah menutup pendanaan dari investor luar.	4	0.13	0.52
Total Bobot			1	
Total Faktor Kelemahan (Total W)				2.54
Total S – Total W = (-1.2)				

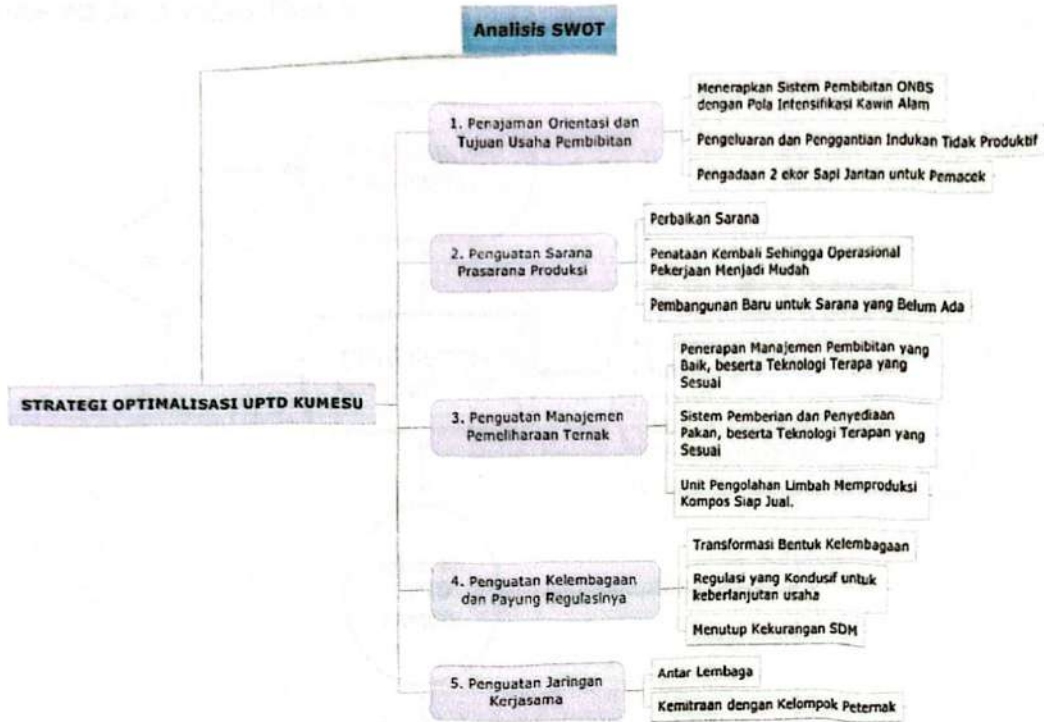
B. Matrik External Strategic Factors Analysis Summary

No	Faktor Peluang (<i>Opportunities</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Permintaan sapi potong persilangan Simmental tinggi, potensi produksi unggulan, disukai peternak, nilai ekonomis tinggi.	4	0.2	0.8
2	Kesesuaian agroekosistem yang masih mampu untuk mendukung pengembangan usaha peternakan sapi potong.	4	0.2	0.8
3	Penguatan kelembagaan, membangun jaringan kerjasama antar lembaga, membangun peranserta produktif masyarakat peternak.	3	0.15	0.45
4	Payung regulasi pembangunan peternakan yang kondusif.	3	0.12	0.36
Total Faktor Peluang (Total O)				2.41
No	Faktor Ancaman (<i>Threats</i>)	Sekor	Bobot	Jumlah
1	Pengurangan populasi ternak potong karena pemotongan betina produktif dan pemotongan ternak muda.	4	0.2	0.8
2	Pergeseran pola beternak pada peternakan rakyat, dari usaha pembibitan yang cenderung beralih kepada penggemukan sapi potong.	3	0.08	0.24
3	Pengurangan usaha peternakan sapi potong karena pasokan ternak potong atau produk daging yang tersedia dari luar daerah.	3	0.05	0.15
Total Bobot			1	
Total Faktor Ancaman (Total T)				1.19
Total O – Total T = (1.22)				

C. Kuadran SWOT Posisi Strategis UPTD Kumesu

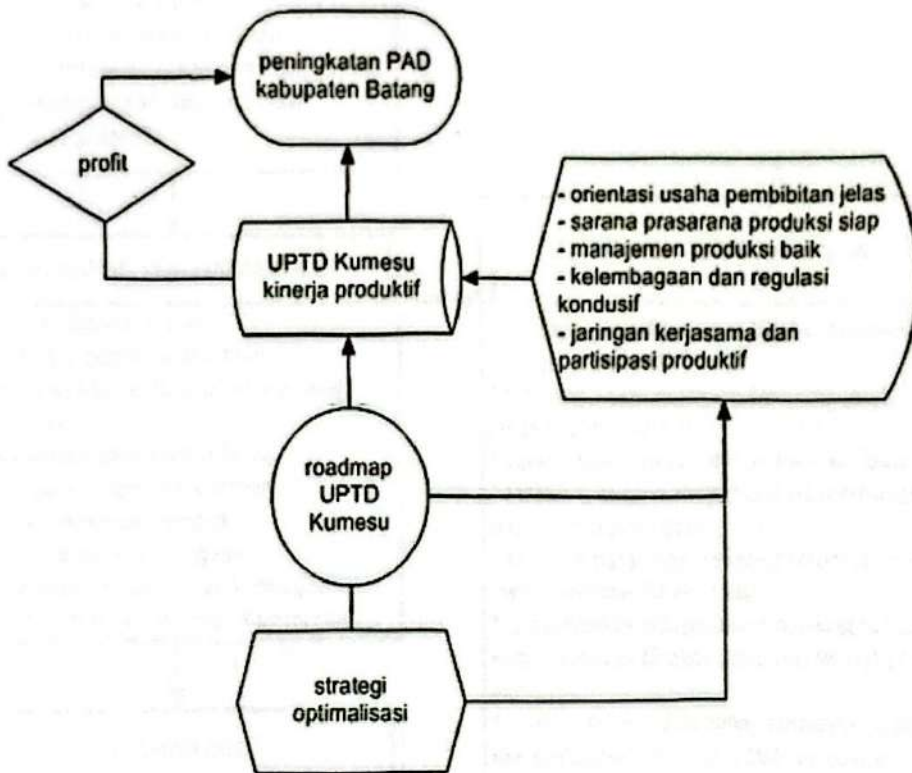


Lampiran 1g. Matrik Strategi Optimalisasi UPTD Kumesu

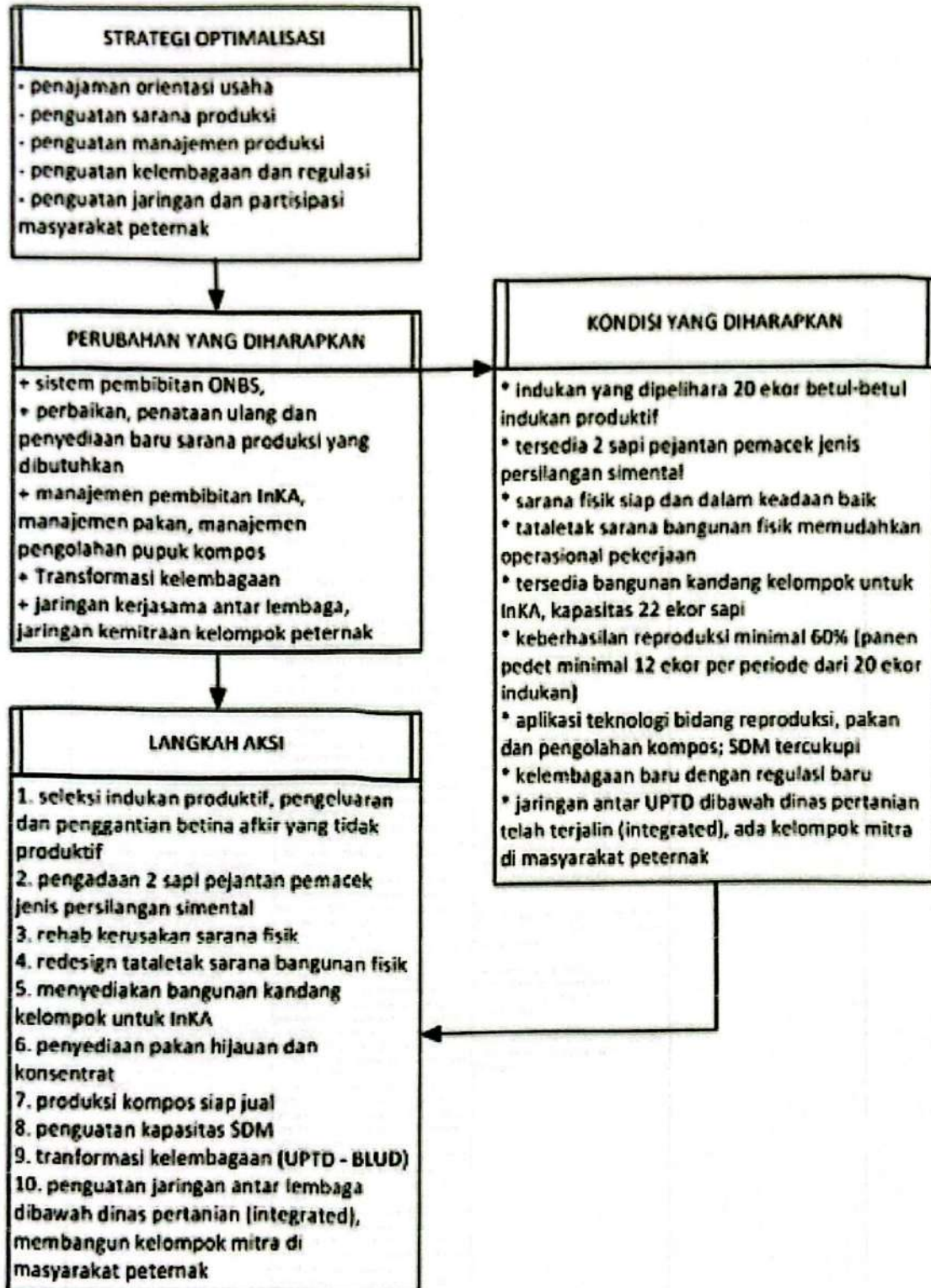


LAMPIRAN 2. ANALISIS ZOPP UPTD KUMESU

Lampiran 2a. Analisis Tujuan



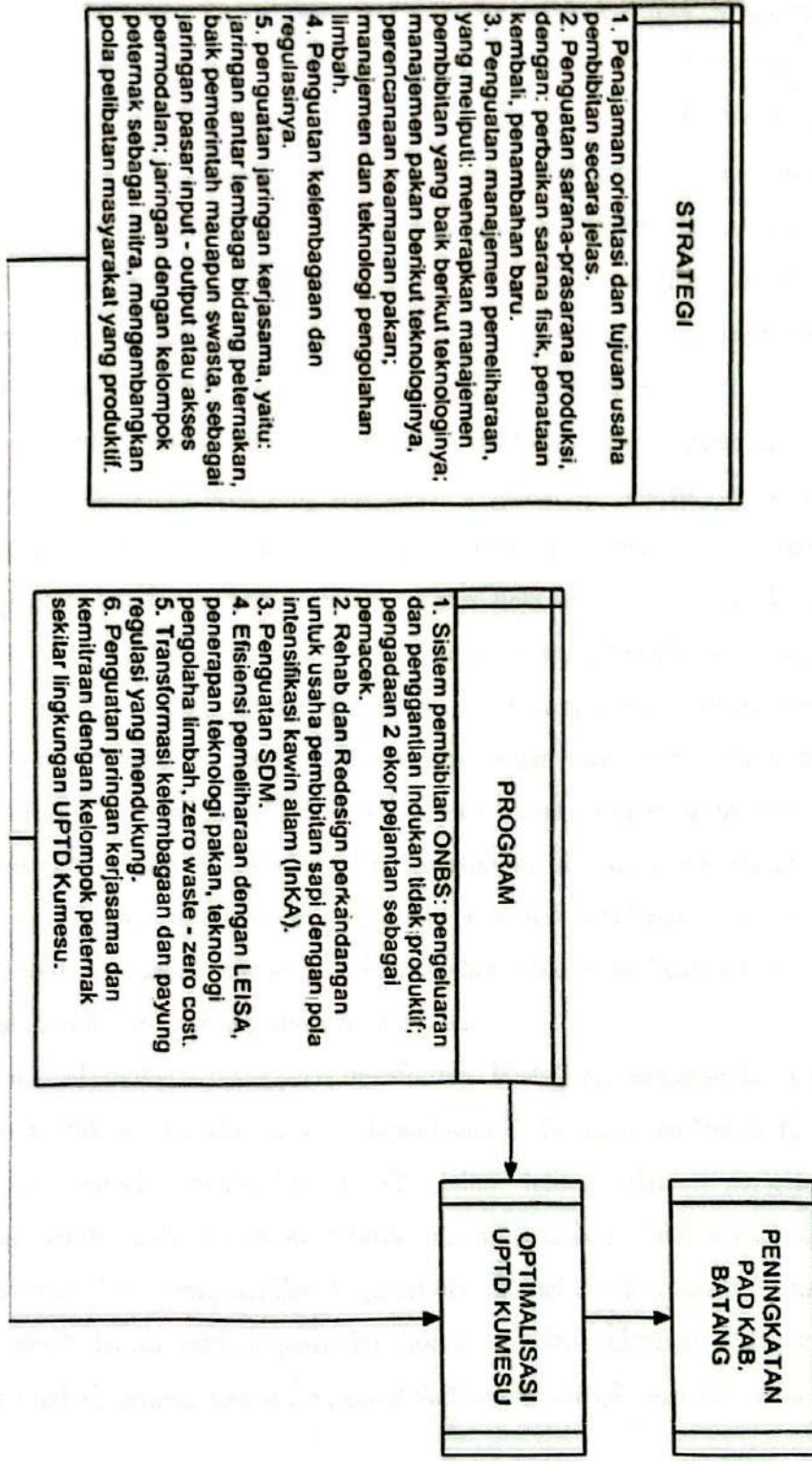
Lampiran 2b. Analisis Alternatif



Lampiran 2c. Matrik Perencanaan Proyek Analisis ZOPP

strategi	indikator	asumsi	indikator asumsi
peningkatan PAD Kabupaten Batang			
Optimalisasi UPTD Kumesu	<ul style="list-style-type: none"> orientasi usaha pembibitan jenis sarana prasarana produksi siap manajemen produksi baik kelembagaan dan regulasi kondusif jejaring kerjasama dan partisipasi produktif 	<p>kinerja yang baik memberikan keuntungan ekonomis berupa peningkatan profit yang signifikan</p>	<p>loka penelitian sapi dijennak</p>
<ul style="list-style-type: none"> penajaman orientasi usaha penguatan sarana produksi penguatan manajemen produksi penguatan kelembagaan dan regulasi penguatan jejaring dan partisipasi masyarakat peternak 	<ul style="list-style-type: none"> sistem pembibitan ONBS perbaikan, penataan ulang dan penyediaan baru sarana produksi yang dibutuhkan manajemen pembibitan INKA, manajemen pakan, manajemen pengolahan pupuk kompos Transformasi kelembagaan jejaring kerjasama antar lembaga, jejaring kemitraan kelompok peternak 	<p>penerapan strategi optimalisasi meningkatkan kinerja UPTD Kumesu, meningkatkan produktivitas usaha dan pencapaian keuntungan ekonomis</p>	<p>loka penelitian sapi dijennak</p>
<ul style="list-style-type: none"> sistem pembibitan ONBS perbaikan, penataan ulang dan penyediaan baru sarana produksi yang dibutuhkan manajemen pembibitan INKA, manajemen pakan, manajemen pengolahan pupuk kompos Transformasi kelembagaan jejaring kerjasama antar lembaga, jejaring kemitraan kelompok peternak 	<ul style="list-style-type: none"> indukan yang dipelihara 20 ekor betul-butul indukan produktif tersedia 2 sapi pejantan pemacak jenis persilangan simental sarana fisik siap dan dalam keadaan baik tataletak sarana bangunan fisik memudahkan operasional pekerjaan tersedia bangunan kandang kelompok untuk INKA, kapasitas 22 ekor sapi keberhasilan reproduksi minimal 60% (panen pedet minimal 12 ekor per periode dari 20 ekor indukan) aplikasi teknologi bidang reproduksi, pakan dan pengolahan kompos; SDM terlukupi kelembagaan baru dengan regulasi baru jejaring antar UPTD dibawah dinas pertanian telah terjalin (integrated), ada kelompok mitra di masyarakat peternak 	<p>ONBS sebagai sistem pembibitan yang paling sesuai untuk usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental; dengan orientasi usaha pembibitan untuk menghasilkan peranakan sapi potong unggul, menanggapi peluang kebutuhan sapi bibit dan bakalan yang terus meningkat.</p> <p>dukung sarana produksi yang baik dengan penerapan tatalaksana manajemen yang baik menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha.</p> <p>aplikasi teknologi terapan yang tepat jenis dan tepat guna.</p> <p>model kandang kelompok dengan intensifikasi Rawin Alam (INKA) dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi, memperpendek jarak beranak, meningkatkan produksi pedet.</p> <p>LEISA dan pendekatan Zero Waste -Zero Cost merupakan upaya efisiensi, menekan biaya produksi.</p> <p>transformasi UPTD menjadi BLUD merupakan langkah penguatan kelembagaan dan penguatan kewirausahaan.</p> <p>jejaring kerjasama dan kemitraan sebagai sarana mencapai profit dan benefit kolektif.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> seleksi indukan produktif, pengeluaran dan penggantian betina akhir yang tidak produktif pengadaan 2 sapi pejantan pemacak jenis persilangan simental rehab kerusakan sarana fisik redesign tataletak sarana bangunan fisik menyediakan bangunan kandang kelompok untuk INKA penyediaan pakan hijauan dan konsentrat produksi kompos siap jual penguatan kapasitas SDM transformasi kelembagaan (UPTD - BLUD) penguatan jejaring antar lembaga dibawah dinas pertanian (integrated), membangun kelompok mitra di masyarakat peternak 	<ol style="list-style-type: none"> seleksi 20 ekor sapi indukan yang dipelihara dengan mengaplikasikan IB maksimal 2 kali service; yang gagal dikeluarkan dan diganti; target waktu 6 bulan, diperoleh 20 ekor sapi indukan produktif. dua ekor sapi pejantan persilangan Simmental; umur 2.5 - 3 tahun; target pengadaan tahun ke-dua; penerapan INKA semua sarana dalam keadaan baik dan difungsikan sesuai peruntukannya; target pelaksanaan selesai pada tahun pertama. perbaikan tataletak sarana bangunan fisik untuk memudahkan operasional pekerjaan, menghindari penggunaan yang salah; target pelaksanaan selesai pada tahun pertama. bangunan kandang kelompok untuk INKA, kapasitas tampung 22 ekor ternak sapi dewasa; target pelaksanaan selesai pada tahun pertama. penyediaan bank pakan hijauan dan konsentrat untuk menjamin ketersediaan pakan ternak yang dipelihara; tersedia peralatan dan bahan untuk pengolahan pakan hijauan dan konsentrat; aplikasi UMB sebagai pakan tambahan; target pelaksanaan selesai pada tahun pertama. tersedia tempat, peralatan dan bahan untuk memproduksi pupuk kompos komersial; target pelaksanaan selesai pada tahun pertama. menutupi kekurangan SDM, serta mempersiapkan kapasitas SDM sesuai dengan arahan optimalisasi UPTD Kumesu; target pelaksanaan bertahap dimulai pada tahun pertama sampai tahun ke-dua. transformasi kelembagaan UPTD menjadi BLUD; target pelaksanaan bertahap dimulai pada tahun pertama sampai tahun ke-dua. integrasi kerjasama antar UPTD dibawah Dinas Perikanan Tanaman Pangan dan Peternakan, dan kemitraan pembesaran pedet dan penggemukan sapi dengan kelompok peternak; Target pelaksanaan dimulai pada tahun pertama sampai tahun ke-tiga. 		<p>loka penelitian sapi dijennak data kajian</p>

LAMPIRAN 3. ROADMAP OPTIMALISASI UPTD KUMESU



LAMPIRAN 4. ANALISIS KELEMBAGAAN BLUD

UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang menginduk kepada kelembagaan di atasnya dalam struktur hirarki lembaga milik pemerintah. Dalam hal kajian ini, UPTD BB Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kumesu merupakan sebuah lembaga milik pemerintah daerah yang menginduk kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang. Konsekuensi dari bentuk kelembagaan tersebut menjadikan UPTD mengikuti mekanisme kelembagaan yang sama dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Pengelolaan anggaran tersebut menimbulkan kelemahan tersendiri dalam memenuhi fungsi UPTD terkait dengan operasionalnya.

Kegiatan usaha pembibitan sapi potong persilangan Simmental yang dilaksanakan oleh UPTD Kumesu memiliki karakter bisnis yang kuat dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak bisa disamakan dengan SKPD dalam hal pengelolaan anggaran. UPTD Kumesu membutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih longgar atau fleksibel menyesuaikan keadaan permintaan pasar. Terlebih lagi dengan adanya penerimaan berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan oleh Pemerintah daerah kepada UPTD, yang hal ini menjadi sebuah tuntutan bagi UPTD untuk dapat mengelola seluruh pelaksanaan usaha yang ditanganinya secara profesional. Target sumbangan PAD berarti bahwa usaha yang dilaksanakan oleh UPTD Kumesu harus benar-benar menghasilkan laba keuntungan. Bentuk kelembagaan yang paling sesuai untuk menjalankan usaha profesional dengan orientasi laba keuntungan, dengan tetap mampu memberikan sumbangan yang baik terhadap PAD atau kemanfaatan bagi pembangunan daerah, inilah yang penting untuk dirumuskan.

Pertimbangan keadaan di atas maka perlu transformasi bentuk kelembagaan dari UPTD tersebut yaitu dalam bentuk perusahaan daerah (perusda) atau Badan Layanan Umum (BLU). Bentuk kelembagaan perusda menjadikan UPTD lebih leluasa dalam pengelolaan keuangannya (manajemen bisnisnya). Namun, konsekuensi yang terjadi adalah berkurangnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan kegiatan operasional usaha yang dilaksanakan. Peran pemerintah daerah hanya sebagai penyedia modal saja dan pelaporan akhir tahun. Fungsi UPTD seperti terkait dengan pelayanan masyarakat (*social benefit*) menjadi lebih kecil

atau tidak terkontrol secara struktural. Oleh karena itu perlu alternatif dimana lembaga tersebut masih dapat terkontrol oleh pemerintah daerah terkait *financial profit* dan *social benefit*. Proses transformasi lembaga juga dilakukan secara tahap demi tahap melalui upaya optimalisasi internal, termasuk penyiapan SDM nya.

Badan Layanan Umum (BLU) menurut UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 ayat 1 disebut Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Oleh karena itu BLU dalam kasus ini bisa disebut BLU daerah (BLUD) yang memiliki pengelolaan keuangan dan bimbingan teknis dibawah pemerintah daerah dengan ketentuan disebutkan dalam pasal 69 ayat 2 bahwa rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pendapatan BLUD diatur dalam ayat 4 bahwa pendapatan yang diperoleh oleh BLUD sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan daerah. Sampai disini jelaslah bahwa Pengelolaan keuangan BLUD sama dengan SKPD yang diperkuat dengan PP Nomor 23 pasal 2 ayat 6 bahwa rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara / lembaga / SKPD / pemerintah daerah, namun ada perbedaan pengelolaan keuangan yang lain yang dituangkan dalam pasal 5 dan 6 bahwa BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan masyarakat atau badan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Ketentuan BLU disebut pada pasal 1 ayat satu bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya

pada ayat 2 disebutkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pernyataan tersebut jelas bahwa BLUD dapat menyelenggarakan praktik bisnis dalam operasionalnya dengan prinsip efisiensi dan produktifitas, ini relevan sebagai bentuk pengelolaan seperti pada UPTD Kumesu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Syarat pendirian UPTD Pemerintahan Kabupaten Batang menjadi BLUD untuk saat ini bisa memenuhi standar substantif seperti termaktub dalam pasal ayat 2 bahwa persyaratan terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah / kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu juga memenuhi persyaratan teknis apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri / pimpinan lembaga / kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Oleh karena itu apabila UPTD akan diubah menjadi BLUD maka harus membuat persyaratan administratif saja yaitu :

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;

- e. standar pelayanan minimum; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada menteri / pimpinan lembaga / kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan / gubernur / bupati / walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan / gubernur / bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan BLUD sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dapat dilakukan melalui pelatihan untuk persiapan pengelolaan BLUD oleh pemerintah daerah.



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DILINGKUNGAN DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Mengingat :

a. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), dan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor), serta guna kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilindungi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilindungi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri : E No.: 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri : D No.: 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan ditemukannya Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen (UP3) Sambong;
- b. UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar;
- c. UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemsu;
- d. UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Puskesmas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen Sambong terdiri :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;

(2) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar terdiri :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemsu terdiri :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Puskesmas terdiri :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemsu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Bagan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen Sambong

Pasal 4

(1) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen Sambong adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

(2) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen (UP3) Sambong dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 5

(1) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Pemangangan Pasca Panen (UP3) Sambong mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengutamakan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan produk Benth Pokok (BP) dan benth sebar (BR) padi dan palawija;
- c. menyebarkan dan penyaluran benth pokok dan benth sebar kepada produsen/masyarakat;
- d. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan maupun pada proses produksi benth, penyediaan dan penyaluran;
- e. menyiapkan dan menyediakan kebutuhan benth unggul bermutu bagi masyarakat;
- f. mengelola atau manajemen operasional Balai Benth Padi dan Palawija;
- g. menjaga kestabilan, kelancaran kegiatan operasional Balai Benth baik menyiapkan bahan baku, processing dan pemasaran hasil;
- h. menyiapkan sarana prasarana operasional Balai Benth Padi dan Palawija;
- i. melaksanakan urusan administrasi Balai Benth Padi dan Palawija;
- j. memekan kerugian panen petani seminimal mungkin sebagai akibat belum terganggunya pengelolaan pasca panen secara baik saat musim panen penghibur/rendang;
- k. memperbaiki harga jual gabah kering giling (GKG) yang rendah saat musim penghibur/rendang;
- l. membantu dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian OPK petani yang berkualitas di daerah;
- m. mengelola atau manajemen operasional UPJ Sambong;
- n. menyiapkan sarana dan prasarana operasional UPJ Sambong;
- o. menjaga kestabilan, kelancaran kegiatan operasional UPJ baik penyediaan dari segi bahan baku, pemasaran maupun jasa pengolahan;
- p. melaksanakan pengelolaan Balai Benth Padi dan Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ) Sambong secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
- q. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan kepada Kepala Dinas melalui bidang tanaman pangan untuk diajukan anggaran APBD Kabupaten Batang;
- r. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan Balai Benth Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ) Sambong untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Tanaman Pangan;
- s. melaporkan semua kegiatan pengelolaan Balai Benth Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ) kepada Kepala Dinas;
- t. menyertikan semua pendapatan dari pengelolaan Balai Benth Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ) melalui Bendahara Penerimaan yang diketahui Kepala Dinas untuk disetorkan ke Kas Daerah;
- u. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas;
- v. melaksanakan tugas kedinmasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benth Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penerangan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas kedinmasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benth Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UPJ).

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengembangan, peralatan, perkakala dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
- f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinmasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benth Hortikultura Claper
Pasal 7

(1) UPTD Balai Benth Hortikultura Claper adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Batang.

(2) UPTD Balai Benth Hortikultura Claper dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Pasal 8

(1) UPTD Balai Benth Hortikultura Claper mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengembangan penangkaran benth/bibit hortikultura dengan menyelenggarakan kegiatan pembibitan tanaman untuk menyediakan bibit tanaman hortikultura yang berkualitas;
- c. melaksanakan produksi dan perbanyakan benth pokok (BP) dan benth sebar (BR) hortikultura;
- d. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan maupun pada proses produksi benth dan penyaluran benth hortikultura;
- e. menyediakan sarana pelatihan dan magang perbenihan hortikultura bagi petani atau masyarakat;
- f. melaksanakan perbanyakan varietas-varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat;
- g. mengelola kebun hortikultura claper sebagai kebun induk buah-buah unggulan secara intensif untuk percontohan dan kebun produksi;
- h. mengelola kebun hortikultura claper secara optimal agar dapat berkembang sebagai sarana agrowisata kebun hortikultura;
- i. melaksanakan pengelolaan balai benth hortikultura secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;

- j. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun hortikultura claper untuk diujikan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Hortikultura;
- k. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui kepala Bidang Hortikultura;
- l. melaporkan semua kegiatan pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun produksi kepada Kepala Dinas;
- m. menyerahkan semua pendapatan dari pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun produksi melalui Bendahara Perencanaan yang diketahui Kepala Dinas untuk diserahkan ke Kas Daerah;
- n. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Bidang masing-masing;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Hortikultura Claper mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Subbagian Tera Usaha
Pasal 9

(3) Subbagian Tera Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura Claper.

(4) Kepala Subbagian Tera Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kemsipin, perlengkapan, perlatian, perbaikan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
- f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemosu
Pasal 10

(1) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemosu adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

(2) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemosu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 11

(1) UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemosu mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengembangan penangkaran bibit ternak unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit ternak yang berkualitas dan mengembangkan penyebaran penangkaran bibit ternak di sekitarnya;
- c. melakukan kegiatan usaha produktif dalam pengembangan ternak dari ternak kecil sampai dengan ternak besar termasuk kegiatan penggemukan sapi untuk mendapatkan nilai tambah dan menambah pendapatan UPTD;
- d. menyediakan sarana pelatihan dan magang pembibitan ternak pagi petani atau masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak kemosu secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
- f. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan balai benih perbibitan dan pengembangan ternak kemosu untuk diujikan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Kepala Bidang Peternakan;
- g. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui kepala Bidang Peternakan untuk diajukan anggaran dalam APBD Kabupaten Batang;
- h. melaporkan semua kegiatan pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak kepada Kepala Dinas;
- i. menyerahkan semua pendapatan dari pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak ke Kas Daerah melalui Bendahara Perencanaan yang diketahui Kepala Dinas;
- j. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemosu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perbaikan dan Pengembangan Ternak Kemenu.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
- f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan
Pasal 13

- (1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 14

- (1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan kepada petugas rumah potong hewan dan jagal dengan sosialisasi dan bimbingan untuk menjamin produk daging dan kulitnya aman dan sehat;
- c. melaksanakan pemantauan perilaku dengan pembagian tugas, penyediaan dan membekalkan pendanaan untuk intensifikasi pemusnahan dan tercapainya target;
- d. melaksanakan pengawasan peredaran daging dengan survey, wawancara dan pemeriksaan daging untuk melindungi pedagang dan konsumen;
- e. melaksanakan pengawasan tempat pemotongan dan penjualan daging dengan monitoring, pembinaan dan sanksi agar produk daging yang dihasilkan memenuhi persyaratan Asuh (aman, sehat, utuh dan halal);
- f. melaksanakan pemeliharaan kesehatan ternak dan daging sebelum dan sesudah pemotongan dengan mensterilkan dokumen, fisik dan daging sesudah dipotong agar layak potong dan dikonsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Ganawati) dan kesehatan hewan melalui laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

- h. menyediakan sarana pelatihan dan magang pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmawet) dan kesehatan hewan bagi peternak atau masyarakat;
- i. melaksanakan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
- j. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembinaan operasional pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Peternakan;
- k. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui Kepala Bidang Peternakan untuk diajukan anggaran dalam APBD Kabupaten Batang;
- l. melaporkan semua kegiatan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas ke Kas Daerah melalui Bendahara Pemerintahan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
- m. menyebarkan semua pendapatan dan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas ke Kas Daerah;
- n. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Bidang masing-masing;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan
Subbagian Tata Usaha
Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan dan Puskeswan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perbekalan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
- f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta mempertahankan pembinaan dan bimbingan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menempatkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam membuat laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menginformasikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENANGKAPAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala UPPTD dan Pejabat lainnya di lingkungan UPPTD diangkat dan diberhentikan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Jenjang Jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Kepala UPPTD sebagai pelaksana operasional di bidang teknis masing-masing pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk efektifitas dengan mempertimbangkan kompetensi dan disesuaikan dengan keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang. (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 77 Seri D Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditandatangani di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

BUPATI BATANG

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

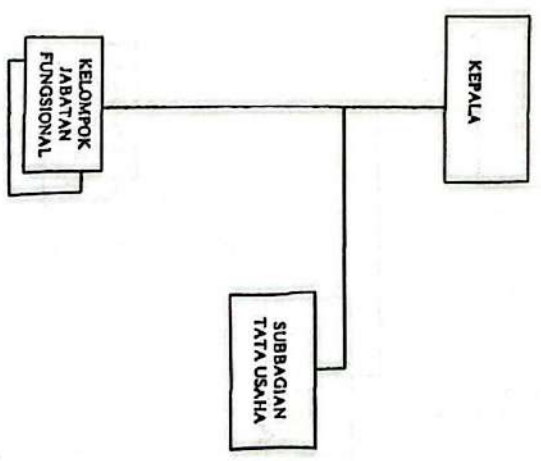
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

MAKSIDITIM

Diberita sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG
ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH PADI, PALAWUDA
DAN UNIT PENANGANAN PASCA
PANEN (UP3) SAMBONG
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG

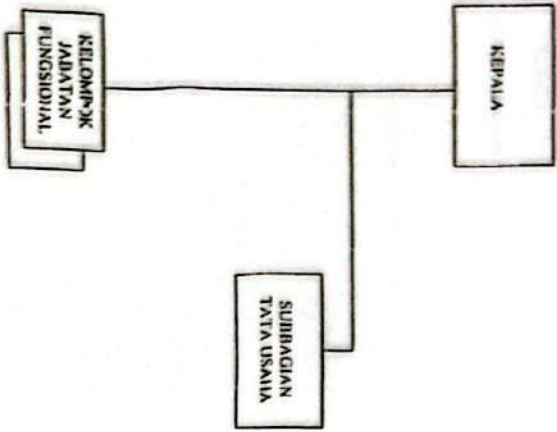


BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 79 TAHUN 2012
 TENTANG
 BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIK BALAI BENIH HORTIKULTURA
 CIAPAR
 PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
 PANGAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BATANG

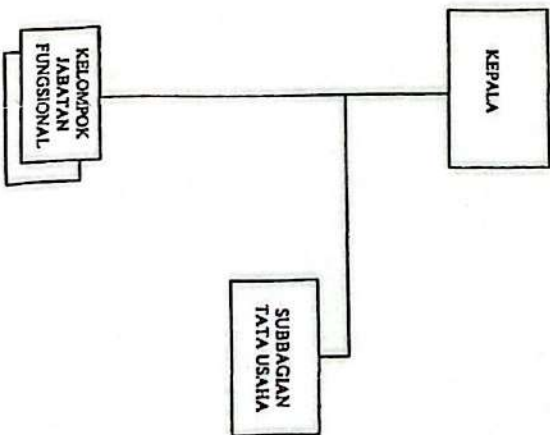


BUPATI BATANG

td

YOYOK RIYO SI DIRYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 67 TAHUN 2012
 TENTANG
 BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIK BALAI BENIH PERBIBITAN DAN
 PENGEMBANGAN TERNAK KEMESU
 PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
 PANGAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BATANG

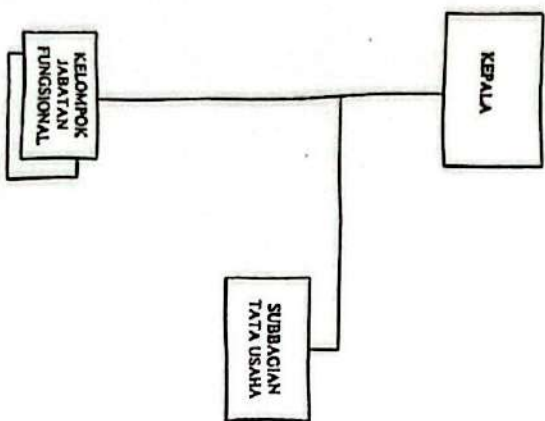


BUPATI BATANG

td

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN PUSKESWAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG

644

YOYOK RIYO SUDIRYO

